LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020

Jl. Basuki Rahmat Utara No.1 Kec. Magetan, Kabupaten Magetan Jawa Timur 63319
http://www.magetan.go.id admin@magetan.go.id Telepon (0351) 895319

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Magetan Tahun 2020.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 didasari oleh Surat Menteri dalam Negeri tanggal 18 Desember 2021 Nomor 120.04/6931/OTDA tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sejalan dengan visi kabupaten Magetan yaitu "Masyarakat Magetan Yang Smart Semakin Mantab Dan Lebih Sejahtera " dimana Masyarakat Magetan yang SMART merupakan kepanjangan dari Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil yang merepresentasikan karakteristik masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) saat ini. Masyarakat yang memiliki kemampuan jasmani (sehat), intelektual (maju), religiusitas (agamis), sosial (ramah) dan motorik (terampil) sebagai elemen-elemen penting bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha baru (enterpreneur) dalam berbagai bidang kehidupan produktif di Kabupaten Magetan.

Penyusunan LPPD ini diharapkan dapat memberikan informasi yang obyektif dan sekaligus dapat dijadikan obyek evaluasi secara lengkap tentang Kinerja Pemerintahan Daerah khususnya Kabupaten Magetan, sehingga dapat dilakukan pemetaan Langkah-langkah strategis bagi perbaikan Kabupaten Magetan di masa yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Magetan, sehingga dapat menjadi lebih baik di setiap tahunnya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karuniaNya kepada kita semua. Aamiin.

Magetan, Maret 2021
BUPATI MAGETAN

Dr.Drs. H. SUPRAWOTO, SH, M.Si

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iv

Bab I Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 1
1.1.1 Penjelasan Umum 1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah 8
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal 16
Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 18
2.1 Capaian Kinerja Makro 18
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 18
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran 38
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil 67
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 78
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 80
Bab III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan 138
1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 138
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan 138
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan 138
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah 138
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah 142
3.3 Permasalahan dan Kendala 142
3.4 Saran dan Tindak Lanjut 143
Bab IV Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 144
4.1 Urusan Pendidikan 144
4.2 Urusan Kesehatan 145
4.3 Urusan Pekerjaan Umum 154
4.4 Tugas Perumahan Rakyat 156
4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 159
4.6 Urusan Sosial 161

4.7 Program dan Kegiatan 165
Bab V Penutup 170

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Luas Kecamatan di Kabupaten Magetan	1
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Magetan	2
Tabel 1.3	Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW, RT Kabupaten Magetan	3
Tabel 1.4	Jumlah Perangkat daerah dan total pegawai Kabupaten Magetan	4
Tabel 1.5	Realisasi APBD	6
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Makro Kabupaten Magetan	18
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	19
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Kunci Hasil	67
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	51
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Magetan Tahun 2020	80
Tabel 2.6	Anggaran Program Kabupaten Magetan Tahun 2020	81
Tabel 2.7	Rekapitulasi Capaian Kinerja Kabupaten Magetan Tahun 2020	86
Tabel 2.8	Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya	88
Tabel 2.9	Capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam RPJMD	89
Tabel 2.10	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	92
Tabel 3.1	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan	139
Tabel 3.2	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan	142
Tabel 4.1	Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	145
Tabel 4.2	Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	146
Tabel 4.3	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	147
Tabel 4.4	Rekapitulasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Magetan triwulan IV Tahun 2020	148
Tabel 4.5	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Magetan Tahun 2020	150
Tabel 4.6	Realisasi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan 2020	155
Tabel 4.7	Alokasi Dana Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan	155
Tabel 4.8	Personel Pendukung pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum	156
Tabel 4.9	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Magetan	156
Tabel 4.10	Realisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Magetan Tahun 2020	157

Tabel 4.11 Alokasi Dana Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kab. Magetan Tahun 2020 158
Tabel 4.12 Jumlah personil pada Standar Pelayanan Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kab. Magetan Tahun 2020 158
Tabel 4.13 Alokasi Dana Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 160
Tabel 4.14 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2020 162
Tabel 4.15 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2020 163
Tabel 4.16 Alokasi Anggaran Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2020 164
Tabel 4.17 Dukungan Personel Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2020 164

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Magetan merupakan Kabupaten yang terletak di ujung Barat Propinsi Jawa Timur, dengan posisi berada pada $7^0$38'30" Lintang Selatan dan $111^0$20'30" Bujur Timur. Batas-batasadministrasiKabupatenMagetanadalahsebagaiberikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Ngawi
- Sebeleh Timur : Kabupaten Madiun
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Barat : KabupatenKaranganyar (Jawa Tengah)

Berdasarkan lokasinya, Kabupaten Magetan termasuk dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Madiun dan sekitarnya. Magetan merupakan Kabupaten terkecil ke-dua se-Jawa Timur, setelah Sidoarjo, dengan luas seluruh berdasarkan penghitungan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten wilayah Kabupaten Magetan untuk luas wilayah 688,847 dengan pembulatan 688,84 KM2.

a. Undang-undang pembentukan daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi JawaTimur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya danDati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

b. Data geografis wilayah

Batas-batas administrasi Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Ngawi
- Sebeleh Timur : Kabupaten Madiun
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah)

Wilayah administrasi Kabupaten Magetan terdiri dari 18 wilayah kecamatan dengan luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu:

Tabel 1.1
Luas Kecamatan di Kabupaten Magetan

No	Nama Kecamatan	Luas (KM2)
1	Poncol	51,31
2	Parang	71,64
3	Lembeyan	54,85

No	Nama Kecamatan	Luas (KM2)
4	Takeran	25,46
5	Nguntoronadi	16,72
6	Kawedanan	39,45
7	Magetan	21,41
8	Ngariboyo	39,13
9	Plaosan	66,09
10	Sidorejo	39,15
11	Panekan	64,23
12	Sukomoro	33,05
13	Bendo	42,90
14	Maospati	25,26
15	Karangrejo	15,15
16	Karas	35,29
17	Barat	22,72
18	Kartoharjo	25,03
Jumlah luas wilayah		**688.84**

- *Sumber : Kabupaten Magetan Dalam Angka Tahun 2021*

c. Jumlah penduduk

Jumlah Penduduk20 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 689.210 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0.96% dari tahun 2018. Dengan wilayah seluas 688,85 Km^2 kepadatan penduduk akhir tahun 2019 adalah 1.013 jiwa/Km^2.

Perkembangan penduduk Kabupaten Magetan tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah, Penduduk Kabupaten Magetan Tahun 2015-2020

No.	Uraian	Satuan	2015	2016		2017	2018	2019*	2020*
1.	Jumlah penduduk	Jiwa	677.703	684.053*		685.182	691.939	698.250	689.210

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2021

Jumlah penduduk di tahun 2015 mengalami penurunan karena sesuai intruksi dari Kementerian Dalam Negeri bahwa perlu adanya pembersihan setiap per semester sesuai intruksidari kementerian dalam negeri, untuk menghindari duplikat identitas, data anomali.

d. Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan (untuk kabupaten/kota)

Kabupaten Magetan terdiri dari 18 Kecamatan, 235 desa/kelurahan, 1.084 RW dan 4.710 RT sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW, RT Kabupaten Magetan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Poncol	8	44	231
2.	Parang	13	106	297
3.	Lembeyan	10	71	333
4.	Takeran	12	39	197
5.	Nguntoronadi	9	29	135
6.	Kawedanan	20	69	319
7.	Magetan	14	64	328
8.	Ngariboyo	12	43	211
9.	Plaosan	15	67	389
10.	Sidorejo	10	41	215
11.	Panekan	17	69	362
12.	Sukomoro	14	46	216
13.	Bendo	16	108	357
14.	Maospati	15	78	333
15.	Karangrejo	13	37	173
16.	Karas	11	39	203
17.	Barat	14	46	207
18.	Kartoharjo	12	52	204
	Jumlah	235	1.048	4.710

Sumber : Kabupaten Magetan Dalam Angka Tahun 2021

e. Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah

Jumlah perangkat daerah di Kabupaten Magetan ada 47, unir kerja peangkat daerah ada 56 dan jumlah total pegawai di kabupaten Magetan per 31 Desember 2020 ada 7.212 orang.

Tabel 1.4
Jumlah Perangkat daerah dan total pegawai kabupaten Magetan tahun 2020

NO	UNIT KERJA	JML
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	38
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	27
3	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	81
4	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	38
5	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	26
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	35
7	DINAS KESEHATAN	1359
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	28
9	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	21
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	70
11	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	43
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	198
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDESA	30
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	32
15	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4087
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK	29
17	DINAS PERHUBUNGAN	39
18	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	68
19	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	49
20	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	48
21	DINAS SOSIAL	24
22	DINAS TENAGA KERJA	19
23	DINAS TNMN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEB. & KETAHANAN PANGAN	95

NO	UNIT KERJA	JML
24	INSPEKTORAT	44
25	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	99
27	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	33
28	KPU	0
29	SETDAKAB. MAGETAN	150
30	KECAMATAN BARAT	34
31	KECAMATAN BENDO	20
32	KECAMATAN KARANGREJO	21
33	KECAMATAN KARAS	16
34	KECAMATAN KARTOHARJO	14
35	KECAMATAN KAWEDANAN	31
36	KECAMATAN LEMBEYAN	18
37	KECAMATAN MAGETAN	53
38	KECAMATAN MAOSPATI	29
39	KECAMATAN NGARIBOYO	19
40	KECAMATAN NGUNTORONADI	12
41	KECAMATAN PANEKAN	17
42	KECAMATAN PARANG	17
43	KECAMATAN PLAOSAN	20
44	KECAMATAN PONCOL	17
45	KECAMATAN SIDOREJO	14
46	KECAMATAN SUKOMORO	18
47	KECAMATAN TAKERAN	19
	TOTAL	7212

f. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tabel 1.5 Realisasi APBD

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**	1.769.209.251.055,40	1.801.811.274.354,25	32.602.023.298,85	101,84
1 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	205.685.936.441,40	203.464.421.559,25	(2.221.514.882,15)	98,92
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	51.267.800.000,00	54.292.389.850,40	3.024.589.850,40	105,90
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	19.091.614.496,00	23.219.722.042,00	4.128.107.546,00	121,62
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.699.006.945,40	4.699.007.350,96	405,56	100,00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	130.627.515.000,00	121.253.302.315,89	(9.374.212.684,11)	92,82
1 . 2	**DANA PERIMBANGAN**	1.199.084.830.080,00	1.201.678.801.723,00	2.593.971.643,00	100,22
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	72.078.069.767,00	83.413.551.552,00	11.335.481.785,00	115,73
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	856.858.765.000,00	848.821.655.000,00	(8.037.110.000,00)	99,06
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	270.147.995.313,00	269.443.595.171,00	(704.400.142,00)	99,74
1 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	364.438.484.534,00	396.668.051.072,00	32.229.566.538,00	108,84
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	60.452.000.000,00	55.358.700.000,00	(5.093.300.000,00)	91,57
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	78.322.115.534,00	106.839.619.072,00	28.517.503.538,00	136,41
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	218.854.666.000,00	227.660.029.000,00	8.805.363.000,00	104,02
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.809.703.000,00	6.809.703.000,00	0,00	100,00
2	**BELANJA**	2.002.644.003.251,30	1.790.371.695.588,21	(212.272.307.663,09)	89,40
2 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.211.320.048.432,33	1.098.439.605.362,00	(112.880.443.070,33)	90,68
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	781.770.809.591,00	737.239.486.918,00	(44.531.322.673,00)	94,30
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	47.929.507.500,00	36.476.907.500,00	(11.452.600.000,00)	76,11
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	5.707.500.000,00	4.800.000.000,00	(907.500.000,00)	84,10
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8.010.712.000,00	8.010.712.000,00	0,00	100,00
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	283.457.426.733,00	282.210.266.454,00	(1.247.160.279,00)	99,56
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	84.444.092.608,33	29.702.232.490,00	(54.741.860.118,33)	35,17
2 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	791.323.954.818,97	691.932.090.226,21	(99.391.864.592,76)	87,44
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.309.675.710,00	43.767.242.098,00	(3.542.433.612,00)	92,51
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	473.920.373.322,57	410.950.372.748,68	(62.970.000.573,89)	86,71

LAMPIRAN I PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2 . 3 . 3	Sebagai Modal	270.095.905.786,60	287.510.475.379,55	(15.376.430.406,87)	87,83
	SURPLUS / (DEFISIT)	(111.434.762.195,90)	11.436.674.766,64	244.874.330.961,94	(4,98)
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
3 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	343.795.368.962,90	243.872.559.095,72	77.300.111,80	100,03
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	228.795.368.962,90	228.795.368.962,90	0,00	100,00
3 . 1 . 8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.000.000.000,00	5.077.279.238,26	77.300.111,74	101,55
3 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	16.369.416.667,00	10.354.343.334,00	(5.833.333,00)	99,99
3 . 2 . 1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00
3 . 2 . 4	Pembayaran Pinjaman Daerah	369.416.667,00	354.343.334,00	(5.833.333,00)	95,92
	PEMBIAYAAN NETTO	211.494.762.195,90	233.517.874.761,72	82.023.085,82	100,04
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	244.957.554.527,76	244.957.554.527,76	0,00

MAGETAN,
BUPATI MAGETAN

SUPRAWOTO

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAGETAN TANGGAL : 30 JUNI 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2020 DESA DI KABUPATEN MAGETAN

Halaman 3

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan strategis pemerintah daerah

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Oleh karena itu, tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Sementara itu, isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya.

b. Visi dan misi kepala daerah

Visi dan misi RPJMD Kabupaten Magetan 2018—2023 merupakan penjabaran lima tahun keempat dan kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan 2005—2025. Berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Magetan sertavisi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka visi pembangunan Kabupaten Magetan dalam RPJMD 2018—2023 adalah:

"MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA"

Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Magetan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, sehingga diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Magetan saling bekerjasama dalam mewujudkan visi tersebut.

Visi pembangunan tersebut perlu diuraikan menjadi pokok-pokok visi untuk memberikan gambaran yang lebihluas, spesifik, dan jelas horizon waktunya. Penjelasan visi memuat penjabaran kriteria dan indikator-indikator keberhasilan untuk mewujudkan visi. Dalam mengembangkan penjelasanvisiharus merujuk sasaran pokok RPJPD Kabupaten Magetan periode keempat dan kelima untuk menghasilkan penjelasan visi yang selaras dengan arah kebijakan RPJPD.

Masyarakat Magetan yang ***SMART*** merupakan kepanjangan dari ***Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil*** yang mere Persentasikan karakteristi kmasyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) saat ini. Masyarakat yang memiliki kemampuan jasmani (sehat), intelektual (maju), religiusitas (agamis), sosial (ramah) dan motorik (terampil) sebagai elemen-elemen penting bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha baru (*enterpreneur*) dalam berbagai bidang kehidupan produktif di KabupatenMagetan.

Sehat merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang terbebas dari berbagai penyakit, baik penyakitjasmani, penyakit rohani, penyakit sosial, dan penyakit lingkungan. Kondisi masyarakat yang sehat memungkinkan untuk berpartisipasi secara produktif dalam kegiatan pembangunan melalui peran strategi smasing-masing elemen masyarakat.

Maju merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang memiliki tingkat intelektual/pendidikanmemadai (*educated*) dan memiliki wawasan keilmuan yang luas dan progresif sehingga mampu berkiprah secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (politik, ekonomi, sosial dan budaya). Kondisi masyarakat yang maju sangat terbuka terhadap pembaharuan dan kemajuan teknologi serta selektif.

Agamis merupakan perwujudan dari kondisi ketaatan dalam menjalankan ajaran agama yang diwujudkan dalam tata keyakinan (keimanan), peribadatan, tata hubungan keluarga dan sosialmasyarakat, sertaakhlak dan perilaku budipekerti yang luhur. Kondisi masyarakat yang agamis memiliki hubungan inter dan antar umat beragama yang toleran, saling menghargai dan menjaga serta saling berkasih sayang sehingga terwujud suasana masyarakat yang damai, aman dan tenteram.

Ramah merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang peduli terhadap sesama melalui berbagai unsur komunikasi yang sehat seperti mudah bertegur sapa, mudah akrab, saling bersilaturahmi dan saling berbagi. Kondisi masyarakat yang ramah tidak mudah terpecah belah, terprovokasi yang dapat merenggangkan hubungan kemasyarakatan serta persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.

Terampi lmerupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang memiliki penguasaan ketrampilan serta teknologi dan sekaligus memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengimplementasikan ketrampilan dan teknologi tersebutdalam berbagai kegiatan produksi. Kondisi masyarakat yang terampil mudah mengelola

dan mengolah kesempatan/peluang menjadi kegiatan usaha yang produktif, profitable dan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat ikut serta mengurangi tingka pengangguran dan kemiskinan.

Masyarakat Magetan yang semakin ***Mantab*** merupakan kepanjangan dari ***Mandiri, Lestari dan Bermartabat*** yang mere Persentasikan suasana kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Magetan sebagaimana dicita-citakan dalam RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005–2025. Periode pembangunan tahun 2018–2023 merupakan periode lima tahun terakhir RPJPD 2005–2025 sehingga dapat disebut sebagai periode pamantapan.

Mandiri dapat diartikan bahwa daerah mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan mengoptimalkan berbagai potensi sumberdaya yang dimiliki. Kemandirian dapat terwujud melalui pembangunan yang mengarah kepada kemajuan ekonomi yang bertumpu kepada potensi unggulan/andalan daerah dengan didukung oleh sumber daya manusia yang SMART.

Lestari dapat diartikan sebagai perwujudan dari kondisi kehidupan yang ditandai oleh keseimbangan antarape manfaatan, keberlanjutan, keberadaan serta kegunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan sebagai pendukung kualitas kehidupan masa sekarang maupun masa yang akan datang. Lestari dapat juga menunjukkan sinergitas pembangunan tiga pilar yaitu perspektif pembangunan sosial, perspektif pembangunan ekonomi, dan perspektif pembangunan lingkungan menjadi aras pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Bermartabat dapat diartikan sebagai perwujudan dar kondisi masyarakat yang memiliki harga diri yang terhormat, dimana masyarakat tersebut memiliki orientasi nilai moral yang tingg idengan selalu mengutamakan nilai religius dan mengedepankan nilai-nilai kemanusian dalam setiap langkah perbuatannya, sehingga mewujudkan sebagai suatu masyarakat yang beradab. Bermartabat juga dapat diartikan terbentuknya perilaku, budaya pemerintah dan masyarakat yang menjunjung tinggi religiusitas, akhlak mulia dan nilai-nilai luhur tradisi dan budaya masyarakat madani serta menjunjung tinggi supremasi hukum yang dikembangkan melalui kepemimpinan yang tulus-ikhlas, amanah, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka disusun misi yaitu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukanjalan yang akan ditempuh untuk mencapai misi.

Visi pembangunan Kabupaten Magetantahun 2018 – 2023 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah

Progam prioritas dalam mencapai visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi untuk diselenggarakan. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya menjadi tanggung jawab Kepala SKPD. Namun demikian, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung

dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Magetan berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pendanaan program disesuaikan dengam kapasitas fiskal daerah. Kapasitas fiskal diperoleh dari proyeksi APBD dikurangi belanja dan pengeluaran wajib mengikat prioritas

Program prioritas pembangunan daerah tahun 2020 sesuai dengan kebijakan umum belanja daerah, adalah :

1. Penyediaan Belanja tak terduga sebagai penyediaan anggaran siap pakai penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) pandemi COVID-19, yaitu bidang kesehatan, Jaring Pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi masyarakat.
2. Penganggaran kembali Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan biaya Umum DAK untuk meningkatkan infrastruktur daerah
3. Penyediaan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu, peningkatan pelayanan Puskesmas, serta pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan
4. Peningkatan kualitas jalan, jembatan, Penerangan Jalan Umum (PJU) dan jalan pemukiman serta peningkatan sarana pelengkap jalan
5. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
6. Penanganan lanjut usia terlantar, penanganan penyandang disabilitas dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
7. Penyediaan sarana penanganan sampah
8. Pelatihan dan pengembanagan usaha mikro
9. Peningkatan oprasionalisasi mall pelayanan publik
10. Peningkatan cadangan pangan, peningkatan sarpras pertanian dan irigasi pertanian serta pengembangan agrowisata pertanian
11. Pengembanagan agrowisata peternakan
12. Rehabilitasi pasar
13. Penyediaan hibah kepada organisasi, masyarakat dan kelompok masyarakat dalam rangka meningkatan kemampuan dan kapasitasnya.

14. Bantuan sosial peningakatan/ rehabilitasi Rumah tidak layak huni
15. Penyediaan dana cadangan pelaksanaan Pilkada tahun 2023

Program prioritas yang ditetapkan adalah dalam upaya mencapai arah kebijakan yang telah ditentukan, disesuaikan dengan kondisi perekonomian nasional dan daerah, dan penyediaan anggaran yang mengalami rasionalisasi dalam rangka penanganan COVID-19.

d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

1. Pendidikan
   a. Pengembangan pendidikan karakter untuk anak usia dini
   b. Penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi (SD DAN SMP)
   c. Peningkatan sarana dan pasarana pendidikan dasar (SD - SMP), meliputi gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, alat peraga edukatif dan lainnya.
   d. Angkutan pelajar gratis
2. Kesehatan
   a. Menekan angka stunting, gizi buruk, angka kematian ibu dan bayi
   b. Program pencegahan penyakit menular (DBD, TBC, HIV AIDS) dan tidak menular (darah tinggi, diabetes, kesehatan jiwa)
   c. Pembangunan dan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya
   d. Jaminan layanan kesehatan masyarakat (non kuota pusat)
   e. Peningkatan fasilitas layanan kesehatan puskesmas
   f. Peningkatan kualitas sarpras dan layanan rsud dr. Sayidiman
   g. Rintisan pembangunan rumah sakit tipe D
3. Bidang infratsruktur (konektivitas)
   a. Pembangunan jalan twin road masopati – sukomoro (lanjutan)
   b. Peningkatan jalan kabupaten, jalan antar kecamatan dan jembatan kabupaten.
   c. Rehabilitasi jaringan irigasi
   d. Pembangunan embung
   e. Peningkatan infrastruktur pedesaan
   f. Peningkatan fasilitas perhubungan
4. Bidang sosial dan tenaga kerja
   a. Penanganan PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial)

b. Pemberdayaan fakir miskin, melalui pembentukan kube dilanjutkan pemberian ketrampilan dan bantuan modal usaha
c. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
d. Pengembangan sistem layanan administrasi ketenagakerjaan satu pintu
e. Fasilitasi program transmigrasi

5. Bidang ketentraman, ketertiban umum dan penanggulangan bencana
   a. Pemenuhan sarpras pemadam kebakaran.
   b. Peningkatan mitigasi bencana
6. Bidang administrasi kependudukan
   a. Pelayanan administrasi kependudukan on line
   b. Pelayanan administrai kependudukan di kecamatan dan Mall Pelayanan Publik
7. Pariwisata dan kebudayaan
   a. Penataan kawasan sarangan sesuai grand desain yang baru. Penataan kawasan sarangan sesuai visi misi Bupati baru.
   b. Penyusunan city brand pariwisata.
   c. Pengembangan kawasan wisata religi temboro.
   d. Pengembangan desa wisata.
   e. Pelaksanaan event-event wisata dan budaya
8. Koperasi & UM
   a. Pembinaan koperasi (kelembagaan, produksi, dan pemasaran)
   b. Pemberdayaan usaha mikro (pelatihan dan fasilitasi permodalan)
   c. Pelatihan usaha ekonomi produktif
9. Penanaman modal
   a. Optimalisasi layanan online terintegrasi dan operasionalisasi penyelenggaraan mal pelayanan publik
   b. Insentif penanaman modal untuk investor baru. Insentif penanaman modal berupa pengurangan dan atau pembebasan pajak daerah serta pengurangan dan atau pembebasan retribusi daerah.
   c. Penyelenggaraan promosi investasi dan pemetaan potensi investasi

10. Bidang industri, perdagangan dan usaha mikro
    a. Revitalisasi pasar daerah (pasar baru, pasar wisata, pasar sayur).
    b. Pembinaan industri kecil menengah (IKM) melalui pelatihan ketrampilan, dan fasilitasi promosi produk ikm.
    c. Pelatihan usaha ekonomi produktif
11. Bidang pertanian dan pangan
    a. Pengembangan agrowisata pertanian/ perikanan untuk menopang kepariwisataan
        1) Agrowisata sayur dan bunga di depan pasar wisata plaosan dan kebun buah di srogo
        2) Agrowisata perikanan di sumberdodol
        3) Agrowisata perah susu di singolangu, wisata ternak edukasi, kelinci di tanjungsari,
    b. Peningkatan produksi untuk mendukung ketahanan pangan daerah (penyediaan bibit unggul, pupuk, pemberantasan hama dan alsintan)
    c. Peningkatan sarana irigasi pertanian, seperti jaringan irigasi tersier, jalan usaha tani
    d. Pengadaan benih tanaman pangan berkualitas, seperti padi, jagung, kedelai, kacang, kentang dan lainnya
    e. Pengembangan tanaman perkebunan dan holtikultura
    f. Pembangunan pusat promosi hasil pertanian/perkebunan (pengembangan agrowisata)
    g. Pembangunan/rehabilitasi sumur-sumur air tanah
12. Pembangunan desa
    a. Peningkatan sarpras desa (jalan, pasar, saluran irigasi, dll)
    b. Pemberdayaan bumdes dan lembaga keuangan mikro (LKM).
    c. Fasilitasi pengembangan pasar desa dan BUMDes
    d. Pengembangan kawasan ekonomi pedesaan
    e. Pengembangan pengelolaan keuangan desa berbasis IT

13. Lingkungan hidup
    a. Revitalisasi dan pemeliharaan hutan kota
    b. Pengelolaan limbah industri
    c. Pengelolaan sampah terpadu dan pembangunan TPA sanitary landfill
    d. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
    e. Peningkatan edukasi pengelolaan sampah dan pembatasan sampah plastik.
14. Bidang komunikasi dan informatika
    a. Pengembangan e-government dan penerapan sistem informasi terintegrasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah
    b. Pengembangan website desa dan kelurahan
15. Pengentasan kemiskinan
    a. Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
    b. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH)
    c. Penyediaan sambungan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.
    d. Bantuan sosial sarpras produksi pertanian bagi petani miskin
    e. Bantuan sarana perdagangan bagi warga miskin
    f. Pelatihan ketrampilan kerja bagi warga miskin
    g. Penyediaan makanan bagi lansia terlantar
    h. Pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan UMKM
    i. Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah merupakan tujuan pemerintahan daerah. Sebagai bagian dari pemerintah, Pemerintahan daerah bertanggungjawab meningkatkan pelayanan publik berdasar indikator – indikator dalam Standar Pelayanan Minimal pada urusan urusan wajib pemerintah daerah yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat. Standar Pelayanan Minimal ini berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan bernegara. Filosofi Standar Pelayanan Minimal ini adalah adanya peningkatan mutu dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah

yang diwujudkan dalam berbagai indikator - indikatornya. Guna memastikan terpenuhinya standar capaian dalam bidang layanan tertentu serta mewujudkan adanya kesamaan kualitas dan akses terhadap layanan tersebut di semua daerah otonom, maka diperlukan adanya indikator - indikator yang jelas sebagai tolak ukur pelayanan dan disertai dengan target waktu pencapaiannya sehingga pencapaiannya akan terukur secara obyektif. Indikator – indikator tersebut, dalam undang – undang pemerintahan daerah disebut sebagai Standar Pelayanan Minimal, yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal ini dimaksudkan untuk melengkapi berbagai jenis standar yang ada di sektor publik yang diharapkan akan menjadi tolak ukur bagi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Standar Pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan ,dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat kontrol masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan.

Arah kebijakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Magetan telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005 – 2020. Selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah tersebut, dilakukan melalui tahapan dan skala prioritas pembangunan yang dijadikan agenda pembangunan jangka menengah daerah secara berkesinambungan dan saling menjaga dari periode satu ke periode berikutnya, sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018–2023, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor: 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2018-2023, merupakan RPJMD Kedua dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Magetan yang ditujukan untuk lebih memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai sebelumnya.

Arah kebijakan tahun 2020 diprioritaskan pada penguatan sektor infrastruktur daerah dan pelayanan publik untuk menjamin standarisasi mutu pelayanan serta peningkatan tingkat kepuasan masyarakat melalui penyiapan sistem inovasi daerah yang berbasis pada karakteristik dan keunggulan daerah. Indikasi capaian dalam arah kebijakan ini antara lain adalah diterapkannya standar pelayanan publik seperti SPM, MDGs, maupun standar lain yang diadopsi seperti ISO, dll, merencanakan sistem inovasi daerah sebagai persiapan dalam mengembangkan kluster-kluster ekonomi, serta menyusun *blue print* potensi wisata.

BAB II
CAPAIAN KINERJA

2.1 Capaian Kinerja Makro

Target kinerja tahunan ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Target Kinerja RPJMD Tahun 2020 yang sudah disesuaikan dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Target kinerja Tahun 2020 dengan demikian adalah komitmen kinerja Pemerintah Daerah yang disusun dengan sudah mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah daerah pada tahun tersebut yang diuraikan di dalam program dan kegiatan tahun bersangkutan. Maka, target RPJMD Tahun 2020 diturunkan ke dalam program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan 2020 dan setelah ditetapkan melalui APBD, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Magetan pada awal Tahun Anggaran.

Rekapitulasi capaian kinerja adalah realisasi dari target kinerja yang ditetapkan untuk masing-masing sasaran strategis yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2020. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Makro Kabupaten Magetan

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,49	73,92	0,58
2	Angka Kemiskinan	9,61	10,35	7,7
3	Angka Pengangguran	2,98	3,74	25,5
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,04	1,64	-67,46
5	Pendapatan Per kapita	29,98	27,98	-6,67
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	-	-	Data terakhir tahun 2017

Sumber : *Sumber : BPS (Kabupaten Magetan Dalam Angka Tahun 2020)*

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (output)

Pengukuran Kinerja dibuat sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Laporan kinerja membandingkan antara Target Kinerja yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Realisasi Kinerja tahun yang sama. Perjanjian Kinerja merupakan komitmen pemerintah daerah yang diturunkan dari target dan sasaran indikator kinerja sasaran srategis yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan demi mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan / perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 merupakan analisis terhadap komitmen Bupati Kabupaten Magetan guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Keluaran (output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Pendidikan PAUD			
1	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	383 unit	DIKPORA	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	16190 orang	DIKPORA	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	16190 orang	DIKPORA	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	866 orang	DIKPORA	
		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	1317 orang	DIKPORA	
		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	666 orang	DIKPORA	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	379 orang	DIKPORA	
		Pendidikan SD			
		Jumlah SD Negeri Terakreditasi	436 unit	DIKPORA	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	53753 orang	DIKPORA	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	53753 orang	DIKPORA	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	4176 orang	DIKPORA	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	4729 orang	DIKPORA	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1044 orang	DIKPORA	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	88 orang	DIKPORA	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2696 orang	DIKPORA	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	501 orang	DIKPORA	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	12 orang	DIKPORA	
		Pendidikan SMP			
		Jumlah SMP Negeri Terakreditasi	50 unit	DIKPORA	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	30762 orang	DIKPORA	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	30762 orang	DIKPORA	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	3348 orang	DIKPORA	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2425 orang	DIKPORA	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	558 orang	DIKPORA	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	479 orang	DIKPORA	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1419 orang	DIKPORA	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	83 orang	DIKPORA	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazahSMA/sederajat	168 orang	DIKPORA	
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	4 orang	DIKPORA	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	556 orang	DIKPORA	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	556 orang	DIKPORA	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	33 orang	DIKPORA	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	117 orang	DIKPORA	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	109 orang	DIKPORA	
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat	0 orang	DIKPORA	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	15 orang	DIKPORA	
2	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk			
		Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	2	DINKES	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi			
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2	DINKES	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (pelayanan kesehatan ibu hamil)		DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		DINKES	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (pelayanan persalinan)		DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar		DINKES	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (pelayanan kesehatan bayi baru lahir)		DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar		DINKES	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang		DINKES	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		tersedia (pelayanan kesehatan balita sesuai standar)			
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		DINKES	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar)		DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		DINKES	
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (pelayanan orang usia 15-29 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar)		DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (pelayanan orang usia 15-29 tahun)		DINKES	
		Pelayanan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai		DINKES	
		Pelayanan penderita hipertensi			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai		DINKES	
		Pelayanan penderita DM			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		DINKES	
		Pelayanan ODGJ berat			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		DINKES	
		Pelayanan orang terduga TBC			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		DINKES	
		Pelayanan orang dengan resiko terinfeksi HIV			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		DINKES	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir			
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	Dinas PUPR	
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	-	Dinas PUPR	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	-	Dinas PUPR	
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	-	Dinas PUPR	
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR	
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	-	Dinas PUPR	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai			
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	Dinas PUPR	
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	-	Dinas PUPR	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	Dinas PUPR	
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	-	Dinas PUPR	
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya	Ada	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		air kewenangan kabupaten/kota			
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	-	Dinas PUPR	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi			
		Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	$\frac{57988,58}{60050} \times 100 = 96,57\%$	Dinas PUPR	
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{40569,19}{42319} \times 100 = 95,86\%$	Dinas PUPR	
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	-	Dinas PUPR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM			
		Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	Ada	Dinas PUPR	
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Tidak	Dinas PUPR	
		Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	Tidak	Dinas PUPR	
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	-	Dinas PUPR	
		Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	-	Dinas PUPR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic			
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan		Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dasar menggunakan SPALD S			
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	680 SR	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	680 SR	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	-	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	-	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	-	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{216971}{235197} \times 100 = 92{,}25\%$	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{680}{235197} \times 100 = 0{,}29\%$	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{1}{100} \times 100 = 0\%$	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Kinerja penyediaan sambungana rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{680}{235197} \times 100 = 0{,}29\%$	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$	Dinas PUPR	
		Rasio kepatuhan IMB kab/kota			
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{56}{184327} \times 100 = 0{,}03\%$	Dinas PUPR	
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalatahun eksisting	358	Dinas PUPR	
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung (ada/tidak)	Ada	Dinas PUPR	
		Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/tidak)	Tidak	Dinas PUPR	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Tidak	Dinas PUPR	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah	Tidak	Dinas PUPR	
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	1400	Dinas PUPR	
		Jumlah bangunan gedung negara milik peerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat	1400	Dinas PUPR	
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	630,25 km	Dinas PUPR	
		Panjang jalan yang dibangun	0 km	Dinas PUPR	
		Panjang jembatan yang dibangun	0 unit	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	15,32 km	Dinas PUPR	
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	7 unit	Dinas PUPR	
		Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	88,21 km	Dinas PUPR	
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	1 unit	Dinas PUPR	
		Panjang jalan yang dipelihara	17 km	Dinas PUPR	
		Panjang jembatan yang dipelihara	179 unit	Dinas PUPR	
		Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi			
		Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	1	Dinas PUPR	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	447	Dinas PUPR	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	58	Dinas PUPR	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/kota	Ada	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD	Ada	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk	Ada	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya			
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	Ada	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis	ada	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota	Ada	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Data di DPMPTSP	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Dinas PUPR	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	267	Dinas PUPR	
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP diwilayah kabupaten/kota	Data di DPMPTSP	Dinas PUPR	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	189	Dinas PUPR	
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	267	Dinas PUPR	
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan	95	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui			
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	95	Dinas PUPR	
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUPR	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	95	Dinas PUPR	
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota			
		Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		Dinas PKP	
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam		Dinas PKP	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		Dinas PKP	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		Dinas PKP	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		Dinas PKP	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi		Dinas PKP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		sesuai dengan rencana aksi			
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		Dinas PKP	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		Dinas PKP	
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		Dinas PKP	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota			
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Dinas PKP	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Dinas PKP	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Dinas PKP	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Dinas PKP	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Dinas PKP	
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		Dinas PKP	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	418,69	Dinas PKP	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		Dinas PKP	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0,001213	Dinas PKP	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)			
		Jumlah rumah di kab/kota	216140	Dinas PKP	
		Jumlah unit PK RTLH		Dinas PKP	
		Jumlah rumah tidak layak huni	6855	Dinas PKP	
		Jumlah rumah yang tidak dihuni		Dinas PKP	
		Rasio rumah dan KK		Dinas PKP	
		Jumlah rumah pembangunan baru	35	Dinas PKP	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	19	Dinas PKP	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	1122	Dinas PKP	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	1122	Dinas PKP	
		Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)	1122	Dinas PKP	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		Dinas PKP	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		Dinas PKP	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	6	Dinas PKP	
		Jumlah pengembang yang terregistrasi	19	Dinas PKP	
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	6	Dinas PKP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
5	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			
		Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	462	SATPOL PP	
		Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan	390	SATPOL PP	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	7	SATPOL PP	
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	5	SATPOL PP	
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	ada	SATPOL PP	
		Tersedianya sarana prasarana minimal	ada	SATPOL PP	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$	SATPOL PP	
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{860}{10497} \times 100 = 8{,}19\%$	SATPOL PP	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$	SATPOL PP	
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{2}{2} \times 100 = 100\%$	SATPOL PP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{860}{10497} \times 100 = 8{,}19\%$	SATPOL PP	
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{579}{10497} \times 100 = 5{,}51\%$	SATPOL PP	
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	$\frac{255}{10497} \times 100 = 2{,}42\%$	SATPOL PP	
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{6089}{10497} \times 100 = 58{,}01\%$	SATPOL PP	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$	SATPOL PP	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{2}{2} \times 100 = 100\%$	SATPOL PP	
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{55}{55} \times 100 = 100\%$	SATPOL PP	
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$\frac{255}{255} \times 100 = 100\%$	SATPOL PP	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	belum ada	SATPOL PP	
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar,	ada	SATPOL PP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan			
		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	ada	SATPOL PP	
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	belum ada	SATPOL PP	
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		SATPOL PP	
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	8	SATPOL PP	
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakarandan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	390	SATPOL PP	
		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	2	SATPOL PP	
6	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)			
		Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	1048	DINSOS	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjur usia	6443	DINSOS	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM			
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Tidak ada	DINSOS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	1881	DINSOS	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	4	DINSOS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	1379	DINSOS	
		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	DINSOS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	264	DINSOS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	115	DINSOS	
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	2	DINSOS	
		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	-	DINSOS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	338	DINSOS	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	1	DINSOS	
		Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	32	DINSOS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	1881	DINSOS	
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	574	DINSOS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	7	DINSOS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	208	DINSOS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	15	DINSOS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	15	DINSOS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut	100	DINSOS	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		usia terlantar dan gepeng yang dirujuk			
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota			
		Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	7218	DINSOS	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	33	DINSOS	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	-	DINSOS	
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	7218	DINSOS	
		Jumlah korban bencana yang meneriman pelayanan dukungan psikososial	7218	DINSOS	
		Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	46	DINSOS	
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja			
		Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Sesuai	DISNAKER	
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	$\frac{15,91}{62,58} \times 100 = 25,4\%$	DISNAKER	
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	0	DISNAKER	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi			
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	$\frac{4}{9} \times 100 = 4,44\%$	DISNAKER	
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{32}{64} \times 100 = 50\%$	DISNAKER	
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{18}{196} \times 100 = 0,09\%$	DISNAKER	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{5}{32} \times 100 = 15{,}6\%$	DISNAKER	
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{32}{32} \times 100 = 100\%$	DISNAKER	
		Jumlah penganggur yang dilatih	136	DISNAKER	
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{196}{196} \times 100 = 100\%$	DISNAKER	
		Persentase penyerapan lulusan	$\frac{59}{196} \times 100 = 30{,}1\%$	DISNAKER	
		Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{86}{196} \times 100 = 43{,}87\%$	DISNAKER	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{305}{305} \times 100 = 100\%$	DISNAKER	
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga KerjaIndonesia (CTKI)	2	DISNAKER	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja			
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{0}{905} \times 100 = 0\%$	DISNAKER	
		Data tingkat produktivitas total		DISNAKER	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{6}{40} \times 100 = 15\%$	DISNAKER	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{4}{7} \times 100 = 57{,}1\%$	DISNAKER	
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	21 PUK	DISNAKER	
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	$\frac{6}{40} \times 100 = 100\%$	DISNAKER	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{772}{905} \times 100 = 85{,}3\%$	DISNAKER	
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{5}{905} \times 100 = 0{,}05\%$	DISNAKER	
		Jumlah mogok kerja	1	DISNAKER	
		Jumlah penutupan perusahaan	1	DISNAKER	
		Jumlah perselisihan kepentingan	0	DISNAKER	
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	DISNAKER	
		Jumlah perselisihan PHK	4	DISNAKER	
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	8	DISNAKER	
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	1	DISNAKER	
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1	DISNAKER	
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{5}{6} \times 100 = 83{,}3\%$	DISNAKER	
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	1315	DISNAKER	
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	1940	DISNAKER	
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	35	DISNAKER	
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	DISNAKER	
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	4	DISNAKER	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	DISNAKER	
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	0	DISNAKER	
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	1214	DISNAKER	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{305}{305} \times 100 = 100\%$	DISNAKER	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	305	DISNAKER	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\frac{22}{22} \times 100 = 100\%$	DISNAKER	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\frac{305}{305} \times 100 = 100\%$	DISNAKER	
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{320}{320} \times 100 = 100\%$	DISNAKER	
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$	DISNAKER	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	24 OPD	DPPKBPPPA	
		Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	24 OPD	DPPKBPPPA	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten			
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1	DPPKBPPPA	
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1	DPPKBPPPA	
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{62}{1281} \times 100 = 4{,}84\%$	DPPKBPPPA	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1	DPPKBPPPA	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1	DPPKBPPPA	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)			
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	5	DPPKBPPPA	
		Jumlah kader perempuantingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	0	DPPKBPPPA	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	1	DPPKBPPPA	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1	DPPKBPPPA	
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	DPPKBPPPA	
		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	0	DPPKBPPPA	
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{76}{76} \times 100 = 100\%$	DPPKBPPPA	
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)			
		1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	ada	Dinas TPHPKP	
		2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	ada	Dinas TPHPKP	
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	tidak	Dinas TPHPKP	
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	ada	Dinas TPHPKP	
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	ada	Dinas TPHPKP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		6. Tertanganinya kerawanan pangan	ada	Dinas TPHPKP	
		7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	tidak	Dinas TPHPKP	
		8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	ada	Dinas TPHPKP	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan			
		SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota		Dinas PKP	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek		Dinas PKP	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee		Dinas PKP	
		Dokumen Izin membuka tanah		Dinas PKP	
		Dokumen Perencanaan Penggunaan TanahKabupaten/Kota		Dinas PKP	
11	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap:			
		a. Indeks kualitas air (IKA)	55.28	Dinas LH	
		b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	85.10	Dinas LH	
		c. Indeks tutupan hutan (ITH)	67.61	Dinas LH	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota			
		Tersedianya informasi terkait rasio angkutan	ada	Dinas LH	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah			
		Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	ada	Dinas LH	
		Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing	ada (informasi terkait jumlah TPS)	Dinas LH	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota			
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{234}{234} \times 100 = 100\%$	Dinas LH	
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	-	Dinas LH	belum ada PPLHD
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	-	Dinas LH	Tidak ada
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	-	Dinas LH	Tidak ada
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	$\frac{82}{82} \times 100 = 100\%$	Dinas LH	
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	$\frac{15}{15} \times 100 = 100\%$	Dinas LH	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik			
		1. Penerbitan akta perkawinan	$\frac{353}{353} \times 100 = 100\%$	DISDUKCAPIL	
		2. Penerbitan akta perceraian	$\frac{78}{78} \times 100 = 100\%$	DISDUKCAPIL	
		3. Penerbitan akta kematian	$\frac{31291}{31291} \times 100 = 100\%$	DISDUKCAPIL	
		4. Penyajian data kependudukan	$\frac{2}{2} \times 100 = 100\%$	DISDUKCAPIL	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal			
		1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	$\frac{0}{207} \times 100 = 0\%$	DPMD	
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0 – 0 = 0	DPMD	
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas	$\frac{1242}{1242} \times 100 = 100\%$	DPMD	
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	$\frac{0}{1242} \times 100 = 0\%$	DPMD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)			
		1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan	Tidak	DPPKBPPPA	
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	24,64	DPPKBPPPA	
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	17,99	DPPKBPPPA	
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{220502}{220502} \times 100 = 100\%$	DPPKBPPPA	
		5. Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	9	DPPKBPPPA	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)			
		Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{30}{37} \times 100 = 81{,}08\%$	DPPKBPPPA	
		Persentase Peserta KBAktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{27084}{114178} \times 100 = 23{,}72\%$	DPPKBPPPA	
		Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	24	DPPKBPPPA	
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{3628}{5295} \times 100 = 68{,}52\%$	DPPKBPPPA	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	9	DPPKBPPPA	
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{20234}{20234} \times 100 = 100\%$	DPPKBPPPA	
15	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota			
		1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	$\frac{5}{2} \times 100 = 250\%$	DISHUB	
		2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	$\frac{4577}{6138} \times 100 = 74{,}57\%$	DISHUB	
		3. Penetapan tarif fangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Nihil	DISHUB	
		4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	$\frac{2052}{1950} \times 100 = 105\%$	DISHUB	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{55}{55} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	$\frac{55}{55} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan	ya, berupa email kabupaten	DISKOMINFO	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		memanfaatkan jaringan intra pemerintah			
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	$\frac{39}{39} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{55}{55} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{39}{39} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{2}{39} \times 100 = 5{,}12\%$	DISKOMINFO	
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{39}{56} \times 100 = 69{,}64\%$	DISKOMINFO	
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{39}{39} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{55}{55} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan		DISKOMINFO	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		data di pusat data pemerintah	$\frac{55}{55} \times 100 = 100\%$		
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{55}{55} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{4}{39} \times 100 = 10{,}25\%$	DISKOMINFO	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{55}{55} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{3}{3} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		Tersedianya peraturandaerah atau peraturan kepala daerahterkait implementasi e-government	ada	DISKOMINFO	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota			
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/ kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	$\frac{3}{13} \times 100 = 23{,}07\%$	DISKOMINFO	
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{997}{997} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		Persentase diseminasi dan layananinformasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{9}{9} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas			
		Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{7}{3} \times 100 = 233{,}3\%$	DINKOPUM	
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{12}{18} \times 100 = 66{,}6\%$	DINKOPUM	
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalamdaerah kabupaten/kota	$\frac{65}{835} \times 100 = 7{,}78\%$	DINKOPUM	
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{75}{835} \times 100 = 8{,}98\%$	DINKOPUM	
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{370}{835} \times 100 = 7{,}78\%$	DINKOPUM	
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	$\frac{428}{835} \times 100 = 51{,}25\%$	DINKOPUM	
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{3}{835} \times 100 = 0{,}35\%$	DINKOPUM	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Tidak perlu diisi	DINKOPUM	
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{313}{835} \times 100 = 37{,}4\%$	DINKOPUM	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{835} \times 100 = 0\%$	DINKOPUM	
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{835} \times 100 = 0\%$	DINKOPUM	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{25}{835} \times 100 = 2{,}99\%$	DINKOPUM	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{835} \times 100 = 0\%$	DINKOPUM	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha			
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	77	DINKOPUM	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{155371}{155371} \times 100 = 100\%$	DINKOPUM	
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$\frac{85}{16903} \times 100 = 0{,}5\%$	DINKOPUM	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi	$\frac{125}{16903} \times 100 = 0{,}73\%$	DINKOPUM	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		standarisasi dan sertifikasi produk usaha			
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$\frac{85}{16903} \times 100 = 0{,}5\%$	DINKOPUM	
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{130}{16903} \times 100 = 0{,}76\%$	DINKOPUM	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	$\frac{200}{16903} \times 100 = 1{,}18\%$	DINKOPUM	
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota			
		PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1	DPMPTSP	
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	1	DPMPTSP	
		Laporan evaluasi pelaksanaanpemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	DPMPTSP	
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1	DPMPTSP	
		Kegiatan pameran penanaman modal	0	DPMPTSP	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	2	DPMPTSP	
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	25	DPMPTSP	
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	8309	DPMPTSP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Laporan realisasi penanaman modal	709540654108	DPMPTSP	
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	9	DPMPTSP	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	19	DPMPTSP	
		Tersedianya data daninformasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	8	DPMPTSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri			
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	35	DIKPORA	
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan Kewirausahaan	0	DIKPORA	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan			
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	35	DIKPORA	
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	245	DIKPORA	
		Peningkatan prestasi olahraga			
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	42	DIKPORA	
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	13	DIKPORA	
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Tersedianya buku profil daerah	ada	DISKOMINFO	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		DISKOMINFO	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1	DISKOMINFO	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	-	DISKOMINFO	
		Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	-	DISKOMINFO	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	-	DISKOMINFO	
		Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	-	DISKOMINFO	
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah			
		1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{55}{55} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		2. Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	$\frac{2}{56} \times 100 = 3{,}57\%$	DISKOMINFO	
		3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	$\frac{55}{55} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan PolaHubungan	$\frac{55}{55} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan			
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya			
		1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	20 obyek pemajuan kebudayaan	DISPARBUD	
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yangdikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	15 obyek pemajuan kebudayaan	DISPARBUD	
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	6 obyek	DISPARBUD	
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatankompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	245 SDM, 196 Lembaga	DISPARBUD	
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian,penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	belum ada Cagar Budaya yang ditetapkan	DISPARBUD	
		6. Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	5 Cagar Budaya	DISPARBUD	
		7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	DISPARBUD	
		8. Pengembangan cagar budaya provinsi	2 Cagar Budaya	DISPARBUD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		(penelitian, revitalisasi, adaptasi)			
		9. Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	7 Cagar Budaya	DISPARBUD	
		10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	DISPARBUD	
		11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	0	DISPARBUD	
		12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	Tidak perlu diisi	DISPARBUD	
		13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	DISPARBUD	
		14. Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	0	DISPARBUD	
		15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	0	DISPARBUD	
		16. Pemetaan sdm cagar budayadan permuseuman	0	DISPARBUD	
		17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	0	DISPARBUD	
		18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	DISPARBUD	
		19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	DISPARBUD	
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{81401}{687057} \times 100 = 11{,}8\%$	ARPUS	
		Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{15585}{687057} \times 100 = 2{,}3\%$	ARPUS	
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$\frac{854}{687057} \times 100 = 0{,}12\%$	ARPUS	
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{105}{533} \times 100 = 19{,}7\%$	ARPUS	
		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		ARPUS	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya		ARPUS	
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		ARPUS	
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		ARPUS	
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional			
		Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{113}{290} \times 100 = 38{,}9\%$	ARPUS	
		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{113}{290} \times 100 = 38{,}9\%$	ARPUS	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	$\frac{91}{91} \times 100 = 100\%$	ARPUS	
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$\frac{38}{291} \times 100 = 13{,}06\%$	ARPUS	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara			
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		ARPUS	
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		ARPUS	
		Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/ kota yang sesuai NSPK di provinsi		ARPUS	
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK		ARPUS	
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		ARPUS	
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK		ARPUS	
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)			
		1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	-	DISNAKKAN	
		2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$	DISNAKKAN	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan		DISNAKKAN	
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	3511	DISNAKKAN	
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	19085825	DISNAKKAN	
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan			
		1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi		DISPARBUD	
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Panjang jalan kabupaten 684,92 km, jalan negara 15,61 km,jalan provinsi 39,06 km, jalan kabupaten 630,25 km, Jumlah kendaraan : Bus 386 unit, mobil 27.090 unit, truk 10.529 unit, motor 268.355 unit, pelanggan lisrik 202.486, listrik yang didistribusikan260 MWh,daya terpasang 207.476.270 KW, pelanggan PDAM lawu Tirta 70.131, produksi air bersih PDAM Magetan 14.184.537 m2, Nilai air yang terdistribusi Rp.44.887.930.000	DISPARBUD	
		3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Hotel 75, Restoran 85, Cafe 5, Karaoke 5, Becak Air 12, Perahu 53, Kolam renang 4	DISPARBUD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0	DISPARBUD	
		5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	2 Event	DISPARBUD	
		6. Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi		DISPARBUD	
		7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	53 Unit	DISPARBUD	
		8. Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	$\frac{42}{1558} \times 100 = 2{,}7\%$	DISPARBUD	
		9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{80}{80} \times 100 = 100\%$	DISPARBUD	
		10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	28 Desa Wisata	DISPARBUD	
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun			
		Sarana pertanian yang diberikan	131 unit	Dinas TPHPKP	
		Prasarana pertanian yang digunakan	131 unit	Dinas TPHPKP	
		Penerbitan izin usaha pertanian	0	Dinas TPHPKP	
		Persentase prasarana yang digunakan	$\frac{131}{131} \times 100 = 100\%$	Dinas TPHPKP	
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian dikab/kota	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$	Dinas TPHPKP	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular			
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	$\frac{688{,}84}{688{,}84} \times 100 = 100\%$	Dinas TPHPKP	
28	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	$\frac{4}{50} \times 100 = 8\%$	DISPERINDAG	
		2. Persentase penerbitan TDG	$\frac{3}{4} \times 100 = 75\%$	DISPERINDAG	
		3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$	DISPERINDAG	
		4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :			
		a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	$\frac{3}{4} \times 100 = 75\%$	DISPERINDAG	
		b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri		DISPERINDAG	
		c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri		DISPERINDAG	
		5. Persentase pemeriksaanfasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota		DISPERINDAG	
		6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu		DISPERINDAG	
		7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		DISPERINDAG	
		8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu		DISPERINDAG	
		Persentase Kinerja realisasi Pupuk			
		1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan		DISPERINDAG	
		Persentase alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku			
		1. Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{7414}{57255} \times 100 = 12{,}9\%$	DISPERINDAG	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku		DISPERINDAG	
29	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota			
		Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/ kota	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$	DISPERINDAG	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP			
		Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA		DISPERINDAG	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$	DISPERINDAG	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$	DISPERINDAG	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini			
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/ kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	$\frac{16035}{50} \times 100 = 32070\%$	DISPERINDAG	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
31	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0	DISNAKER	
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	DISNAKER	
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	DISNAKER	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome)

Indikator Kinerja Kunci Hasil merupakan Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan / perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 merupakan analisis terhadap komitmen Bupati Kabupaten Magetan guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{16190}{17538} \times 100 = 92{,}3\%$	DIKPORA	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{50468}{50791} \times 100 = 99{,}3\%$	DIKPORA	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{26106}{27798} \times 100 = 93{,}9\%$	DIKPORA	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{343}{105142} \times 100 = 0{,}32\%$	DIKPORA	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	$\frac{379}{701150} \times 100 = 0{,}05\%$	DINKES	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{2}{2} \times 100 = 100\%$	DINKES	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{8064}{8500} \times 100 = 94{,}87\%$	DINKES	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{8133}{8133} \times 100 = 100\%$	DINKES	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{8004}{7727} \times 100 = 103{,}58\%$	DINKES	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{32219}{30308} \times 100 = 106{,}3\%$	DINKES	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{84298}{88808} \times 100 = 94{,}9\%$	DINKES	
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{278199}{382226} \times 100 = 72{,}8\%$	DINKES	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{97902}{127768} \times 100 = 76{,}6\%$	DINKES	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{114152}{205528} \times 100 = 55{,}5\%$	DINKES	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{1528}{1195} \times 100 = 127{,}8\%$	DINKES	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{602}{1143} \times 100 = 52{,}7\%$	DINKES	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{12657}{13193} \times 100 = 95{,}9\%$	DINKES	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV		DINKES	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	-	Dinas PUPR	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	-	Dinas PUPR	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{10994,80}{27487} \times 100 = 40\%$	Dinas PUPR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	$\frac{216234}{235197} \times 100 = 91,9\%$	Dinas PUPR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{216971}{235197} \times 100 = 92,2\%$	Dinas PUPR	
		Rasio kepatuhan IMB kab/kota	$\frac{79866}{79866} \times 100 = 100\%$	Dinas PUPR	
		Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	$\frac{0}{630,25} \times 100 = 0\%$	Dinas PUPR	
		Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{447}{520} \times 100 = 85,9\%$	Dinas PUPR	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{0}{260} \times 100 = 0\%$	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		Dinas PKP	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota		Dinas PKP	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	$\frac{0{,}001213}{0{,}041869} \times 100 = 2{,}9\%$	Dinas PKP	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{6855}{216140} \times 100 = 3{,}17\%$	Dinas PKP	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{1122}{216140} \times 100 = 0{,}52\%$	Dinas PKP	
6	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{462}{477} \times 100 = 96{,}8\%$	SATPOL PP	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{7}{16} \times 100 = 43{,}75\%$	SATPOL PP	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	10497	SATPOL PP	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	860	SATPOL PP	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	255	SATPOL PP	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan	$\frac{41}{53} \times 100 = 77{,}3\%$	SATPOL PP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		evakuasi korban kebakaran			
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	12 menit	SATPOL PP	
6	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	$\frac{1881}{6443} \times 100 = 29{,}19\%$	DINSOS	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	$\frac{7218}{7218} \times 100 = 100\%$	DINSOS	
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{3}{4} \times 100 = 75\%$	DISNAKER	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{196}{355762} \times 100 = 0{,}05\%$	DISNAKER	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{17625123{,}86}{355762} \times 100 = 4954{,}1\%$	DISNAKER	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{793}{905} \times 100 = 87{,}6\%$	DISNAKER	
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	$\frac{1214}{1940} \times 100 = 62{,}5\%$	DISNAKER	
8	Pemberdayaan Perempuan dan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		DPPKBPPPA	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Perlindungan Anak		$\frac{549.550.926.669}{791.323.954.818} \times 100 = 69{,}45\%$		
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	$\frac{62}{158344} \times 100 = 0{,}04\%$	DPPKBPPPA	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	$\frac{76}{350506} \times 100 = 0{,}02\%$	DPPKBPPPA	
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{213057}{45855} \times 100 = 464{,}6\%$	Dinas TPHPKP	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		Dinas PKP	
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		Dinas PKP	
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal		Dinas PKP	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		Dinas PKP	
		Tersedianya tanah untuk masyarakat		Dinas PKP	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		Dinas PKP	
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	82.3%	Dinas LH	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	$\frac{11752040}{152916750} \times 100 = 7{,}69\%$	Dinas LH	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	$\frac{5}{17} \times 100 = 29{,}4\%$	Dinas LH	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	$\frac{524988}{540201} \times 100 = 97{,}18\%$	DISDUKCAPIL	
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{100980}{158344} \times 100 = 63{,}7\%$	DISDUKCAPIL	
		Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{160076}{167543} \times 100 = 95{,}54\%$	DISDUKCAPIL	
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{7}{10} \times 100 = 70\%$	DISDUKCAPIL	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$	Dinas PMD	
		Persentase peningkatan status desa mandiri	$\frac{0}{104} \times 100 = 0\%$	Dinas PMD	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,1	DPPKBPPPA	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{83329}{114178} \times 100 = 72{,}98\%$	DPPKBPPPA	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{12463}{114178} \times 100 = 10{,}92\%$	DPPKBPPPA	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
15	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	380	DISHUB	
		V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota		DISHUB	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{55}{55} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{39}{39} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{446094}{627413} \times 100 = 71{,}1\%$	DISKOMINFO	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas		DINKOPUM	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha		DINKOPUM	
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota	$\frac{-453460}{1163000} \times 100 = -38{,}9\%$	DPMPTSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{736}{125527} \times 100 = 0{,}58\%$	DIKPORA	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{102461}{125527} \times 100 = 81{,}6\%$	DIKPORA	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Peningkatan prestasi olahraga	10	DIKPORA	
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{27}{55} \times 100 = 49{,}1\%$	DISKOMINFO	
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	-	DISKOMINFO	
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{55}{55} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{163}{163} \times 100 = 100\%$	DISPARBUD	
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		ARPUS	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		ARPUS	
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	1,81	ARPUS	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan,	0,167	ARPUS	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	1701,51	DISNAKKAN	
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{-259687}{929078} \times 100 = -27{,}9\%$	DISPARBUD	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang dating ke kabupaten/kota	$\frac{-259687}{929078} \times 100 = -27{,}9\%$	DISPARBUD	
		Tingkat hunian akomodasi	$\frac{767}{2193} \times 100 = 34{,}9\%$	DISPARBUD	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	4,79	DISPARBUD	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rp. 10.874.247.000,-	DISPARBUD	
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{2937840{,}3}{46789{,}88} \times 100 = 6278{,}8\%$	Dinas TPHPKP	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{4311}{393} \times 100 = 1096{,}9\%$	Dinas TPHPKP	
28	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan		DISPERINDAG	
		Persentase Kinerja realisasi Pupuk		DISPERINDAG	
		Persentase alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)		DISPERINDAG	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		bertanda tera sah yang berlaku			
29	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota		DISPERINDAG	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		DISPERINDAG	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		DISPERINDAG	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		DISPERINDAG	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota		DISPERINDAG	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		DISPERINDAG	

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Lainnya diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	$\frac{141229691071}{1502278305029,21} \times 100 = 9,4\%$	BPPKAD	
		Rasio PAD	$\frac{203464421559,25}{1758579238411,25} \times 100 = 11,5\%$	BPPKAD	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	INSPEKTORAT	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Menuju level 3	INSPEKTORAT	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum expenditures)	$\frac{154900477954,46}{1502278305029,21} \times 100 = 10,3\%$	BPPKAD	
		Opini Laporan Keuangan	Opini Tahun 2019 = WTP	INSPEKTORAT	
2	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama		PBJ SETDA	
		Persentase jumlah pengadaan yangdilakukan dengan metode kompetitif		PBJ SETDA	
		Rasio nilai belanja yangdilakukan melalui pengadaan		PBJ SETDA	
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{5999}{1213} \times 100 = 494,5\%$	BKD	

		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{174}{2190} \times 100 = 7{,}9\%$	BKD	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{124}{174} \times 100 = 71{,}2\%$	BKD	
4	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\frac{1502278305029{,}21}{1713303452413{,}3} \times 100 = -12{,}3\%$	BPPKAD	
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\frac{203464421559{,}25}{205685936441{,}4} \times 100 = -1{,}08\%$	BPPKAD	
		Manajemen Aset :		BPPKAD	
		Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya	BPPKAD	
		Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya	BPPKAD	
		Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	Ya	BPPKAD	
		Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Tidak	BPPKAD	
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	$\frac{244957554527{,}76}{1680820914413{,}78} \times 100 = 14{,}5\%$	BPPKAD	
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan			
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah			

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan bagian dari manajemen kinerja dengan menggunakan kinerja sebagai alat akuntabilitas dalam konteks yang lebih sistematis. Perencanaan Kinerja dilakukan setiap tahun melalui Rencana Kinerja Tahunan untuk mencapai target kinerja sasaran yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja setiap tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya Tahun 2020. Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2020 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020 dan ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020

a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Target kinerja tahunan ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Target Kinerja RPJMD Tahun 2020 yang sudah disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Target kinerja Tahun 2020 dengan demikian adalah komitmen kinerja Pemerintah Daerah yang disusun dengan sudah mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah daerah pada tahun tersebut yang diuraikan di dalam program dan kegiatan tahun bersangkutan. Maka, target RPJMD Tahun 2020 diturunkan ke dalam program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan 2020 dan setelah ditetapkan melalui APBD, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Magetan pada awal tahun anggaran. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2020 adalah:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan
Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Indeks Kesehatan	80,46
2	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	2. Indeks Pendidikan	72,75
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	3. Angka Kemiskinan	9,91%
		4. Tingkat Pengangguran Terbuka	2,90%
4	Terwujudnya Masyarakat Yang Rukun, Tertib, dan Agamis	5. Indeks Toleransi	63,2
5	Meningkatnya Kemampuan/Keberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	6. Nilai Omset Usaha Koperasi dan Usaha Mikro (Juta Rp.)	740.500
6	Meningkatnya Kegiatan Investasi	7. Nilai Investasi (Milyar)	250

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		8. Jumlah Investor	450
7	Meningkatnya Kegiatan Industri Pariwisata	9. Nilai PDRB Sektor Pariswisata (Juta Rp.)	667.126,54
8	Meningkatnya kegiatan Sektor Perdagangan	10. Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Juta Rp.)	2.198.490,29
9	Meningkatnya Kegiatan Sektor Pertanian	11. Nilai PDRB Sektor Pertanian (Juta Rp.)	3.750.260,12
10	Meningkatnya Status Kemandirian Desa	12. Jumlah Desa Maju yang Meningkat Menjadi Desa Mandiri	3
		13. Jumlah Desa Berkembang Menjadi Desa Maju	26
11	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,93
		15. Indeks Kualitas Air (IKA)	49,15
		16. Indeks Kualitas Udara	87,604
		17. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	67,625
12	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	18. Prosentase Desa Tangguh Bencana Tingkat Madya	2,98% (2 desa)
14	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Jalan Yang Merata Untuk Semua Wilayah	19. Indeks Konektifitas	22,54%
14	Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	20. Persentase Lahan Yang Terlayani Irigasi	92,93%
15	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien	21. Opini BPK	WTP
		22. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.2
		23. Hasil Evaluasi AKIP	BB
		24. Indeks Kepuasan Masyarakat	78

Tabel 2.6
Anggaran Program
Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2020

No.	PROGRAM	ANGGARAN 2020 (Rp)
1.	Peningkatan Ketahanan Pangan	2.704.771.850
2.	Peningkatan Kesehatan Pangan Hewani	291.923.190
3.	Upaya Kesehatan Masyarakat	14.434.218.900
4.	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	5.367.711.000
5.	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya	4.051.041.188
6.	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	3.217.350.000

7.	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	17.000.000.000
8.	Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan	14.656.772.703
9.	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.488.887.460
10.	Upaya Kesehatan Perorangan	101.158.320.993
11.	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	47.387.914.152
12.	Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	15.155.279.050
13.	Pengembangan Perpustakaan	129.291.750
14.	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	333.280.000
15.	Pendidikan Anak Usia Dini	3.017.520.000
16.	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	92.477.143.615
17.	Pendidikan Non Formal	3.005.712.000
18.	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan	5.615.740.000
19.	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	161.922.100
20.	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.616.030.000
21.	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	295.280.000
22.	Bantuan dan Perlindungan Sosial	1.708.835.000
23.	Pengembangan dan Penataan Lingkungan Sehat Perumahan	391.600.000
24.	Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	530.105.000
25.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	6.687.571.900
26.	Peningkatan Kesejahteraan Petani Miskin	500.000.000
27.	Pemberdayaan Petani Peternak	80.000.000
28.	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	140.000.000
29.	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	193.575.750
30.	Peningkatan Kualitas Permukiman	2.124.165.000
31.	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	124.698.350
32.	Peningkatan Kesempatan Kerja	810.258.350
33.	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	175.350.000
34.	Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja	855.000.000
35.	Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Lembaga Sosial	80.000.000
36.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	342.808.500
37.	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	602.490.500
38.	Pendidikan Politik Masyarakat	145.000.000
39.	Peningkatan Solidaritas dan Ketahanan Sosial	50.000.000
40.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	144.735.727
41.	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2.2002.385.000
42.	Penegakan Peraturan Daerah	210.000.000
43.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	351.269.400
44.	Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	315.000.000
45.	Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha koperasi	622.053.800
46.	Pemberdayaan Usaha Mikro	1.449.077.200
47.	Penumbuhan Wirausaha Baru	578.328.400
48.	Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian	800.000.000

49.	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	411.045.000
50.	Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	50.000.000
51.	Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	710.100.000
52.	Pengembangan Database dan Informasi	240.000.000
53.	Pengembangan Nilai Budaya	554.394.600
54.	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	530.234.635
55.	Pengelolaan Kekayaan Budaya	54.903.000
56.	Pengembangan Destinasi Pariwisata	5.451.054.696
57.	Pengelolaan Keragaman Budaya	815.537.750
58.	Pengembangan Kemitraan	223.250.000
59.	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	596.000.000
60.	Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan di Daerah Tujuan Wisata	200.000.000
61.	Pengembangan Agrowisata Perikanan	155.150.000
62.	Pengembangan Agrowisata Peternakan	2.685.000.000
63.	Pengembangan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	293.137.800
64.	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	3.696.886.500
65.	Peningkatan Pasar Daerah	12.472.510.600
66.	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	581.371.600
67.	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	450.380.000
68.	Peningkatan Kesejahteraan Petani	60.900.000
69.	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	756.179.750
70.	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.769.827.900
71.	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	426.400.000
72.	Peningkatan Kualitas Bahan Baku Bidang Pertanian	900.000.000
73.	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan	716.376.850
74.	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Holtikulyura	2.578.783.450
75.	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan	130.077.800
76.	Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan	26.935.163.050
77.	Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	125.000.000
78.	Pengembangan Budidaya Perikanan	865.356.910
79.	Pengembangan Perikanan Tangkap	50.000.000
80.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	509.507.250
81.	Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	111.154.650
82.	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.204.125.000
83.	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1.148.175.000
84.	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	30.000.000
85.	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	260.000.000
86.	Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Desa	181.500.000
87.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	288.619.400
88.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	175.429.800
89.	Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	45.000.000

90.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	352.380.000
91.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	3.046.150.910
92.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11.641.065.094
93.	Pengendalian Pencemaran, Polusi dan Kerusakan Lingkungan Hidup	527.747.000
94.	Perlindungan dan Konservasi SDA	1.205.930.500
95.	Pembinaan Sosial Bidang LH	2.690.000.000
96.	Tata Lingkungan	584.000.000
97.	Penaatan Hukum Lingkungan	102.575.250
98.	Pengembangan Kapasitas LH	192.574.200
99.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	95.000.000
100.	Perencanaan Tata Ruang	1.488.000.000
101.	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	475.800.000
102.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	121.000.000
103.	Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	250.000.000
104.	Peningkatan Jalan dan Jembatan	23.439.015.650
105.	Pembangunan Jalan dan Jembatan	1.619.087.500
106.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	3.717.536.826
107.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	60.291.771.532
108.	Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	75.000.000
109.	Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan	100.000.000
110.	Peningkatan sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1.750.000.000
111.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	12.147.326.600
112.	Peningkatan PJU	15.091.561.200
113.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	883.133.700
114.	Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.411.400.000
115.	Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan	13.216.100
116.	Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	1.663.503.200
117.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan laiannya	20.118.953.631
118.	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	2.959.050.000
119.	Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	7.393.736.200
120.	Pengendalian Banjir	1.813.375.000
121.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.760.000.000
122.	Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pemerintah Daerah	148.000.000
123.	Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Aset Daerah	1.370.462.040
124.	Perencanaan Penyusunan Monitoring Anggaran Daerah	780.739.770
125.	Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	537.441.650
126.	Pengelolaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah	452.500.000
127.	Pengelolaam Pendapatan Daerah	1.130.000.000
128.	Peningkatan Pendapatan Daerah	1.550.000.000
129.	Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.757.000.000

130.	Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	85.000.000
131.	Peningkatan Tatakelola Komunikasi dan Informatika	297.233.050
132.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.287.393.955
133.	Perencanaan Pembangunan Daerah	1.583.170.100
134.	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	670.000.000
135.	Perencanaan Sosial dan Budaya	102.125.000
136.	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	547.000.000
137.	Perencanaan Bidang Pemerintahan	23.000.000
138.	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	357.002.550
139.	Pengembangan Data / Informasi	108.246.500
140.	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	200.000.000
141.	Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur	77.723.000
142.	Survey Kepuasan Masyarakat	836.490.250

b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2: Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	%	Keterangan Persentase	
1.	**≥ 100%**	Sama dengan atau lebih dari 100 persen	**Sangat Berhasil**
2.	**75% s.d < 100%**	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	**Berhasil**
3.	**55% s.d < 75%**	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen	**Cukup Berhasil**
4.	**< 55%**	Di bawah lima puluh lima persen	**Kurang Berhasil**

Pemerintah Kabupaten Magetan telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023. RPJMD menyajikan susunan 5 (lima) Misi, 7 (delapan) Tujuan, 15 (lima belas) sasaran dan dengan 24 (dua puluh empat) indikator sasaran yang secara rinci terbagi sebagai berikut:

Misi I = terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 5 indikator kinerja,

Misi II = terdapat 2 tujuan, 6 sasaran dan 8 indikator kinerja,

Misi III = terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 5 indikator kinerja,

Misi IV = terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja

Misi V = terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 4 indikator kinerja.

Rekapitulasi capaian kinerja adalah realisasi dari target kinerja yang ditetapkan untuk masing-masing sasaran strategis yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2020. Rekapitulasi capaian kinerja tersebut adalah:

Tabel 2.7
Rekapitulasi Capaian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	80,46	81	100,67%	**SB**
2	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	72,75	66,44	91,33%	**B**
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	9,91%	10,35%	95,56%	**B**
		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,90%	3,74%	71,03%	**CB**
4	Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Tertib dan Agamis	Indeks Toleransi	63,2	78,85	124,76%	**SB**
5	Meningkatnya Kemampuan /Keberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Nilai omset Usaha Koperasi dan Usaha Mikro (Rp. juta)	740.500	801.884	108,29%	**SB**
6	Meningkatnya kegiatan investasi	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	250	709,54	283,82%	**SB**
		Jumlah Investor (Pengusaha)	450	2.983	662,89%	**SB**
7	Meningkatnya kegiatan industri pariwisata	Nilai PDRB Sektor Pariwisata (Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan	667.126,54	798.493,30	119,69%	**SB**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
		Makan Minum) (Rp. Juta)				
8	Meningkatnya Kegiatan Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Rp. Juta)	2.198.490,29	2.904.518,50	132,11%	**SB**
9	Meningkatnya kegiatan sektor pertanian	Nilai PDRB sektor pertanian (Pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan) (Rp. Juta)	3.750.260,12	5.744.389,30	153,17%	**SB**
10	Meningkatnya Status Kemandirian Desa	Jumlah Desa Maju yang Meningkat Menjadi Desa Mandiri	3	5	166,6%	**SB**
		Jumlah desa berkembang menjadi maju	26	29	111,5%	**SB**
11	Meningkatnya Kualitas Air, Lahan, dan Udara	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,93	82,30	119,40%	**SB**
		Indeks Kualitas Air (IKA)	49,15	55,28	112,47%	**SB**
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,604	85,10	97,14%	**B**
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	67,625	67,61	99,99%	**B**
12	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Prosentase Desa Tangguh Bencana Tingkat Madya	2,98% (2 desa)	2,98% (2 desa)	100%	**SB**
13	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan yang merata untuk semua wilayah	Indeks Konektivitas	22,54%	25,87%	114,77%	**SB**
14	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Prosentase Lahan yang Terlayani Irigasi	92,93%	93,19%	100,28%	**SB**
15	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik yang Efektif	Opini BPK	WTP	WTP	100%	**SB**
		Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,2	2,86	130%	**SB**
		Hasil Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	BB	68,94	91,92%	**B**
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	80,84	103,64%	**SB**

c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dibutuhkan untuk mengukur capaian kinerja tahun 2019 dengan capaian kinerja tahun 2020. Pengukuran tersebut tersaji dalam table berikut:

Tabel 2.8
Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya
Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			
			2019		2020	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	80,41	80,75	80,46	81
2	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	72,75	65,42	72,75	66,44
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	10,11%	9,61%	9,91%	10,35%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3%	3,08%	2,90%	3,74%
4	Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Tertib dan Agamis	Indeks Toleransi	63,1	70,3	63,2	78,85
5	Meningkatnya Kemampuan /Keberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Nilai omset Usaha Koperasi dan Usaha Mikro (Rp. juta)	685.625	870.110	740.500	801.884
6	Meningkatnya kegiatan investasi	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	220	1.162	250	709,54
		Jumlah Investor (Pengusaha)	435	1.522	450	2.983
7	Meningkatnya kegiatan industri pariwisata	Nilai PDRB Sektor Pariwisata (Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Juta)	616.160,14	623.580,39	667.126,54	798.493,30
8	Meningkatnya Kegiatan Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Rp. Juta)	2.088.768,17	2.200.293,7	2.198.490,29	2.904.518,50
9	Meningkatnya kegiatan sektor pertanian	Nilai PDRB sektor pertanian (Pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan) (Rp. Juta)	3.652.424,43	3.517.329,5	3.750.260,12	5.744.389,30
10	Meningkatnya Status Kemandirian Desa	Jumlah Desa Maju yang Meningkat Menjadi Desa Mandiri	2	6	3	5
		Jumlah desa berkembang menjadi maju	23	68	26	29

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			
			2019		2020	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
11	Meningkatnya Kualitas Air, Lahan, dan Udara	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,79	68,81	68,93	82,30
		Indeks Kualitas Air (IKA)	49,1	53,13	49,15	55,28
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,67	86,1	87,604	85,10
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	67,62	67,61	67,625	67,61
12	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Prosentase Desa Tangguh Bencana Tingkat Madya	1,49	1,49	2,98% (2 desa)	2,98% (2 desa)
13	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan yang merata untuk semua wilayah	Indeks Konektivitas	22,52	24,86	22,54%	25,87%
14	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Prosentase Lahan yang Terlayani Irigasi	92,93	93	92,93%	93,19%
15	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik yang Efektif	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik	2	2,56	2,2	2,86
		Hasil Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	BB	B	BB	68,94
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	78	78	80,84

d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Berikut adalah tabel capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah:

Tabel 2.9
Capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam RPJMD
Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	80,46	81	100,67%	80,61
2	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	72,75	66,44	91,33%	72,90

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	9,91%	10,35%	95,56%	9,31%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,90%	3,74%	71,03%	2,75%
4	Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Tertib dan Agamis	Indeks Toleransi	63,2	78,85	124,76%	63,5
5	Meningkatnya Kemampuan /Keberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Nilai omset Usaha Koperasi dan Usaha Mikro (Rp. juta)	740.500	801.884	108,29%	
6	Meningkatnya kegiatan investasi	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	250	709,54	283,82%	
		Jumlah Investor (Pengusaha)	450	2.983	662,89%	
7	Meningkatnya kegiatan industri pariwisata	Nilai PDRB Sektor Pariwisata (Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Juta)	667.126,54	798.493,30	119,69%	
8	Meningkatnya Kegiatan Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Rp. Juta)	2.198.490,29	2.904.518,50	132,11%	
9	Meningkatnya kegiatan sektor pertanian	Nilai PDRB sektor pertanian (Pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan) (Rp. Juta)	3.750.260,12	5.744.389,30	153,17%	
10	Meningkatnya Status Kemandirian Desa	Jumlah Desa Maju yang Meningkat Menjadi Desa Mandiri	3	5	166,6%	
		Jumlah desa berkembang menjadi maju	26	29	111,5%	
11	Meningkatnya Kualitas Air, Lahan, dan Udara	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,93	82,30	119,40%	
		Indeks Kualitas Air (IKA)	49,15	55,28	112,47%	
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,604	85,10	97,14%	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	67,625	67,61	99,99%	
12	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Prosentase Desa Tangguh Bencana Tingkat Madya	2,98% (2 desa)	2,98% (2 desa)	100%	
13	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan yang merata untuk semua wilayah	Indeks Konektivitas	22,54%	25,87%	114,77%	
14	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Prosentase Lahan yang Terlayani Irigasi	92,93%	93,19%	100,28%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
15	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik yang Efektif	Opini BPK	WTP	WTP	100%	
		Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,2	2,86	130%	
		Hasil Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	BB	68,94	91,92%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	80,84	103,64%	

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai

Analisis terhadap akuntabilitas anggaran dilakukan dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi anggaran, serta analisis efisiensi kinerja yaitu membandingkan capaian kinerja dengan capaian (serapan) anggaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa capaian kinerja 137,97% dan serapan anggaran sebesar 86,96% sehingga capaian efisiensi kinerja sebesar 51,01%. Hasil analisis efisiensi sebagai berikut:

Tabel 2.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2020			Anggaran Tahun 2020			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**MISI I :** **Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)**								
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	80,46	81	**100,67%**	213.185.494.593	170.851.603.972	**87,70%**	**12,97%**
2	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	72,75	66,44	**91,33%**	106.393.687.366	96.958.127.055	**96,28%**	**-4,95%**
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	9,91%	10,35%	**83,30%**	39.695.343.903	31.881.554.888	**86,36%**	**-3,06%**
		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,90%	3,74%					
4	Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Tertib dan Agamis	Indeks Toleransi	63,2	78,85	**124,76%**	4.948.807.536	3.510.766.545	**77,58%**	**47,18%**

II	**MISI II :** **Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui Keberpihakan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Basis Sekaligus Ujung Tombak Pembangunan Daerah.**								
5	Meningkatnya Kemampuan /Keberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Nilai omset Usaha Koperasi dan Usaha Mikro (Rp. juta)	740.500	801.884	**108,29%**	3.315.728.800	2.765.685.700	**83,41%**	**24,88%**
6	Meningkatnya kegiatan investasi	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	250	709,54	**473,34%**	1.411.145.000	1.239.315.259	**92,07%**	**381,28%**
		Jumlah Investor (Pengusaha)	450	2.983					
7	Meningkatnya kegiatan industri pariwisata	Nilai PDRB Sektor Pariwisata (Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (dalam Rp. Juta)	667.126,54	798.493,30	**119,69%**	8.429.374.681	7.320.629.318	**93,96%**	**25,74%**
8	Meningkatnya Kegiatan Sektor Perdagangan.	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	2.198.490,29	2.904.518,50	**132,11%**	18.815.786.500	16.891.727.393	**89,77%**	**42,34%**
9	Meningkatnya kegiatan sektor pertanian	Nilai PDRB sektor pertanian (Pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan) (dalam Rp. Juta)	3.750.260,12	5.744.389,30	**153,17%**	34.493.708.800	33.765.322.591	**98,60%**	**54,58%**
10	Menurunnya Status Kemandirian Desa	Jumlah Desa Maju yang Meningkat Menjadi Desa Mandiri	3	5	**139,10%**	**1.302.929.200**	**1.232.990.009**	**94,63%**	**44,47%**

		Jumlah desa berkembang menjadi maju	26	29					
III	**MISI III:** **Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumberdaya Alam Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.**								
11	Meningkatnya Kualitas Air, Lahan, dan Udara	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,93	82,30	**107,25%**	22.314.642.044	19.995.049.066	**89,59%**	**17,66%**
		Indeks Kualitas Air (IKA)	49,15	55,28					
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,604	85,10					
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	67,625	67,61					
12	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Desa dengan Tingkat Ketangguhan Bencana	2,98% (2 desa)	2,98% (2 desa)	100%	596.800.000	560.807.950	**93,97%**	**6,03%**

IV	**MISI IV:** **Memantapkan Ketercukupan Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana dan Fasilitas bagi Kegiatan Pelayanan Masyarakat.**								
13	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan yang merata untuk semua wilayah	Indeks Konektivitas	22,54%	25,87%	**114,77%**	122.539.351.658	102.902.827.692	**84,53%**	**30,25%**
14	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Prosentase Lahan yang Terlayani Irigasi	92,93%	93,19%	**100,28%**	32.285.114.831	29.845.931.700	**92,44%**	**7,84%**
V	**MISI V:** **Mengembangkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Manajemen Pemerintahan yang Lebih Profesional.**								
15	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik yang Efektif	Opini BPK	WTP	WTP	**106,39%**	22.357.021.615	17.956.393.983	**81,80%**	**24,59%**
		Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.2	2,86					
		Hasil Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	BB	B (68,94)					
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,20	80,84					
Rata-Rata Capaian Kinerja, Serapan Anggaran dan Efisiensi					**136,96%**			**89,51%**	**47,45%**

f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Strategis-1

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2020			Target Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kesehatan	80,46	81	100,67%	80,61
Capaian Kinerja Sasaran Strategis			**100,67%**	

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah rercapai 100,67% atau Kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. Usia Harapan Hidup (UHH) sebagai faktor pembentuk Indeks Kesehatan menunjukkan angka yang meningkat secara landai rata-rata 0,16% atau 0,116 per tahun selama 6 tahun terakhir. Tahun 2015 UHH sebesar 72,01 tahun dan akhir tahun 2020 menjadi 72,59 tahun. Pandemi Covid-19 tetap memberikan kesadaran bagi warga untuk tetap hidup sehat. Capaian UHH ini berapa di atas Provinsi Jawa Timur 71,47 tahun yaitu dan bahkan Nasional 71,34 tahun. Beberapa indikator pendukung menunjukkan adanya peningkatan kinerja. Indikator Angka Kematian Ibu Melahirkan pada tahun 2019 sebesar 110,58% dan terus menurun hingga pada tahun 2020 sebesar 73,40% atau mengalami penurunan sebesar 37,18%. Indikator Indikator Angka Kematian Bayi pada tahun 2019 sebesar 9,71% dan terus menurun hingga pada tahun 2020 menjadi sebesar 8,93% atau mengalami penurunan sebesar 0,78%. Hal lain yang menjadi penting peningkatan usia harapan hidup adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan kepuasan masyarakat atas layanan kesehatan daerah. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2019 sebesar 83,18% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 90,39%. Beberapa perangkat daerah lain yaitu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan dan Perikanan juga dalam mendukung pemenuhan ketahanan pangan sangat besar, realisasi program:

a. Dinas Kesehatan

OPD Pendukung dan Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dinas Kesehatan			
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	14.434.218.900	7.677.547.178	53,19%
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	5.367.711.000	4.119.936.778	76,75%
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	4.051.041.188	1.531.195.400	37,80%

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	3.217.350.000	1.916.009.182	59,55%
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	17.000.000.000	14.585.733.173	85,80%
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (sesuai P-RKPD 2020)	2.488.887.460	1.570.928.802	63,12%
Program Upaya Kesehatan Perorangan	101.158.320.993	87.924.344.055	86,92%
Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	47.387.914.152	36.428.400.519	76,87%
Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	15.155.279.050	12.316.377.403	81,27%
Rata-Rata Serapan Anggaran	**210.260.722.743**	**168.070.472.490**	**69,03%**

b. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	2.704.771.850	2.563.060.912	94,76%
Rata-Rata Serapan Anggaran	**2.704.771.850**	**2.563.060.912**	**94,76%**

c. Dinas Peternakan dan Perikanan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pemberdayaan Petani Peternak	77.883.200	77.883.200	100%
Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	140.000.000	138.070.570	98,62%
Rata-Rata Serapan Anggaran	**220.000.000**	**218.070.570**	99,31%

Hambatan / Kendala yang terjadi dalam mencapai sasaran:

1. Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar pelayanan kesehatan TB
   - Adanya Perubahan sistem pelaporan dari Aplikasi SITT ke SITB sehingga menyebabkan turunnya Capaian
   - Deteksi dini penemuan Kasus TB belum maksimal

2. Pelayanan kesehatan orang dgn risiko terinfeksi HIV sesuai standar pemeriksaan HIV
   - Tidak dilaksankannya Skreening dikelompok Risiko Tinggi karena adanya Pandemi Covid-19
3. Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
   - Kegiatan Skrining melalui Posbindu tidak dilaksanakan sehingga sasaran untuk penderita Hipertensi tidak datang sehingga pelayanan dialihkan ke Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan Rumah sakit, namun karena adanya Pandemi penderita Hipertensi banyak yang tidak datang ke Fasilitas Kesehatan.
4. Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal
   - Lemahnya pendataan sasaran karena adanya pendemi sehingga petugas fokus pada penanganan covid-19 mengakibatkan pencatatan dan pelaporan tidak maksimal

- Perencanaan anggaran sudah mengacu pada analisa kebutuhan berdasarkan rekomendasi AMP dan kegiatan yang dilakukan namun anggaran masih kurang sehingga Bimtek peugas hanya bisa dilaksanakan di beberapa puskesmas.
- Pelaksanaan kegiatan sebagian mengalami perubahan baik itu anggaran ataupun jenis kegiatan karena dampak pandemi Covid-19 sehingga harus menyesuaikan tata laksana pedoman yang baru sesuai dengan keadaan pandemi.
- Pelayanan ibu hamil mengalami hambatan karena pandemi khususnya ANC terpadu di Puskesmas karena sebagian besar petugas terlibat dalam penanganan Covid-19 sehingga ada pembatasan jumlah kunjungan Ibu hamil di Fasilotas Kesehatan dan Kunjungan Rumah.

5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
   - Adanya data dasar dari sekolah yang berubah-ubah karena perpindahan sekolah sehingga merger sekolah yang tidak mempunyai siswa.
   - Kurangnya pengadaan buku rapor kesehatanku dan buku pemantauan kesehatan tidak memungkinkan karena jumlahnya sangat banyak.
   - Sekolah dilaksankan daring sehingga pemantauan kesehatan di sekolah mengalami kendala.
   - Pelaporan untuk pelayanan usia pendidikan dasar mengacu pada tahun ajaran bukan pada tahun anggaran sehingga pengelola program kesulitan untuk sinkronisasi tentang pelaporan.
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar skrining kesehatan usia produktif
   - Sekolah dilaksanakan daring sehingga pemantauan kesehatan di sekolah mengalami kendala.
   - Tidak dilaksanakannya kegiatan Posbindu karena adanya Pandemi Covid-19
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut
   - Pada masa pandemi pengumpulan data sementara didapatkan dari kunjungan rumah dan kunjungan gedung
   - Belum tercukupinya Buku Lansia sehingga menggunakan KMS Lansia
   - Karena banyaknya sasaran maka pemenuhan Instrumen DDS, AMT, GDL dan buku lansia tidak sesuai sasaran.
   - Pelaksanaan Posyandu Lansia tidak dilaksanakan karena adanya pandemi.
   - Keterlambatan pelaporan karena sebagian besar petugas menangani kasus Covid-19
8. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (skor)
   - Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi pangan beragam
   - Sulitnya mencari data yang valid dan terkini
9. Masyarakat peternak dan pembudidaya perikanan miskin yang mendapatkan bantuan sarpras budidaya ikan
   - Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan SDM masyarakat peternak dan pembudaya ikan miskin, serta keterbatasan jumlah bantuan terkait teknis dan kelembagaan pembudidayaan ikan.
   - Keterbatasan Modal Usaha.
   - Kegiatan budidaya ikan untuk masyarakat perikanan miskin belum berkonsep untuk berkelanjutan.

Strategi/solusi yang diambil dalam mencapai sasaran strategis:

1. Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar pelayanan kesehatan TB
   - Dilaksanakan Sosialisasi *On The Job* Training tentang Software terbaru
   - Penemuan Deteksi Dini Kasus TBC pelaksanaannya mengikuti jadwal pelaksanaan kegiatan tracing Covid-19
2. Pelayanan kesehatan orang dgn risiko terinfeksi HIV sesuai standar pemeriksaan HIV
   - Memaksimalkan Pemeriksaan HIV yang datang ke Layanan Kesehatan
3. Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
   - Kegiatan Skrining dikolaborasi dengan kegiatan yang lain seperti kegiatan tracking Covid-19, Kegiatan intervensi Keluarga Sehat
4. Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal
   - Adanya pemantauan dari Bidan Penanggung Jawab Wilayah setempat terkait perkembangan Ibu hamil melalui kunjungan rumah dengan menerapkan Protokol Kesehatan.
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
   - Buku Rapot Kesehatanku dan buku pemantauan kesehatan mengandalkan dropping buku dari Kementerian Kesehatan namun masih belum mencukupi karena jumlah sasaran sangat banyak.
   - Melakukan koordinasi lintas sektor pemangku kegiatan pendidikan terkait baik itu Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan Bagian Kesra Sekda Kabupaten untuk mencukupi buku rapor kesehatanku namun sampai sekarang belum ada tindaklanjutnya.
   - Pemantauan kesehatan dilakukan melalui media online walaupun angka pelayanan tinggi akan tetapi kualitas pelayanan otomatis menurun karena tidak semua indikator pemeriksaan dilakukan seperti pemeriksaan tensi, penglihatan, gigi mulut tidak bisa dilaksanakan sesuai standar, dan pemeriksaan hanya bisa melalui pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum dan bisa dilakukan pengecekan mandiri oleh siswa.
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar skrining kesehatan usia produktif
   - Pemantauan kesehatan dilakukan melalui sasaran yang berkunjung ke Fasilitas Kesehatan, namun sasaran usia produktif yang berkunjung ke Fasilitas Kesehatan sangat rendah karena adanya Pandemi.
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut
   - Pengumpulan Data Sementara didapatkan dari Kunjungan Gedung dan Kunjungan Rumah.
8. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (skor)
   - Tertib data untuk mendukung data yang valid dan terkini
9. masyarakat perikanan miskin yang mendapatkan bantuan sarpras budidaya ikan
   - Pendampingan dan pembinaan teknis dan kelembagaan
   - Pemberian paket sarpras budidaya untuk masyarakat perikanan miskin

Inovasi program dan kegiatan banyak dilakukan Dinas Kesehatan sebagai leading sector dan berhasil memperoleh Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur sebagai KBK terbaik melalui SK Gubernur nomor: 065/17242/031.2/2020 tentang KBK Prodjia UPTD Puskesmas Takeran Dinas Kesehatan Kabupaten

Magetan sebagai terbaik kedua Kompetisi Kelompok Budaya Kerja (KBK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 kategori pelayanan Jasa Medis.

Sasaran : Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat

Strategis-2

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2020			Target Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pendidikan	72,75	66,44	91,33%	72,90
Capaian Kinerja Sasaran Strategis			**91,33%**	

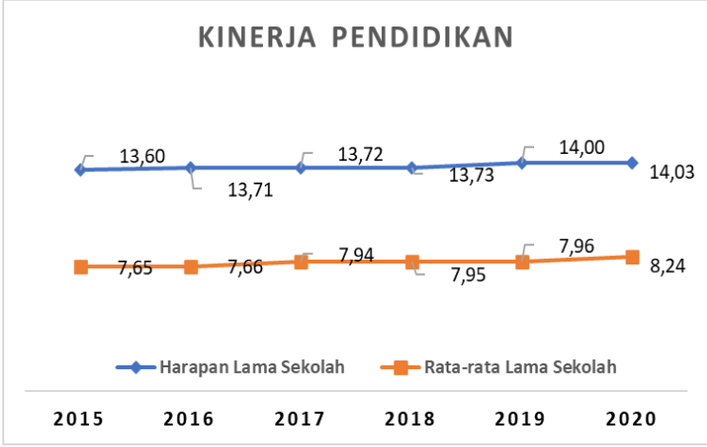

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya taraf pendidikan masyarakat mencapai 91,33% atau Kategori **Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. Capaian kinerja indikator pendukung menunjukkan bahwa Harapan Lama Sekolah terus mengalami kenaikan setiap tahun 0,09 tahun atau 0,63%, dan tahun 2020 adalah 14,03 tahun atau sudah melebihi pendidikan dasar. Sedangkan, untuk rata-rata lama sekolah juga terus mengalami kenaikan setiap tahun rata-rata 0,19 tahun atau 1,52%, sehingga tahun 2020 selama 8,24 tahun atau mendekati pendidikan dasar. Capaian kinerja pendidikan Kabupaten Magetan berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur, dimana Harapan Lama Sekolah adalah 13,19 tahun dan Rata-rata lama sekolah adalah 7,78 tahun.

Selama pandemi Covid-19 proses pendidikan dasar tetap dilakukan secara daring (online), sehingga proses pembelajaran dan peningkatan kapasitas pendidikan tetap berjalan. Capaian kinerja pendidikan lain, khususnya layanan pendidikan antara lain: Angka melek huruf penduduk sudah mencapai 100% tahun 2020 atau naik 0,05% dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga menjadikan Kabupaten Magetan menjadi bebas buta huruf. Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs mencapai 100% selama 3 tahun berturut-turut. Nilai APK SD/MI tahun 2020 memang mengalami penurunan kecil sebesar 1,17% dari 107% pada tahun 2019 menjadi 105,83% dan untuk nilai APK SMP/ MTs juga mengalami penurunan nilai 6,01% dari 116,07% tahun 2019 menjadi 110,06% pada tahun 2020. Sebaliknya, untuk nilai APM SD/MI tahun 2020 memang mengalami kenaikan moderat sebesar 0,01% dari 99,33% pada tahun 2019 menjadi 99,43% tahun 2020 dan demikian juga untuk nilai APM SMP/ MTs juga mengalami kenaikan nilai 0,01% dari 93,90% tahun 2019 menjadi 93,91% pada tahun 2020. Terakhir, untuk angka prosentase akreditasi sekolah dengan Akreditasi A terus menunjukkan peningkatan dimana untuk Akreditasi SD nilai akreditasi A sebesar 98,28% dan SMP sebesar 86,02%. Kinerja pendidikan ini didukung oleh tambahan koleksi buku perpustakaan daerah yang terus naik rata-rata 2.542 tiap tahun dari tahun 2018 sebanyak 76.318 buku menjadi 81.401 buku di tahun

2020. Beberapa Perangkat daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

a. Dinas Pendidkan, Kepemudaan dan Olahraga

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	870.000.000	861.074.345	98,97%
Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.017.520.000	3.014.156.500	99,89%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	93.202.143.616	83.920.503.141	90,04%
Program Pendidikan Non-Formal	3.005.712.000	2.996.301.364	99,69%
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.615.740.000	5.509.840.000	98,11%
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	220.000.000	216.750.000	98,52%
Rata-rata Serapan Anggaran	**105.931.115.616**	**96.518.625.350**	**97,54%**

b. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	333.280.000	328.150.679	98,46 %
Program Pengembangan Perpustakaan	129.291.750	111.351.026	86,12 %
Rata-rata Serapan Anggaran	**462.571.750**	**439.501.705**	**95,01%**

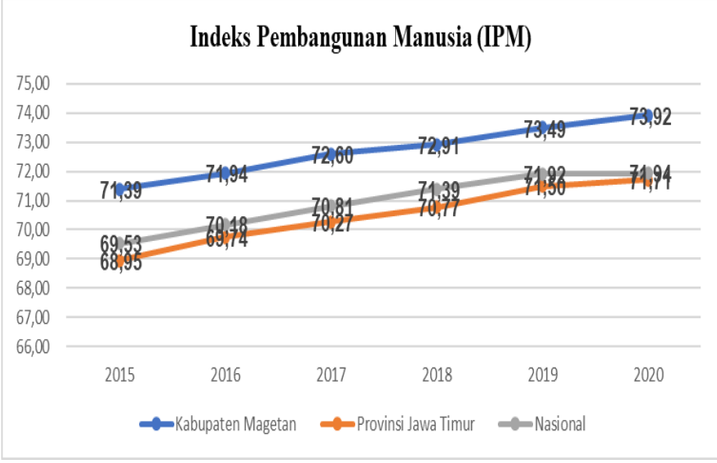

Inovasi peningkatan minat baca masyarakat juga dilakukan melalui layanan e-book di perpustakaan dan layanan perpustakaan keliling dengan mobil. Maka, diperlukan strategi dan kebijakan prioritas pendidikan dalam mempercepat capaian kinerja pendidikan. Berbagai program ini mampu meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meski di tengah resesi ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Angka IPM tahun 2015 angka IPM sebesar 71,39 poin yang terus meningkat sampai dengan tahun 2020 menjadi sebesar 73,92. Resesi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 hanya memberi dampak pada kecilnya peningkatan nilai yaitu sebesar 0,43 di tahun 2020. IPM Kabupaten Magetan termasuk kategori tinggi di Indonesia dan menempati peringkat ke 11 dari 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Peringkat ini naik 1 tingkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang masih berada di peringkat 12. Capaian IPM Kabupaten Magetan mulai tahun 2015 selalu berada di atas capaian IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional secara konsisten. Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain:

a. Kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan masih rendah terutama untuk daearah basis pertanian yang ada jauh dari perkotaan.
b. Masih ada angka melek huruf sebanyak 205 orang yang masih belum tuntas buta aksara, meskipun capaian kinerja angka melek huruf sudah 100%.
c. Kendala ekonomi bagi penyandang Buta aksara.
d. Masih ada anak yang putus sekolah pada jenjang SMP yang harus dilakukan pembelajaran secara mental maupun spiritual.
e. Sarana dan prasarana perpustakaan daerah yang masih terbatas, antara lain koleksi buku dan fasilitas ruang baca yang terbatas.
f. Sarana dan prasarana pembelajaran tingkat sekolah dasar yang makin terbatas dan sebanyak 90,42% ruang kelas yang memenuhi standar kelayakan untuk pembelajaran.

Berbagai strategi kebijakan peningkatan capaian kinerja yang dilakukan antara lain:

a. Pemberdayaan Penilik dan Tutor untuk menuntaskan dengan target tuntas buta aksara.
b. Memberikan ketrampilan kecakapan hidup yang sudah mendapat serifikat tuntas buta aksara.
c. Peningkatan akses masyarakat terhadap perpustakaan dan bacaan dengan melakukan berbagai inovasi antara lain penyiapan format e-book di perpustakaan daerah dan perluasan layanan mobil keliling perpustakaan.
d. Melanjutkan upaya perluasan dan pemerataan pendidikan melalui penyediaan sarana prasarana Pendidikan.
e. Pemenuhan SPM yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yaitu menyiapkan sarana fisik dan non fisik untuk kegiatan pelayanan pendidikan yang berkualitas yang meliputi komponen-komponen pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan SPM.
f. Meningkatkan kualitas maupun kuantitas tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan dan program pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
g. Mencari penyebab putus sekolah dan pembinaan langsung ke sekolah maupun keluarga untuk dapatnya melanjutkan sekolah baik di sekolah formal maupun Kesetaraan (Kejar paket).

Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Strategis-3

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2020			Target Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Angka Kemiskinan	9,91%	10,35%	95,56%	9,31%
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,90%	3,74%	71,03%	2,75%
Capaian Kinerja Sasaran Strategis			**83,30%**	

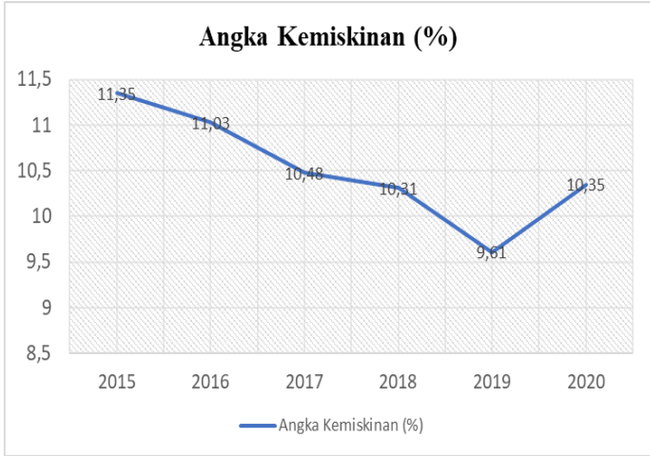

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan masyarakat mencapai 83,30% atau kategori **Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 2 (dua) indikator. Persentase penduduk Kabupaten Magetan yang berada di bawah garis kemiskinan mengalami selama 5 tahun, 2015 - 2019 terus mengalami secara moderat rata-rata 0,44% per tahun di mana tahun 2015 angka kemiskinan sebesar 11,35% dan terus menurun dan pada tahun 2019 tinggal 9,61% dengan rata-rata angka kemiskinan 10,56%. Akan tetapi pada tahun 2020 terjadi resesi ekonomi dunia akibat virus Pandemi Covid-19 yang mematikan aktivitas ekonomi sehingga telah menurunkan daya beli masyarakat. Akibatnya, jumlah angka kemiskinan Kabupaten Magetan meningkat sebesar 0,74% menjadi 10,35% tahun 2020. Meski demikian angka ini masih di bawah Provinsi Jawa Timur yang tahun 2020 sebesar 11,09% dan sedikit di atas angka kemiskinan nasional yaitu 10,19%. Capaian angka kemiskinan ini masih cukup rendah jika dibandingkan dengan rata-rata kenaikan angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 0,95%. Sektor basis ekonomi Kabupaten Magetan yang bertumpu pada sektor primer, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor rendahnya kenaikan angka kemiskinan ini.

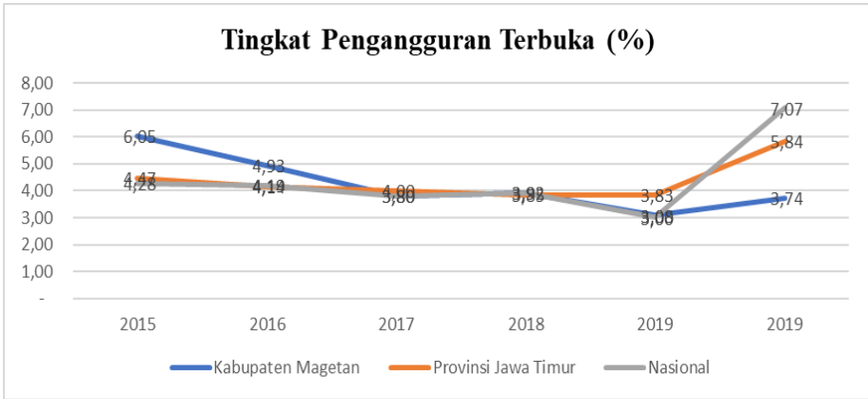

Kabupaten Magetan mampu mengukir sejarah terhadap capaian kinerja angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) sejak tahun 2019 yaitu mampu berada di bawah angka TPT Provinsi Jawa Timur. Angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama 5 tahun terakhir menunjukkan angka tren menurun secara moderat, yaitu 0,74%, pertahun di mana tahun 2015 masih sangat tinggi sebesar 6,05% dan terus menurun menjadi 3,08% tahun 2019. Tahun 2020, seiring dengan resesi ekonomi global akibat Pandemi Covid-19, aktivitas ekonomi produktif banyak yang mati sehingga terjadi PHK besar-besaran dari sektor formal produksi, yang akibatnya telah mendorong peningkatan pengangguran. Tingkat pengangguran di Kabupaten Magetan ikut terdampak di tahun 2020 dengan angka TPT meningkat sebesar 0,66% menjadi 3,74%. Kenaikan ini relatif masih sangat rendah jika dibandingkan kenaikan Provinsi Jawa Timur sebesar 2,01% menjadi 5,84% dan kenaikan nasional lebih tinggi lagi yaitu 4,07% menjadi 7,07% di tahun 2020. Capaian angka TPT Kabupaten Magetan masih jauh di bawah angka TPT Jawa Timur dan nasional. Sektor basis ekonomi Kabupaten Magetan yang bertumpu pada sektor primer, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor rendahnya kenaikan angka TPT ini. Capaian kinerja ini menunjukkan pembangunan Kabupaten Magetan berbasis sektor pertanian masih mampu memiliki tingkat produksi yang baik. Angka PDRB ADHB

atas Sektor pertanian masih mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp. 209,53 milyar (3,79%) dari Rp. 5.534,86 milyar tahun 2019 tetap naik menjadi 5.744,39 milyar tahun 2020. Demikian juga dengan angka PDRB ADHK tahun 2020 yang mengalami kenaikan moderat sebesar Rp. 84,95% milyar atau 2,42% dari Rp. 5.534,87 milyar tahun 2019 tetap naik menjadi Rp. 5.744, 39 milyar di tahun 2020.

Terkait kesejahteraan masyarakat ini, dukungan dinas dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan oleh beberapa dinas. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memberikan dukungan melalui peningkatan pemenuhan rumah tangga bersanitasi dengan capaian 92,251% atau sebanyak 216.971 rumah tangga dari 235.197 rumah tangga yang ada. Sedangkan, untuk akses air minum, tahun 2020 sebanyak 865.296 jiwa yang sudah mampu menikmati akses air minum atau tercapai 91,98%. Dukungan SPM lain juga dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan melakukan pembangunan rumah tidak layak huni dari sebanyak 69 unit rumah bagi masyarakat yang tidak mampu atau berpenghasilan rendah. Pengembangan kegiatan ekonomi bagi pedagang kaki lima (PKL) dilakukan dengan jumlah binaan yang terus meningkat tiap tahun, yaitu 110 di tahun 2019 menjadi 250 di tahun 2020 dan pelatihan bagi pemuda terkena PHK.

Beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Tenaga Kerja. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

a. Dinas Sosial

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.616.030.000	1.416.190.804	87,63%
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	295.280.000	257.195.050	87,10%
Program Bantuan dan Perlindungan Sosial	1.708.835.000	1.419.813.761	83,09%
Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	530.105.000	463.940.350	87,52%
Rata-rata Serapan Anggaran	**4.150.250.000**	**3.557.139.965**	**86,34%**

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	6.687.571.900	6.062.184.947	90,65%
Rata-rata Serapan Anggaran	**6.687.571.900**	**6.062.184.947**	**90,65%**

c. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	

Program Pengembangan dan Penataan Lingkungan Sehat Perumahan	701.877.500	509.012.603	72,5 %
Program Peningkatan Kualitas Permukiman	3.974.165.000	3.597.825.653	90,5 %
Rata-rata Serapan Anggaran	**4.676.042.500**	**4.106.838.256**	**81,53%**

d. Dinas Kesehatan.

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan	14.656.772.703	10.314.512.655	70,37%

e. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Miskin	500.000.000	432.933.350	86,59%

f. Dinas Peternakan dan Perikanan.

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pemberdayaan Petani Peternak	80.000.000	80.000.000	100%
Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	140.000.000	138.070.570	98,62%
Rata-Rata Serapan Anggaran	**220.000.000**	**218.070.570**	99,31%

g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	193.575.750	190.818.050	98,57%

h. Dinas Tenaga Kerja

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	161.922.100	134.034.640	82,78%
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	124.698.350	108.492.950	87,00%
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	810.258.350	515.416.433	63,61%
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	175.350.000	169.125.625	96,45%
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja	855.000.000	535.226.415	62,60%
Rata-Rata Serapan Anggaran	**2.127.228.800**	**1.462.296.063**	**78,49%**

i. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program peningkatan peran serta kepemudaan	320.000.000	231.257.750	72,27%
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	700.000.000	430.050.000	61,44%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	5.463.902.250	4.875.453.282	89,23%
Rata-Rata Serapan Anggaran	**6.483.902.250**	**5.536.761.032**	**85,39%**

Berdasarkan capaian kinerja diatas, beberapa kendala atau hambatan dalam mencapai sasaran kinerja antara lain:

a. Data kemiskinan yang sangat dinamis, sehingga berbagai perubahan data belum mampu ditangkap secara cepat dan valid, sehingga basis data terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu belum tervalidasi/tersedia.
b. Masih tingginya keluarga rentan miskin.
c. Terkait dengan pemenuhan Rasio Penduduk Rumah Layak Huni kendala yang ada antara lain tanah untuk pembangunan RTLH status tanahnya belum jelas, penerima bantuan namanya pada saat pengajuan tidak sesuai dengan yang ada di KTP, tanah yang akan dibangun dalam sengketa keluarga, penerima bantuan telah meninggal dunia, dan pada saat realisasi bantuan rumah sudah dibangun dulu.
d. Terkait dengan pemenuhan persentase pengurangan Lingkungan Permukiman Kumuh, kendala yang terjadi yaitu kurangnya sosialisasi tentang perlunya sarana prasarana permukiman yang layak dan pagu anggaran yang terbatas sehingga belum bisa mengcover semua usulan dari masyarakat.
e. Terkait dengan target prosentase Penduduk yang didaftarkan JKN oleh Pemerintah Daerah, kendala yang ada adalah kepesertaan penduduk yang terdaftar hanya sebanyak 39.752 Jiwa sehingga 48.000 Jiwa tidak terealisir.
f. Data terkait jumlah petani miskin sangat dinamis dan belum dapat terupdate secara berkala sebagai basis kebijakan.
g. Masyarakat peternak dan pembudidaya perikanan miskin yang mendapatkan bantuan sarpras budidaya ikan
   - Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan SDM masyarakat peternak dan pembudaya ikan miskin, serta keterbatasan jumlah bantuan terkait teknis dan kelembagaan pembudidayaan ikan.
   - Keterbatasan Modal Usaha.
   - Kegiatan budidaya ikan untuk masyarakat perikanan miskin belum berkonsep untuk berkelanjutan.
h. Terkait dengan capaian kinerja pembinaan pedagang kaki lima (PK5), kendala yang dihadapi adalah minimnya sarana dan prasarana pendukung dan penempatan yang diijinkan untuk pedagang kaki lima (PK5).
i. Kendala dalam mencapai persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan, antara lain terjadinya wabah pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak pada terhambatnya aktivitas perekonomian, sehingga banyak perusahaan melakukan efisiensi untuk menekan kerugian akibatnya penyerapan tenaga kerja mengalami

penurunan karena banyak pekerja dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK), pelayanan penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) ditutup mulai bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2020 sehingga tidak ada pemberangkatan, dan tidak bisa terselenggaranya kegiatan Job Fair di Tahun 2020.

j. Pencapaian prosentase tenaga kerja yang memperoleh pelatihan berbasis kompetensi, terkendala antara lain karena terjadinya kasus wabah pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya di Kabupaten Magetan sejak awal bulan Maret 2020 mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan pelatihan Menjahit Level I dimana pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana jadwal (time schedule) yang disusun sebab pelaksanaan kegiatan menyesuaiakan dengan perkembangan dan kondisi virus Covid-19, keterbatasan kuota peserta pelatihan yang tidak sebanding dengan jumlah peserta yang mendaftar pelatihan sebagai akibat dari refocusing anggaran untuk penannganan Covid-19.
k. Pemenuhan capaian kinerja persentase tenaga kerja yang memperoleh pelatihan berbasis kewirausahaan, terkendala terjadinya wabah pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya di Kabupaten Magetan sejak awal bulan Maret Tahun 2020, mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan pelatihan Kewirausahaan Kelompok aneka Abon dan Kering tempe program peningkatan kesempatan kerja Tahun 2020. Pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana awal (*time schedule*) yang telah disusun, dimana pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan perkembangan dan kondisi penyebaran virus Covid-19.
l. Untuk capaian persentase Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek, terdapat kendala yaitu terjadinya wabah pandemi Covid 19 di Indonesia mengakibatkan salah satu perusahaan besar di Kabupaten Magetan berhenti operasi hingga mengakibatkan PHK seluruh karyawannya yang berdampak pada jumlah kepesertaaan BPJS Ketenagakerjaan mengalami penurunan.
m. Terkait dengan kebijakan transmigrasi yang ditempatkan (KK), maka keluar surat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigasi RI No: B.676/PKT.04.01/IV/2020 Tanggal 15 April 2020 tentang Penundaan Penempatan Transmigrasi Tahun 2020 sebagai Antisipasi dampak wabah pandemik Covid-19, menyebabkan kegiatan Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM tidak bisa dilaksanakan sehingga pada tahun 2020 Kabupaten Magetan tidak ada penempatan Transmigran.
n. Kendala yang terjadi dalam peningkatan Persentase Wirausaha Muda yaitu karena ada pandemi covid 19 sangat berdampak pada wirausaha muda yang baru tumbuh dan berkembang.
o. Pencapaian persentase organisasi pemuda yang aktif menghadapi kendala yaitu masih perlu pemberdayaan dan pengembangan organisasi pemuda baik melalui organisasi KNPI, Pemuda pelopor maupun organisasi lainnya.

Sstrategi dan solusi yang ditempuh untuk peningkatan capaian kinerja di tahun mendatang antara lain

a. Melakukan koordinasi secara intensif dan terstruktur mengupdate data kemiskinan terutama dinas sosial dengan tim, perangkat kecamatan dan kelurahan/desa.
b. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data terpadu agar penanganan fakir miskin dapat dilaksanakan secara tepat baik secara sasaran maupun jenis penanganannya.
c. Mengusulkan bantuan Program KUBE Fakir Miskin ke Kementerian Sosial.

d. Bekerjasama dengan Panti Petirahan Anak Bima Sakti Batu secara rutin mengirim anak bermasalah dalam pendidikan formal.
e. Terkait dengan indikator Rasio Penduduk Rumah Layak Huni, maka strategi yang diambil antara lain melakukan pendataan se detail mungkin terkait pemohon bantuan RTLH, melakukan monitoring kondisi rumah yang diajukan bantuan RTLH, dan melakukan verifikasi data RTLH yang detail dilapangan.
f. Untuk indikator Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh, maka strategi yang diambil adalah perlu adanya sosialisasi tentang perlunya permukiman yang tertata dari segi Kesehatan dan lingkungan dan dalam pelaksanaan kegiatan harus yang prioritas dahulu yang dikerjakan.
g. Strategi yang diambil untuk meningkatkan capaian pendaftaran JKN oleh Pemerintah Daerah, dengan cara meningkatkan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kepesertaan JKN bagi penduduk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan kategori kemiskinan yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten (PBI Daerah).
h. Pengembangan sistem database terpadu tentang dan dilakukan update secara berkala.
i. Strategi meningkatkan produktivitas peternak dan pembudidaya ikan adalah dengan melalui pendampingan dan pembinaan teknis dan kelembagaan dan Pemberian paket sarpras budidaya untuk masyarakat perikanan miskin.
j. Strategi yang diambil dalam pemberdayaan dan pembinaan pedagang kaki lima secara terpadu antara lain dengan menggandeng dukungan CSR dari pihak swasta/BUMN dan penataan ruang publik yang mengakomodir tempat pedagang kaki lima (PK5) yang representatif.
k. Pencapaian persentase pencari kerja yang ditempatkan, strategi yang dilakukan adalah melaksanakan *Job Canvasing*/penjajakan kerjasama perekrutan ke berbagai perusahaan.
l. Strategi meningkatkan capaian pelatihan berbasis kompetensi, dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Magetan agar kegiatan pelatihan tahun 2020 dapat dilaksanakan.
m. Peningkatan tenaga kerja yang memperoleh pelatihan berbasis kewirausahaan, maka dilakukan strategi koordinasi dan konsultasi dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Magetan agar kegiatan pelatihan tahun 2020 dapat dilaksanakan dan saat pelaksanaan kegiatan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat bagi seluruh komponen yang terkait dengan kegiatan.
n. Peningkatan prosentase Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek dilakukan dengan sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan lebih digiatkan.
o. Meningkatkan kapabilitas SDM di lingkungan Dinas Tenaga Kerja khususnya didalam menginventarisir dokumen-dokumen program/kegiatan sehingga dapat tertata dengan baik serta mempercepat peyusunan SPJ sehingga dapat memperlancar pencairan anggaran untuk kegiatan selanjutnya.
p. Strategi dalam meningkatkan persentase Wirausaha Muda melalui program bantuan modal usaha dari pemerintah sangat membantu dalam upaya peningkatan wirausaha muda.
q. Strategi untuk meningkatkan persentase organisasi pemuda yang aktif yaitu melalui pengembangan SDM pemuda melalui seleksi pemuda pelopor dan kegiatan di KNPI.

Sasaran Strategis-4 : **Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Tertib dan Agamis**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2020			Target Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Toleransi	63,2	78,85	124,76%	63,5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis			**124,76%**	

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya masyarakat yang rukun, tertib dan agamis mencapai 124,76% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. Capaian beberapa kinerja pendukung menunjukkan perbaikan terus-menerus. Jumlah petugas linmas sebanyak 6.832 orang yang tersebar di 235 kelurahan/desa, sehingga cakupan petugas linmas setiap kel/ desa sebesar 29 orang. Pada sub urusan pemadam kebakaran, cakupan jumlah prosentase kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu *(response time)* selama kurang dari 15 menit terus meningkat dari tahun 2018 sebanyak 40 kejadian terus meningkat sampai akhir tahun 2020 sebanyak 77 kejadian atau naik sebanyak 18 kejadian tiap tahun atau sebesar 41,62% setiap tahun. Beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja, melalui program-program pendukung sasaran strategis:

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	342.808.500	269.732.050	78,68%
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban	602.490.500	575.354.250	95,50%
Program Peningkatan Solidaritas dan Ketahanan Sosial	50.000.000	50.000.000	100,00%
Program Pendidikan Politik Masyarakat	145.000.000	129.881.600	89,57%
Rata-Rata Serapan Anggaran	**1.140.299.000**	**1.024.967.900**	**89,89%**

b. Satuan Polisi Pamong Praja

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	144.735.727	103.602.327	71,58%
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	2.002.385.000	1.217.056.700	60,78%
Program Penegakan Peraturan Daerah	210.000.000	209.459.199	99,74%
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1.451.387.809	955.680.419	65,85%
Rata-Rata Serapan Anggaran	**3.808.508.536**	**2.485.798.645**	**65,27%**

Beberapa hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran strategis tersebut antara lain:

a. Belum adanya sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga PPNS yang ada masih tersebar di berbagai OPD.
b. Belum diaktifkannya unit Satpol PP di wilayah kecamatan sehingga penegakan perda di masing -masing wilayah kecamatan belum optimal.
c. Kurangnya sarana prasarana dan personil untuk menunjang optimalisasi kegiatan operasional pemadam kebakaran.
d. Belum adanya unit pembantu / posko di setiap wilayah manajemen kebakaran sehingga menyebabkan penanganan pemadaman kebakaran di wilayah tertentu kurang optimal sehingga tidak memenuhi respon time 15 menit.

Beberapa strategi kebijakan yang diambil dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tersebut antara lain:

a. Satpol PP dan Pemadam kebakaran akan membentuk sekretariat PPNS serta penyatuan beberapa personil PPNS yang ada di beberapa OPD, diharapkan bisa mempermudah koordinasi dan dapat berjalan secara optimal dalam melaksanakan tupoksinya.
b. Mengoptimalkan linmas desa dan mengaktifkan unit Satpol PP di wilayah kecamatan.
c. Mengupayakan pengadaan personil dan sarana prasarana pemadam kebakaran serta melakukan perbaikan dan perawatan secara rutin sarana prasarana pemadam kebakaran yang sudah ada.
d. Tahun 2020 membuka unit pembantu/posko di wilayah Kecamatan Karangrejo dan selanjutnya akan melakukan rekrutmen personil non pns dan menambah posko bantuan damkar di wilayah kecamatan kawedanan pada tahun 2021.

Sasaran Strategis-5 : Meningkatnya Kemampuan / Keberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai omset Usaha Koperasi dan Usaha Mikro (Rp. juta)	740.500	801.884	108,29%
Capaian Kinerja Sasaran Strategis			**108,29%**

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya kemampuan / keberdayaan koperasi dan usaha mikro mencapai 108,29% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. Jumlah Usaha Mikro Kecil (UM) dan Koperasi di Kabupaten Magetan memiliki tren terus naik secara moderat selama 3 tahun terakhir. Jumlah usaha mikro sebanyak 6. 616 usaha di tahun 2017

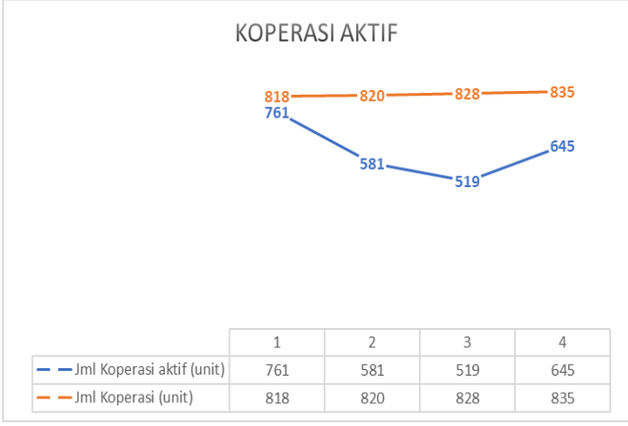

terus meningkat rata-rata 3.477 usaha per tahun sehingga akhir tahun 2020 menjadi lebih kurang 17.048. di masa pandemi Covid-19 tahun 2020, usaha mikro masih terus bertambah meski kecil yaitu 130 usaha jika dibandingkan dengan jumlah usaha di tahun 2019. Demikian pula dengan jumlah koperasi yang sejak tahun 2017 terus bertambah rata-rata 6 buah setiap tahun sehingga tahun 2020 berjumlah 835 koperasi yang memiliki izin usaha resmi. Bahkan di tahun 2020, di masa Pandemi Covid-19, jumlah koperasi tetap bertambah sebesar 7 unit koperasi. Akan tetapi, jika dilihat dari prosentase koperasi yang aktif memiliki jumlah yang fluktuatif dan tren nya tetap naik. Tahun 2018 dari jumlah koperasi yang ada 828 unit usaha, sebanyak 519 unit atau 62,68% unit yang aktif meningkat signifikan di tahun 2020 menjadi 645 unit koperasi dari 835 unit atau sekitar 77,25%. Hal ini menunjukkan bahwa animo dan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi terus membaik dan didukung dengan program pembinaan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Magetan. Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	351.269.400	304.743.550	86,75%
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi dan usaha mikro	315.000.000	297.966.950	94,59%
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi	622.053.800	546.133.050	87,80%
Program Pemberdayaan Usaha Mikro	1.449.077.200	1.134.431.300	78,29%
Program Penumbuhan Wirausaha Baru	578.328.400	482.410.850	83,41%
Rata-Rata Serapan Anggaran	**3.315.728.800**	**2.765.685.700**	**83,41%**

Kendala atau hambatan yang terjadi dalam pencapaian target kinerja tersebut antara lain:

a. Kapasitas dan Kemampuan wirausaha pengurus koperasi dalam melakukan pengelolaan keuangan dan untuk melakukan kerjasama masih terbatas,
b. Akses permodalan dari lembaga keuangan formal perbankan masih terbatas karena sistem keuangan koperasi yang masih belum bankable.
c. Terbatasnya personel dan kapasitas ASN yang memahami koperasi secara utuh dan komprehensif di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sehingga cakupan pembinaan usaha mikro dan koperasi belum maksimal.
d. Dukungan anggaran yang terbatas sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai kebutuhan.
e. Terkait dengan pengembangan Usaha Mikro, masih ada beberapa kendala antara lain Adanya pandemic covid-19 mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga memberi hambatan pertumbuhan usaha mikro, masih banyaknya pelaku UM yang belum menerapkan pemasaran online akibat kurangnya pengetahuan tentang teknologi, kurangnya kemampuan usaha mikro dalam membiayai usahanya, lantaran modal usahanya habis, karena tidak ada perputaran dana akibat merosotnya permintaan dan kurang optimalnya koordinasi antara Dinas/OPD terkait dalam mengembangkan Usaha Mikro sehingga pembinaan yang dilakukan selama ini kurang fokus.

Beberapa strategi dan solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut antara lain:

a. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi pengurus koperasi, baik melalui pelatihan maupun sertifikasi, secara periodik bagi seluruh pengurus koperasi,
b. Meningkatkan fasilitasi akses kerjasama dengan lembaga formal keuangan perbankan dalam rangka mengakses sumber-sumber pendanaan dan transfer kemampuan,
c. Meningkatkan Persentase koperasi yang sehat dan berkualitas, melalui kegiatan pendampingan, pembinaan, pengawasan dan monev dan melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan.
d. Meningkatkan fasilitasi pengembangan Usaha Mikro melalui, meningkatkan promosi dan pemasaran terhadap produk usaha mikro agar dikenal masyarakat sehingga daya beli masyarakat meningkat, meningkatkan pengetahuan pelaku usaha tentang teknologi sehingga dapat menggunakan E-Commerce bagi produknya, koordinasi antar Dinas/OPD terkait dalam mengembangkan usaha mikro sehingga pembinaan yang dilakukan dapat terukur dan terarah, dan meningkatkan kualitas dan daya saing usaha mikro dengan pelatihan, pendampingan dan pembinaan bagi pelaku usaha mikro, memfasilitasi pelaku usaha mikro dalam mengembangkan jaringan kemitraan dan memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi usaha mikro dalam mengurus legalitas usahanya.

Sasaran Strategis-6 : Meningkatnya Kegiatan Investasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Investasi (Rp. Milyar)	250	709,5	283,82%
Jumlah Investor (Pengusaha)	450	2.983	662,89%
Capaian Kinerja Sasaran Strategis			**473,36%**

Capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya kegiatan investasi mencapai 473,36% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 2 (dua) indikator. Realisasi investasi di Kabupaten Magetan selama 3 tahun 2017-2019 menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan dimana tahun 2017 sebesar Rp.118,1 milyar naik 174% menjadi Rp. 291,84 milyar dan meningkat tajam di tahun 2019 menjadi Rp.1.163 milyar. Layanan kemudahan utk penanaman modal dari DInas Penanaman Modal dan PTSP menjadi kunci kesuksesan ini. Namun, di tahun 2020, akibat dampak pandemi Covid-19 terjadi seiring dengan kelesuan ekonomi, terjadi penurunan investasi yang tajam menjadi sebesar Rp. 709,54 milyar. Angka ini jika dibandingkan dengan tahun 2018

masih tetap mengalami peningkatan. Jika dilihat dari sisi jumlah investor, menunjukkan angka capaian kinerja yang sangat signifikan di tahun 2020. Jumlah investor naik signifikan selama 4 tahun terakhir meski dalam kondisi Pandemi Covid-19. Jumlah investor dari tahun 2017 berjumlah 316 usaha naik rata-rata 889 per tahun atau 117%, sampai dengan tahun 2020 menjadi 2.983 investor. Hal ini telah menunjukkan bahwa kemampuan investor dalam negeri untuk perusahaan menengah ke bawah masih sangat kuat meskipun di tengah resesi ekonomi ini. Berbagai upaya telah dilakukan dinas terkait dalam bentuk promosi investasi, fasilitasi dan kegiatan kerjasama investasi. Di tahun 2020, dalam rangka meningkatkan layanan perijinan investasi, maka telah dilaunching Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan teknologi online dan maju. MPP ini melibatkan 23 instansi perangkat daerah, 206 jenis layanan yang diberikan, 25 loket dan rata-rata per hari melayani 70 kali layanan antrian perizinan. Peluang dan potensi investasi apa saja yang menarik dan menjanjikan juga sudah dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Perangkat Daerah terkait adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Program	Anggaran		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	411.045.000	388.152.093	94,43%
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	50.000.000	48.658.274	97,32%
Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu	240.000.000	230.224.050	95,93%
Program Pengembangan Database dan Informasi	710.100.000	572.280.842	80,59%
Rata-Rata Serapan Anggaran	**1.411.145.000**	**1.239.315.259**	**92,07%**

Beberapa kendala/hambatan yang masih terjadi dalam pencapaian sasaran adalah:

- Dari sisi realisasi nilai investasi, kendala yang masih terjadi adalah masih kurangnya investor berskala besar yang berinvestasi dan terhambatnya promosi investasi karena pandemi Covid-19.
- Sedangkan, dilihat dari sisi investor, maka kendala yang terjadi adalah belum tersedianya data potensi investasi yang komprehensif dan belum optimalnya upaya fasilitasi usaha mikro dan kecil.
- Dukungan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan investasi daerah, khususnya infrastruktur jalan dan air yang masih kurang.

Solusi dan pemecahan masalah yang sudah diambil untuk mewujudkan capaian kinerja ke depan agar lebih baik adalah

- Mengoptimalkan peran Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPM PTSP), sebagai lembaga yang dibentuk menangani pelayanan perizinan investasi daerah secara terpadu dengan konsep satu pintu. Sehingga berkas pengajuan perijinan hanya melewati pintu DPM PTSP, selanjutnya DPM yang mengkoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.
- Strategi terkait dengan nilai investasi, maka dilakukan intensifikasi penawaran peluang investasi langsung kepada investor berskala besar, mengubah strategi promosi investasi menjadi lebih efektif, efisien dan tepat sasaran, memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal, dan memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan perizinan.
- Strategi untuk meningkatkan investor melalui penyusunanpeta potensi investasi dan data peluang investasi, memfasilitasi perizinan usaha mikro dan kecil, dan memfasilitasi kemitraan pengusaha besar dengan UMKM.
- Koordinasi dengan dinas terkait dalam dukungan dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha supaya bisa tumbuh dan berkembang khususnya insfrastruktur jalan dan air.

Pada tahun 2020 ini, Dinas Penanaman Modal dan PTPS menyusun rencana aksi layanan investasi di era Pandemi Covid-19 ini.

1. Memfasilitasi kegiatan usaha yang sudah beroperasi untuk memperluas usahanya.
2. Memfasilitasi potensi kegiatan usaha yang belum terealisasi.
3. Mendatangkan investasi baru.
4. Memberikan insentif kemudahan penanaman modal.
5. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan.
6. Memfasilitasi kemitraan antara pengusaha besar dengan UMKM.

Sasaran : Meningkatnya Kegiatan Industri Pariwisata

Strategis-7

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai PDRB Sektor Pariwisata (Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (dalam Rp. Juta)	667.126,54	798.493,30	119,69%
Capaian Kinerja Sasaran Strategis			**119,69%**

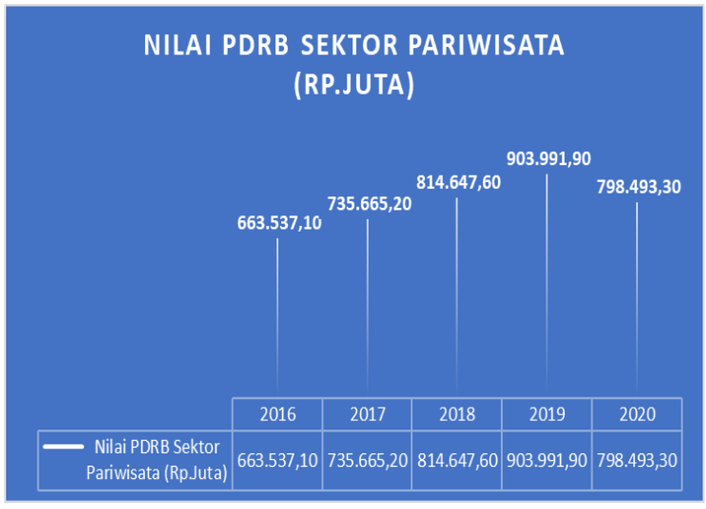

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya kegiatan industri pariwisata mencapai 119,69% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. PDRB sektor pariwisata ini diproksi dengan nilai PDRB ADHB untuk sektor akomodasi dan makan minum. Nilai PDRB menunjukkan bahwa rata-rata selama 4 tahun (2016 – 2019) telah tumbuh sebesar 10,86% dimana tahun 2016 realisasi PDRB sebesar Rp.663.537,10 juta terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi Rp.903.991,90 juta. Akan tetapi, tahun 2020 sektor pariwisata menjadi salah satu yang terdampak parah dan bahkan terkontraksi negatif. Tahun 2020, jumlah kunjungan wisata turun -11,67% dari tahun 2019 menjadi 798.493,30 juta. Meski demikian, capaian kinerja indikator kunjungan wisatawan tahun 2020 melampaui target yang ditetapkan yaitu Rp.667.126,54 juta atau dengan nilai capaian sebesar 119,69%. Hal ini menunjukkan bahwa meski diterapkan protokol yang ketat dan pembatasan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 50% dari kapasitas, namun animo masyarakat untuk ke destinasi wisata di Kabupaten Magetan.

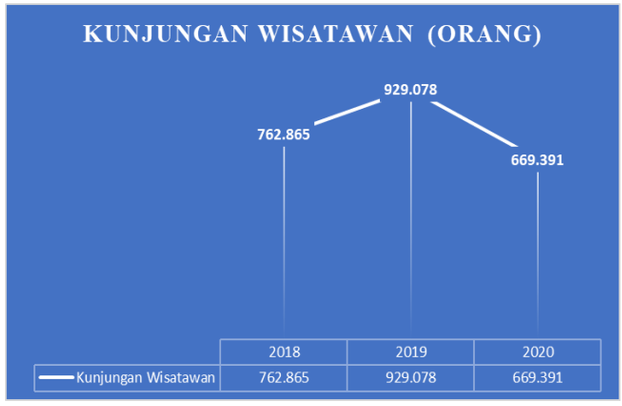

Jumlah kunjungan wisata diberbagai destinasi wisata favorit di Magetan tahun 2018 sebanyak 762.865 kunjungan. Angka ini terus meningkat pada tahun 2109 sebesar 21,79% atau 166.213 kunjungan wisata. Pada tahun 2020, seiring dengan kebijakan pembatasan kunjungan wisata sebanyak 50% di destinasi wisata, maka jumlah kunjungan menurun - 27,95% dengan jumlah pengunjung sebanyak 669.391 orang di tahun 2020. Dukungan akomodasi hotel sebanyak 170 buah dengan 2.193 kamar dan 3.366 tempat tidur. Indikator kinerja yang menarik dan menujukkan peningkatan adalah jumlah rumah makan yang tersedia, tahun 2018 sebanyak 50 rumah makan, tahun 2019 meningkat 85 dan bahkan di tahun 2020 terus meningkat menjadi 98 rumah makan. Hal ini menunjukkan bahwa Magetan bukan hanya menjadi destinasi wisata, tetapi menjadi jalur alternatif dan transit bagi perjalanan ke daerah lain yaitu karanganyar dan wonogiri. Sebanyak 10 buah destinasi unggulan di Kabupaten Magetan dengan jumlah pengunjung tahun 2020 adalah:

Jumlah Kunjungan Wisata per Destinasi

Destinasi	Jumlah Pengunjung	Destinasi	Jumlah Pengunjung
1. Telaga Sarangan	629.038	5. Air Terjun Ngadiloyo	16.284
2. Taman Genilangit	46.501	6. Telaga Wahyu	4.954
3. Taman Mojosemi	42.730	7. Candi Simbatan Wetan	108
4. Puncak Lawu	21.431		

Sumber: Kabupaten Magetan Dalam Angka Tahun 2021, BPS.

Sektor Pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum) memiliki kontribusi PDRB Kabupaten Magetan rata-rata 4,5% selama 5 tahun terakhir dimana hal ini masih tergolong kecil. Akan tetapi, sektor ini memiliki angka pertumbuhan yang sangat tinggi, yaitu rata-rata 8,75% selama 5 tahun terakhir dan bahkan di atas sektor perdagangan dan manufaktur yang menjadi sektor basis di Kabupaten Magetan. Sektor ini mampu memberi kontribusi PAD dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang besar yaitu Rp.7.806,47 milyar tahun 2017 dan terus meningkat rata-rata 44,95%, sehingga jumlah PAD sektor ini sebesar Rp.15.934,04 milyar tahun 2019. Tahun 2020, jumlah PAD ini turun sebesar -31,75% akibat pandemi Covid-19 dan menjadi Rp.10.874,25 milyar. Beberapa prioritas pengembangan pariwisata ke depan adalah dengan mengembangkan agorwisata dan destinasi wisata edukasi-rekreasi-konservasi yang sesuai dengan ciri khan Kabupaten Magetan. Pariwisata yang berbasis pada potensi lokal ini diharapkan mampu memberikan dampak *multiplier effect* yang besar meningkatkan jumlah dan pemerataan pendapatan bagi penduduk karena dikelola berbasis komunitas. Beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Perindustrian dan PerdaganganAdapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pengembangan Kemitraan	223.250.000	197.460.000	88,45%
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	530.234.635	509.636.332	96,12%
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	5.451.054.696	4.485.006.539	82,28%
Program Pengembangan Nilai Budaya	554.394.600	540.022.250	97,41%
Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan BudayaDaerah	54.903.000	54.675.000	99,58%
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	815.537.750	775.835.147	95,13%
Rata-Rata Serapan Anggaran	**7.629.374.681**	**6.562.635.268**	**93,16%**

b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian	800.000.000	757.994.050	94,75%

Komitmen Pemerintah Kabupaten Magetan untuk mengembangkan pariwisata melalui penciptaan destinasi-destinasi wisata baru berbasis pada sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Magetan menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini. Salah satu prestasi pariwisata adalah Penghargaan Tingkat Jawa Timur pada Desa Wisata Genilangit sebagai Desa Wisata Cerdas Mandiri Sejahtera. Destinasi baru yang didukung dengan infrastruktur dan sarana prasarana wisata telah menarik tumbuh kembangnya berbagai industri industri kecil, yang mendukung pengembangan destinasi wisata, antara lain kulit dan makanan. Beberapa hambatan dan kendala yang masih terjadi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

1. Kesadaran masyarakat terhadap pengembangan destinasi berbasis potensi alam dan sosial budaya sebagai modal dasar pariwisata masih sangat rendah. Masyarakat cenderung tergantung pada pemerintah dan menunggu stimulasi pemerintah daerah.
2. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola pariwista yang masih rendah. Pariwisata belum jadi sebuah alternatif mata pencaharian yang menjanjikan sehingga kreatifitas dalam mengelola paket wisata dan promosi pariwisata melalui berbagai media masih kurang.
3. Masyarakat masih memiliki cara pandang dan basis berpikir sektor pertanian yang sebagai sebuah produksi, sehingga belum berpikir tentang pengembangan produk pertanian sebagai jasa pariwisata. Selain itu, hasil industri rumah tangga berbasis hasil produk pertanian juga belum banyak diarahkan untuk mendukung pariwisata.
4. Terbatasnya mobilitas masyarakat akibat Pandemi Covid-19 serta ditutupnya tempat-tempat rekreasi, hiburan, hotel dan akomodasi berdampak pada ekonomi yang cukup besar di sektor pariwisata yaitu penurunan jumlah kunjungan wisata serta penurunan pendapatan asli daerah sektor pariwisata.
5. Adanya pembatalan kegiatan promosi pariwisata melalui media konvensional seperti pameran tidak dapat terlaksana.
6. Pandemi Covid-19 juga berdampak besar pada sektor seni dan budaya, mulai bulan Maret 2020 aktivitas pertunjukan dan pagelaran seni budaya dibatasi bahkan tidak dilaksanakan, sehingga seniman kehilangan pendapatan karena kontrak dan pekerjaan dibatalkan.
7. Kendala dalam nilai usaha perdagangan luar negeri adalah adanya pembatalan pesanan produk dari luar negeri dikarenakan pandemi covid-19.
8. Pengembangan industri kecil, juga terjadi kendala antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) dari IKM kompetensinya masih kurang, sarana dan prasarana pendukung produksi belum memenuhi kebutuhan IKM, kebersamaan antar IKM dalam hal produksi dan pemasaran masih kurang, dan belum dapat memanfaatan teknolgi informasi secara maksimal terutama dalam pemasaran.

Solusi dan pemecahan masalah yang telah diambil antara lain:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana umum untuk kemudahan akses ke berbagai destinasi pariwisata dengan dinas terkait,
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama industri yang mendukung pariwisata baik dalam bentuk pelatihan berbagai jenis industri makanan berbasis lokal pendukung pariwisata, juga industri jasa pariwisata lainnya,
3. Meningkatkan promosi pariwisata secara massif baik melalui berbagai media, baik digital maupun jejaring sosial dengan menggandeng para pelaku pariwisata, tour dan travel, serta melibatkan masyarakat dalam mempromosikan pariwisata. Bahkan, pelaku seni melakukan pameran secara virtual untuk melestarikan seni budaya daerah.
4. Melakukan sosialisasi pentingnya sinergi kerja antara sektor pertanian, industri dan pariwisata sebagai satu kesatuan paket pengembangan pariwisata. Selain itu, mendorong berbagai kelompok masyarakat untuk mengembangkan aneka sajian budaya dan sosial lainnya sebagai pendukung atraksi wisata.

5. Mengalokasikan anggaran yang diarahkan untuk pembinaan terkait protokol kesehatan dan memberi bantuan berupa alat kesehatan pada Desa Wisata dan pelaku usaha pariwisata.
6. Penataan Destinasi pariwisata yang tetap menjaga kelestarian lingkungan dan penerapan protokol kesehatan.
7. Strategi untuk meningkatkan nilai usaha perdagangan luar negeri adalah dengan pengajuan bantuan dana untuk pendukung biaya operasional karyawan.
8. Strategi pengembangan industri kecil dilakukan dengan pembinaan secara berkelanjutan untuk Sumber Daya Manusia dari IKM dan pemberian bantuan sarana penunjang IKM.

Sasaran : Meningkatnya Kegiatan Sektor Perdagangan

Strategis-8

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai PDRB Sektor Perdagangan	2.198.490,29	2.904.518,50	132,11%
Capaian Kinerja Sasaran Strategis			**132,11%**

Tabel di atas menunjukkan capaian sasaran strategis meningkatnya kegiatan sektor perdagangan mencapai 132,11% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan menunjukkan rata-rata kenaikan 10,38% dalam 4 tahun terakhir (2016 – 2019) dimana realisasi tahun 2016 sebesar Rp.2.243,18 milyar naik menjadi Rp.3.015,65 milyar di tahun 2019. Tahun 2020, terjadi penurunan nilai PDRB akibat covid-19 sebesar -3,69% sehingga tahun 2020 nilai PDRB Sektor Perdagangan menjadi sebesar Rp.2.904,52 milyar. Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	293.137.800	284.262.956	96,97%
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	3.696.886.500	2.878.637.300	77,87%
Program Pengembangan Pasar Daerah	12.994.010.600	12.018.242.109	92,49%
Program Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	581.371.600	521.973.878	89,78%
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	450.380.000	430.617.100	95,61%
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian	800.000.000	757.994.050	94,75%
Rata-Rata Serapan Anggaran	**18.815.786.500**	**16.891.727.393**	**89,77%**

Capaian kinerja indikator pendukung sektor usaha perdagangan ini menunjukkan peningkatan kinerja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Jumlah Usaha Perdagangan berijin atau memiliki SIUP menunjukkan peningkatan terus selama 5 tahun terakhir, dari 4.989 usaha ber-SIUP taun 2017 naik signifikan menjadi 6.601 usaha di tahun 2020. Juga jumlah industri kecil dimana tahun 2017 berjumlah 15.895 naik secara moderat sampai tahun 2020 menjadi 16.035 industri kecil. Demikian juga untuk sentra industri kecil yang dibangun, tahun 2017 sebanyak 233 sentra industri kecil dan di akhir tahun 2020 sudah naik menjadi 278 sentra industri kecil.

Kendala/hambatan yang ada dalam mewujudkan sasaran tersebut adalah:

1. Sebagian besar usaha dan industri masih masuk kategori mikro, maka perlu didorong supaya naik kelas menjadi usaha kecil agar mampu berkontribusi lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,
2. Kemampuan perajin industri mikro dan kecil dalam peningkatan kualitas produk dan pemasaran masih rendah, sehingga kreatifitas, inovasi produk dan pemasaran produk yang masih terbatas,
3. Sinergi kebijakan antar dinas teknis terkait, mulai pelatihan, perijinan sampai dengan proses pemberdayaan usaha dan industri mikro masih lemah, sehingga seringkali jalan sendiri-sendiri dan kurang maksimal.
4. Kendala dalam nilai usaha perdagangan luar negeri adalah adanya pembatalan pesanan produk dari luar negeri dikarenakan pandemi covid-19.
5. Pengembangan industri kecil, juga terjadi kendala antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) dari IKM kompetensinya masih kurang, sarana dan prasarana pendukung produksi belum memenuhi kebutuhan IKM, kebersamaan antar IKM dalam hal produksi dan pemasaran masih kurang, dan belum dapat memanfaatan teknolgi informasi secara maksimal terutama dalam pemasaran.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan untuk mewujudkan capaian kinerja ke depan agar lebih baik adalah:

1. Dinas melakukan pendataan ulang terhadap usaha dan industri mikro yang memiliki potensi dan kemampuan untuk dimasukkan prioritas peningkatan kelas dari usaha mikro supaya naik status menjadi skala kecil,
2. Sinergi kerja dengan Dinas Kopearsi dan Usaha Mikro dengan berbagai instansi lain untuk mengembangkan pusat inkubator bagi UMKM supaya bisa lebih produktif serta pusat pelatihan tenaga kerja terampil,
3. Melakukan sinergi kebijakan dalam bentuk fasilitasi mulai pemetaan potensi, pelatihan, kemudahan perijinan sampai dengan fasilitasi inovasi produk, promosi produk melalui kemudahan promosi dan bantuan akses media sosial untuk promosi produk.

4. Strategi untuk meningkatkan nilai usaha perdagangan luar negeri adalah dengan pengajuan bantuan dana untuk pendukung biaya operasional karyawan.
5. Strategi pengembangan industri kecil dilakukan dengan pembinaan secara berkelanjutan untuk Sumber Daya Manusia dari IKM dan pemberian bantuan sarana penunjang IKM.

Sasaran : Meningkatnya Kegiatan Sektor Pertanian

Strategis-9

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai PDRB sektor pertanian (Pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan) (dalam Rp. Juta)	3.750.260,12	5.744.389,30	153,17%
Capaian Kinerja Sasaran Strategis			**153,17%**

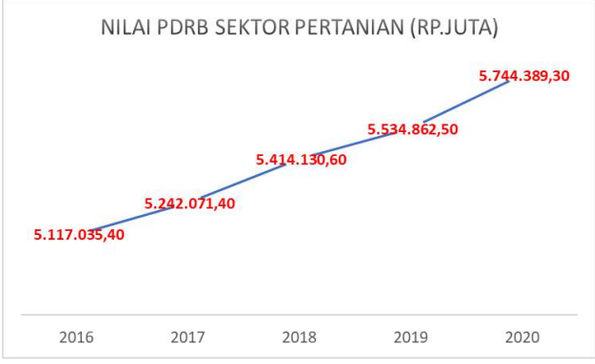

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya kegiatan sektor pertanian yang diukur dengan Nilai PDRB ADHB sektor pertanian mampu malampaui target sebesar 153,17% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. Capaian kinerja sektor pertanian dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu tingkat produktivitas pertanian dan kontribusi sektor pertanian. Tingkat produktivitas pertanian menunjukkan tren yang meningkat tahun 2019 ini yaitu 7,5 ton/ha dibandingkan tahun 2018 sebanyak 6,4 ton/ha atau naik sebesar 18,95%. Sedangkan, untuk tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 7,4 ton/ha. Jika dilihat dari kontribusi menunjukkan penurunan yang landai dimana tahun 2015 kontribusinya sebesar 35,24% dan terus turun hingga tahun 2019 mencapai angka 29,35% dan tahun 2020 kembali naik menjadi 30,60%. PDRB sektor pertanian ini memiliki basis yang sangat kuat di Kabupaten Magetan, di saat Pandemi Covid-19 pada tahun 2020, nilai PDRB tetap naik signifikan 3,79% dibandingkan tahun 2019 atau di atas kenaikan rata-rata dalam 5 tahun terakhir yaitu 2,65%. Kenaikan ini didukung oleh laju pertumbuhan sektor pertanian yang memiliki angka positif yaitu 2,42 saat angka pertumbuhan ekonomi daerah mengalami kontraksi -1,64% di tahun 2020.

Data PDRB Sektor pertanian menunjukkan angka yang terus meningkat secara signifikan meski di masa Pandemi Covid-19 rata-rata 2,94% dalam 6 tahun terakhir atau meningkat rata-rata Rp.156,84 milyar pertahun. Nilai PDRB sektor pertanian tahun 2016 sebesar Rp. 5.117,04 milyar dan terus meningkat signifikan menjadi Rp.5.744,39 milyar pada tahun 2020. Kelompok tanaman pangan jagung memberikan kontribusi produksi yang besar karena terjadi peningkatan signifikan di tahun 2020. Sepanjang tahun 2020, produksi jagung meningkat tajam sebesar 22,72% dari tahun 2019 atau sebanyak 226.270 kwintal. Sehingga, produksi jagung tahun 2020 menjadi 1.221.970 kwintal yang naik signifikan jika dibandingkan dengan tahun

2019 sebanyak 995.700 kwintal. Hal ini menunjukkan, sektor pertanian menjadi sektor basis bagi daerah dan harus ditransformasi ke sistem jasa sehingga pendukung pariwisata sehingga mampu mendukung peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Peternakan dan Perikanan, dengan realisasi program:

a. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Program	Anggaran		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	60.900.000	60.721.650	99,71%
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	756.179.750	741.302.935	98,03%
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	1.769.827.900	1.654.864.401	93,50%
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	426.400.000	421.062.450	98,75%
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Bidang Pertanian	900.000.000	675.252.400	75,03%
Program Peningkatan Produksi/Produktivitas Mutu Tanaman Pangan	716.376.850	699.825.100	97,69%
Program Produksi/Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura	2.578.783.450	2.265.358.525	87,85%
Program Produksi/Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan	130.077.800	127.450.000	97,98%
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan	26.935.163.050	26.901.414.560	99,87%
Rata-Rata Serapan Anggaran	**34.273.708.800**	**33.547.252.021**	**97,88%**

b. Dinas Peternakan dan Perikanan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pemberdayaan Petani Peternak	80.000.000	80.000.000	100%
Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	140.000.000	138.070.570	98,62%
Rata-Rata Serapan Anggaran	**220.000.000**	**218.070.570**	99,31%

Beberapa hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara:

1. Jumlah luasan lahan pertanian yang semakin menyempit dengan adanya perubahan tata ruang untuk permukiman karena tuntutan kebutuhan tempat tinggal penduduk,
2. Kondisi musim dan cuaca yang semakin tidak menentu dan bahkan ekstrim dalam beberapa bulan dan serangan organisme penganggu tanaman, sehingga berdampak terhadap musim tanam dan panen yang ada.

3. Tidak semua petani mau menerapkan teknologi budidaya dan pengolahan produk pasca panen berbasis teknologi tepat guna (TTG) untuk meningkatkan nilai hasil pertanian masih belum berjalan dengan baik.
4. Masyarakat peternak dan pembudidaya perikanan miskin yang mendapatkan bantuan sarpras budidaya ikan
   - Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan SDM masyarakat peternak dan pembudaya ikan miskin, serta keterbatasan jumlah bantuan terkait teknis dan kelembagaan pembudidayaan ikan.
   - Keterbatasan Modal Usaha.
   - Kegiatan budidaya ikan untuk masyarakat perikanan miskin belum berkonsep untuk berkelanjutan.

Beberapa strategi dan solusi yang diambil antara lain:

1. Untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian, sejak 2017 telah dilakukan identifikasi lahan pertanian berkelanjutan. Pada tahun 2019 telah disusun Ranperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan tahun 2020 tindak lanjut Peraturan Daerah tentang Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).
2. Koordinasi intensif antara penyuluh dan kelompok gabungan petani (Gapoktan) terus ditingkatkan terutama dalam mengembangkan teknis budidaya tanaman pangan yang lebih efektif dan efisien.
3. Melakukan kebijakan pengadaan Demplot Tanaman dan Sekolah lapang Pengendalian Hama Terpadu bagi petani.
4. masyarakat perikanan miskin yang mendapatkan bantuan sarpras budidaya ikan
   - Pendampingan dan pembinaan teknis dan kelembagaan.
   - Pemberian paket sarpras budidaya untuk masyarakat perikanan miskin.

Sasaran : Meningkatnya Status Kemandirian Desa

Strategis-10

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Desa Maju yang Meningkat Menjadi Desa Mandiri	3	5	126,6%
Jumlah desa berkembang menjadi maju	26	29	111,5%
Capaian Kinerja Sasaran Strategis			**139,10%**

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya status kemandirian desa mencapai 100% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 2 (dua) indikator. Kabupaten Magetan memiliki 18 Kecamatan dengan 208 desa. Program percepatan menjadi Desa Mandiri dan Maju jadi prioritas pembangunan desa. Selain itu, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) juga menjadi perhatian dimana tahun 2018 hanya 99 BUMDesa yang aktif dan tahun 2020 melonjak menjadi 177 BUMDesa aktif, meningkat rata-rata 39 BUMDesa atau 34,65% per tahun. Dalam

dukungan layanan kesehatan dan sosial, prosentase Pos Yandu Mandiri meningkat dari 7,9 tahun 2019 menjadi 8,1 di tahun 2020. Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan realisasi program:

Program	Anggaran		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	260.000.000	242.312.600	93,20
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Desa	181.500.000	180.900.000	99,67
Program FasilitasiPengelolaanKeuanganDesa	288.619.400	288.325.750	99,90
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	175.429.800	133.660.759	76,19
Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	45.000.000	44.211.000	98,25
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	352.380.000	343.579.900	97,50
Rata-Rata Serapan Anggaran	**1.302.929.200**	**1.232.990.009**	**94,63%**

Kendala dan hambatan yang masih terjadi dalam pencapaian target kinerja antara lain:

1. Masih kurangnya pemahaman perangkat desa dan masyarakat desa terhadap kebijakan pemberdayaan dan pengembangan pembangunan ekonomi desa terutama terkait dengan optimalisasi peran dan fungsi Bumdes
2. Terkait dengan pemberdayaan BUMDesa beberapa kendala antara lain: kurangnya dukungan modal pengembangan BUMDesa, belum adanya kesadaran penuh dari Pemerintah Desa terkait pentinganya pembentukan dan pengembangan BUMDesa dan kualitas SDM pengelola BUMDesa belum maksimal sehingga belum memunculkan ide/inovasi baru terkait pengelolaan BUMDesa.

Solusi kebijakan dan pemecahan masalah yang telah diambil adalah:

1. Penyusunan regulasi terkait penyertaan modal BUMDesa dari APBDesa.
2. Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola BUMdesa.
3. Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.
4. Dukungan anggaran terkait peningkatan saran dan prasarana pasar desa melalui BKKD.
5. Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola pasar desa dan usaha ekonomi desa.

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Air, Lahan, dan Udara

Strategis-11

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,93	82,30	119,40%
Indeks Kualitas Air (IKA)	49,15	55,28	112,47%
Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,604	85,10	97,14%
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTLH)	67,625	67,61	99,99%
Capaian Kinerja Sasaran Strategis			**107,25%**

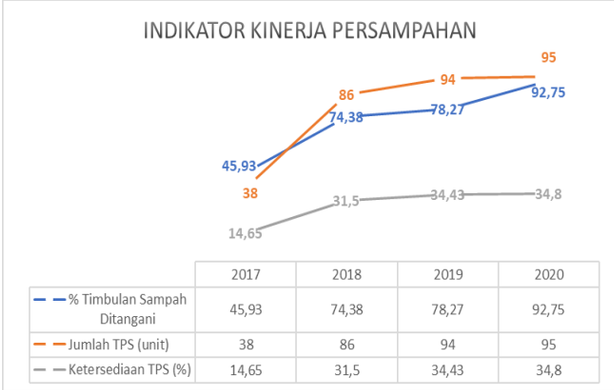

Capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya kualitas air, lahan dan udara mencapai 107,25% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 4 (empat) indikator. Pengelolaan sampah dan konservasi lingkungan menjadi program prioritas daerah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Setidaknya, ada 3 indikator pendukung kinerja lingkungan hidup dari aspek persampahan, yaitu prosentase timbulan sampah yang ditangani, jumlah TPS (Tempat Penampungan Sementara) dan indikator prosentase ketersediaan TPS. Indikator % timbulan sampah menunjukkan bahwa terjadi kenaikan setiap tahun rata-rata 15,61% penanganan pengurangan timbulan sampah di Kabupaten Magetan, dimana tahun 2017 sebanyak 45,93% yang dapat ditangani naik sampai tahun 2020 sebesar 92,75%. Pada indikator jumlah TPS yang tersedia juga terus mengalami kenaikan rata-rata 19 TPS per tahun dalam 4 tahun terakhir. Tahun 2017 jumlah TPS baru 38 buah dan terus naik sehingga tahun 2020 sudah menjadi 95 buah TPS. Terakhir, adalah indikator prosentase cakupan ketersediaan TPS terhadap kebutuhan area luas daerah yang harus dicover oleh manajemen persampahan. Rasio ini mengalami kenaikan rata-rata per tahun 6,72% selama 4 tahun terakhir, dimana tahun 2017 masih hanya 14,65% yang mampu dicover, angka ini terus meningkat sampai dengan tahun 2020 menjadi sebanyak 34,8%.

Dukungan terhadap pengelolaan sampah juga dilakukan melalui kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 01/Prt/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, pemerintah daerah wajib menyediakan RTH seluas 30% dari luas wilayah, dimana 10% adalah RTH Private yang sudah dikuasai oleh individu atau perusahaan dan 20% adalah RTH Publik. Pemerintah Kabupaten Magetan selalu terus menambah luasan RTH dimana tahun 2017 seluas 7.865 Ha naik menjadi 7.885 Ha pada tahun 2020. Akan tetapi, secara luasan, jumlah tersebut masih berada di bawah ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu baru sekitar 18,05% atau kurang 11,95% dari luasan wilayah daerah. Partisipasi semua pihak dalam membangun dan membesarkan RTH antara lain dengan menggandeng CSR perusahaan/BUMN sangat penting dilakukan karena anggaran pemerintah daerah yang terbatas. Selain itu, sosialisasi ke berbagai instansi atau perusahaan dibutuhkan agar mau merawat dan menyisihkan ruang untuk RTH, selain dengan pengendalian dalam pemberian izin prinsip perumahan yang wajib disisakan untuk RTH. Beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, realisasi program-program pendukung sasaran strategis:

a. Dinas Lingkungan Hidup

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	12.324.665.094	11.160.024.595	90,55%

Program Pengendalian Pencemaran, Polusi dan Kerusakan Lingkungan Hidup	527.747.000	514.972.089	97,58%
Program Perlindungan dan Konservasi SDA	1.593.080.500	1.459.479.248	91,61%
Program Pembinaan Sosial Bidang Lingkungan Hidup	2.690.000.000	2.255.154.912	83,83%
Program Tata Lingkungan	584.000.000	499.324.325	85,50%
Program Penataan Hukum Lingkungan Hidup	102.575.250	76.718.450	74,79%
Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	192.574.200	172.419.550	89,53%
Rata-Rata Serapan Anggaran	**18.014.642.044**	**16.138.093.169**	**89,58%**

b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pengelolaan Ruang Tebuka Hijau (RTH)	4.300.000.000	3.856.955.897	89,6 %

Kendala/hambatan yang masih terjadi dalam pencapaian sasaran antara lain:

1. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih sangat terbatas, karena kondisi topografi wilayahnya. Pengembangan RTH dengan kondisi keterbatasan yang demikian membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar pula.
2. Penyebaran tanaman pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dilaksanakan baik yang sumber dana APBD, APBN, CSR BUMN, serta swadaya masyarakat belum sepenuhnya ditanam pada *Land Mapping Unit (LMU)* terpilih yang merupakan areal lahan yang termasuk kategori potensial kritis sampai dengan kritis, sehingga kurang tepat sasaran.
3. Peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami kendala antara lain: peningkatan penduduk menyebabkan peningkatan permukiman yang akan menyebabkan peningkatan volume air limbah domestik, perilaku Masyarakat yang kurang ramah lingkungan, rendahnya pengelolaan limbah domestik, berkembangnya kegiatan/ usaha dan industri, dan rendahnya ketaatan masyarakat/ pelaku usaha terhadap penerapan hukum lingkungan.
4. Peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU) menghadapi kendala antar lain: peningkatan jumlah penduduk/ rumah tangga mengakibatkan peningkatan aktivitas rutin seperti bahan bakar untuk proses produksi, pembakaran sampah, penguraian zat organik dari penumpukan sampah dan mobilisasi, peningkatan jumlah kendaraan bermotor, sektor usaha/industri menyebabkan emisi polutan udara semakin besar, dan berkurangnya vegetasi.
5. Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) menghadapi kendala antara lain: aktivitas Pertanian yang tidak sesuai dengan pola pemanfaatan lahan, serta penggunaan pupuk kimia dan bahan kimia secara berlebihan, aktivitas Industri dan Pembangunan Infrastruktur yang tidak sesuai dengan tata ruang, menyebabkan berkurangnya kemampuan lahan untuk melindungi air dan tanah, dan peningkatan permukiman dapat menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan lahan sesuai fungsinya, dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi dan kaidah konservasi.

6. Pencapaian prosentase penanganan dan pengurangan sampah menghadapi kendala antara lain: semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk, semakin meningkatnya kegiatan yang menghasilkan limbah padat, air limbah, limbah B3 padat, dan limbah B3 cair dari kegiatan industri, rumah sakit, fasilitas umum dan area wisata di Kabupaten Magetan, rendahnya perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, rendahnya pengelolaan sampah di sumber sampah, Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengurusi sampah tidak sebanding dengan cakupan luas penanganan sampah, TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Milangasri dengan kondisi saat ini yang overload, dan Sarana dan prasarana yang tersedia hanya dapat menangani diwilayah tertentu, serta pembangunan TPS yang baru terkendala dengan lokasi (tanah/lahan) yang keberadaan TPS harus dibangun diatas tanah/lahan milik pemerintah, serta adanya konflik / penolakan dari warga sekitar lokasi TPS yang akan dibangun.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi/solusi atas permasalahan tersebut di atas antara lain:

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya yang wilayah privat (perkantoran), sehingga akan mampu meningkatkan luasan RTH di Kabupaten Magetan.
2. Melaksanaan pembinaan secara intensif pada masyarakat/petani penghijauan untuk lebih meningkatkan swadaya dalam penyediaan bibit penghijauan dan penanaman pada lahan-lahan kritis luar kawasan hutan yang ada sesuai LMU yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Pemeritah Daerah.
3. Mendorong kelompok masyarakat HIPPAM untuk menjaga dan melakukan konservasi dan/atau reboisasi secara swadaya dalam rangka menjaga sumber-sumber mata air yang merupakan sumber air minum mereka.
4. Peningkatan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan strategi: melakukan pencegahan setiap rencana kegiatan/usaha untuk dapat melakukan pengelolaan lingkungan melalui AMDAL dan UKL/UPL, penertiban usaha/ kegiatan disekitar DAS, pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan, melakukan program peningkatan kinerja bagi usaha/ industri yang mengacu pada produksi bersih, dan pengendalian pencemaran dengan pengembangan teknologi pengolah air limbah.
5. Peningkatan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan strategi: pengendalian rutin terhadap industri/ kegiatan penyumbang pencemaran udara, melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala, melakukan pencegahan setiap rencana kegiatan/usaha untuk dapat melakukan pengelolaan lingkungan melalui AMDAL dan UKL/UPL, pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan, dan pengelolaan sampah secara optimal.
6. Peningkatan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dilakukan dengan strategi: penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, peningkatan pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati, dan pengendalian dan pengawasan usaha yang tidak sesuai dengan tata guna lahan.
7. Peningkatan nilai Prosentase penanganan dan pengurangan sampah dilakukan strategi: mempersiapkan lokasi TPA baru, penanganan sampah dengan penambahan sarana dan prasarana persampahan, pengurangan sampah dengan penyediaan sarana pengelolaan sampah berbasis masyarakat, monitoring

dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sampah dan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sampah kepada masyarakat.

8. Dalam menangani RTH diperlukan strategi penambahan anggaran agar capaian untuk luasan RTH bisa tercapai dan adanya pendataan RTH yang ada sehingga bisa menghitung kekurangan luas RTH.

Sasaran Strategis-12 : Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Desa Tangguh Bencana Tingkat Madya	2,98% (2 desa)	2,98% (2 desa)	100%
Capaian Kinerja Sasaran Strategis			**100%**

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana mencapai 100% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. Indikator terkait dalam mengukur ketahanan daerah terhadap bencana yaitu dengan melihat Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap bencana. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Magetan masih tergolong tinggi yaitu 152,8 poin, dimana letak geografis dan topografi yang meliputi hutan dan gunung memiliki risiko bencana yang lebih tinggi. Sebaliknya, untuk Indeks Ketahanan Daerah (IKD) masih rendah yaitu 0,41 poin. Kedua indikator ini membutuhkan kerja keras perangkat daerah terkait dan proses edukasi kesadaran bencana yang lebih tinggi. Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Rp. 475.800.000	Rp. 440.103.950	92,50%
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Rp. 121.000.000	Rp. 120.704.000	99,76%
Rata-Rata Serapan Anggaran	**596.800.000**	**560.807.950**	**93,97%**

Rencana pembangunan tingkat Kabupaten/Desa selain harus harus memperhatikan kajian dampak lingkungan juga harus memperhatikan kajian risiko bencana, sehingga kedepan pembangunan mampu mendukung rencana pengelolaan tata ruang untuk lingkungan hidup yang berkelanjutan serta memiliki daya tahan terhadap bencana. Prestasi yang diraih adalah Juara Desa Tangguh Bencana Tingkat Utama, di Tingkat Provinsi Jawa Timur (Desa Tangguh Bencana Genilangit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan). Ada beberapa kendala/penghambat keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Kendala daslam pengembangan capaian Desa Tangguh Bencana Tingkat Madya antara lain: kurangnya minat dan kesadaran generasi muda dalam upaya pengurangan risiko bencana, kurangnya fasilitas yang

dimiliki relawan desa tangguh bencana, dan belum adanya anggaran guna pengadaan fasilitas, pelatihan, dan operasional bagi relawan desa tangguh bencana.

2. Kendala dalam pencapaian Indeks Risiko Bencana (Poin) dan Indeks Ketahanan Daerah (Poin), yaitu: kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana masih kurang, tingkat kerentanan daerah terhadap bencana masih cukup tinggi, dan lemahnya internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di daerah.

Sedangkan, Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi/solusi atas permasalahan tersebut di atas antara lain:

1. Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam penanggulangan bencana.
2. Pelatihan, fasilitasi, dan pembinaan/pengembangan adanya Desa Tangguh Bencana (DESTANA), Sekolah/ Madrasah Aman Bencana (SMAB), Peningkatan Kompetensi Dasar Manajemen Bencana serta Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu-Pasna) kepada masyarakat atau kelompok masyarakat.
3. Kebijakan yang diambil untuk meningkatkan capaian Desa Tangguh Bencana Tingkat Madya, antara lain: memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya generasi muda akan pentingnya budaya sadar bencana, meningkatkan intensitas pembinaan serta pengembangan Desa Tangguh Bencana yang sudah terbentuk, dan mendorong Pemerintah Desa untuk mengalokasikan anggaran guna mendukung kegiatan pengurangan risiko bencana di masing-masing wilayah.
4. Upaya solusi yang diambil untuk meningkatkan capaian Indeks Risiko Bencana (Poin) dan Indeks Ketahanan Daerah (Poin) antara lain: meningkatkan kapasitas aparatur pelaku penanggulangan bencana melalui kegiatan sertifikasi teknis, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis, melakukan berbagai upaya mitigasi bencana melalui mitigasi struktural maupun non struktural, dan sinkronisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD).

Sasaran Strategis-13 : **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan yang Merata untuk semua Wilayah**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks konektivitas	22,54%	25,87%	114,77%
Capaian Kinerja Sasaran Strategis			**114,77%**

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur jalan yang merata untuk semua wilayah mencapai 114,77% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. Pada tahun 2019, dilakukan pemetaan jalan berdasarkan SK Bupati Nomor 188/135/Kept/403.013/2019, sehingga total panjang jalan kabupaten

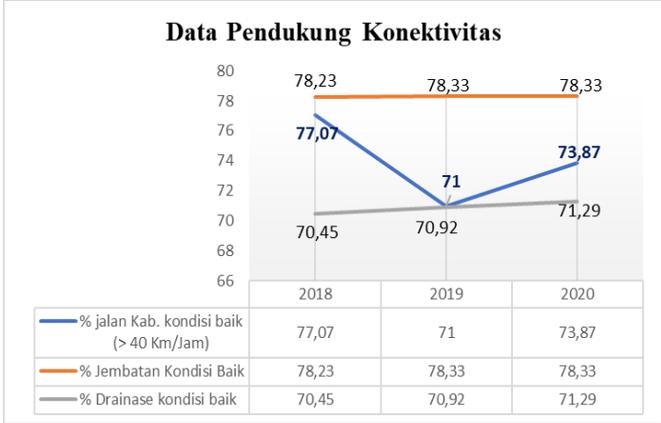

bertambah menjadi 630,25 km dari semula 525,81 km. Indeks Konektivitas ini didukung oleh beberapa indikator antara lain prosentase jalan kabupaten dalam kondisi baik, prosentase jembatan dalam kondisi baik dan prosentase drainase dalam kondisi baik. Secara umum, capaian kinerja ketiga indikator pendukung tersebut menunjukkan angka capaian di atas 70%. Kinerja tertinggi dan konsisten dicapai oleh indikator jembatan dengan capaian kinerja 3 tahun terakhir di atas 78% sampai tahun 2020. Berikutnya adalah capaian kinerja jalan dalam kondisi baik yang fluktuatif, dimana tahun 2019 sempat turun menjadi 71% dan kemudian tahun 2020 naik lagi 73,87%. Secara umum indikator pendukung konektivitas jalan memberikan rata-rata capaian kinerja yang tinggi dalam mendukung kinerja sasaran strategis. Selain memberikan jaminan atas sarana jalan, pemerintah daerah juga memberikan rasa nyaman bagi pengguna angkutan melalui intensifikasi uji kir kendaraan umum. Sejak tahun 2017, jumlah kendaraan yang dilakukan uji kir rata-rata naik 1.370 kendaraan per tahun. Jika pada tahun 2017 sebanyak 2.771 kendaraan diuji kir, maka sampai tahun 2020 melonjak menjadi 6.900 kendaraan. Perangkat Daerah terkait dalam pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perhubungan.

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	23.439.015.650	20.148.341.693	85,96%
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1.619.087.500	158.232.050	9,77%
Program Pembangunan SaluranDrainase/Gorong-gorong	12.147.326.600	11636278078,55	95,79%
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	3.717.536.826	3.211.528.150	86,39%
Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	60.291.771.532	48.144.303.515	79,85%
Program Inspeksi Kondisi jalan dan jembatan	75.000.000	38.362.100	51,15%
Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan	100.000.000	95.025.600	95,03%
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1.750.000.000	1.671.848.281	95,53%
Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Bahan Bangunan	336.799.350	333.926.700	99,15%
Program Peningkatan Penerangan Jalan Umum	15.091.561.200	14.084.937.801	93,33%
Rata-Rata Serapan Anggaran	**118.568.098.658**	**99.522.783.969**	**83,94%**

b. Dinas Perhubungan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	883.133.700	824.955.170	93,41%
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.411.400.000	964.031.433	68,30%
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	13.216.100	10.490.600	79,38%
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	1.663.503.200	1.580.566.520	95,01%
Rata-Rata Serapan Anggaran	**3.971.253.000**	**3.380.043.723**	**85,11%**

Tahun 2020, dilakukan peresmian (*Launching*) Sim Card pada Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dari Buku Uji diganti dengan penerapan Sim Card, agar waktu uji kir kendaraan dapat terpantau dan segera dihubungi oleh kantor uji kir. Dalam proses pencapaian sasaran strategis tersebut, maka beberapa kendala/hambatan masih yang terjadi antara lain sebagai berikut:

1. Kendala pencapaian persentase Angkutan Publik dan Barang yang laik jalan, antara lain: adanya Wabah Corona (Covid-19) berdampak pada tidak beroperasinya kendaraan angkutan pelajar mulai bulan Maret s/d Desember 2020, adanya Wabah Corona (Covid-19) juga berdampak pada pemangkasan anggaran dalam rangka Refocusing APBD Tahun 2020 terkait penanganan pencegahan penyebaran virus corona di Kab. Magetan, dan dampak dari Covid-19 kesadaran masyarakat jadi menurun sehingga banyak kendaraan tidak diujikan.
2. Kendala pencapaian indikator persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Kelengkapan Jalan, yaitu adanya Wabah Corona (Covid-19) juga berdampak pada pemangkasan anggaran program prasarana kelengkapan jalan (rambu-rambu) dalam rangka Refocusing APBD Tahun 2020 terkait penanganan pencegahan penyebaran virus corona di Kab. Magetan.

Sedangkan, Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi/solusi atas permasalahan tersebut di atas antara lain:

1. Kebijakan yang diambil terhadap penanganan jumlah pelanggaran lalu lintas adalah dengan mengintensifkan jumlah kegiatan operasi pengawasan dan pengendalian kendaraan lalu lintas di jalan ditingkatkan.
2. Kebijakan peningkatan kinerja persentase Angkutan Publik dan Barang yang laik jalan adalah melalui memberikan jaminan keamanan bagi pengguna angkutan khususnya siswa-siswi sekolah sebagai pengguna angkutan pelajar dan perlu diadakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis Mobil Uji Keliling ke daerah – daerah di Kab. Magetan.
3. Solusi terhadap pencapaian persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Kelengkapan Jalan, adalah mengusulkan bantuan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Perhubungan terkait ketersediaan prasarana perlengkapan jalan di Kab. Magetan.

Sasaran Strategis-14 : **Meningkatnya kualitas jaringan irigasi.**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase Lahan yang Terlayani Irigasi	92,93%	93,19%	100,28%
Capaian Kinerja Sasaran Strategis			**100,28%**

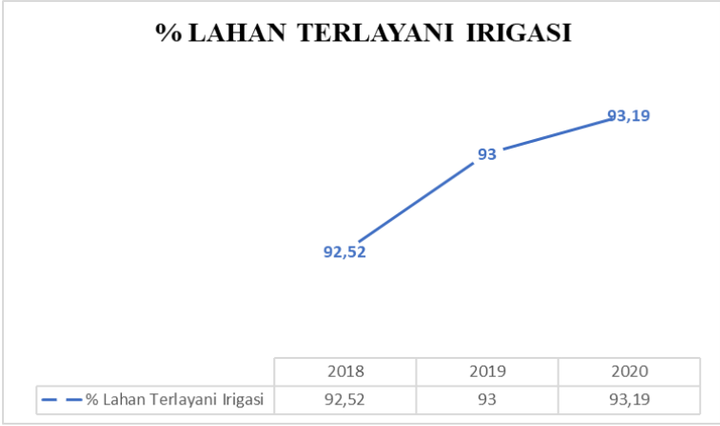

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya kualitas jaringa irigasi mencapai 100,28% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. Luas lahan dengan saluran irigasi kondisi baik dan terpenuhi air irigasi seluas 76.728 Ha. Tahun 2020, sebanyak 93,19% dari total luas baku sawah yaitu 82.338 Ha atau seluas 76.728 Ha, tercukupi air irigasi Musim Hujan + Luas baku sawah tercukupi air irigasi Musim Kemarau I + Luas Luas baku sawah tercukupi air irigasi Musim Kemarau II dibagi Tiga kali Luas Baku Sawah seluruhnya. Jumlah prosentase lahan pertanian yang terairi oleh irigasi teknis sepanjang tahun terus meningkat rata-rata 0,34% per tahun. Tahun 2018 sebanyak 92,52% atau 76.179 Ha luas sawah terairi irigasi teknis sepanjang tahun, yang angkanya terus meningkat sampai tahun 2020 sebanyak 93,19% atau 76.728 Ha. Capaian kinerja ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mendorong sistem pertanian yang intensif melalui penyediaan air irigasi teknis rutin sepanjang tahun telah dilakukan. Dampaknya, meski di masa Pandemi Covid-19, hasil produksi pertanian dan nilai PDRB Sektor Pertanian tetap meningkat 3,79% tahun 2020 menjadi Rp. 5.744,39 milyar. Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan realisasi program-program pendukung sasaran strategis adalah:

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	20.118.953.631	19.048.730.804	94,68%
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	2.959.050.000	2.821.362.398	95,35%
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	7.393.736.200	6.198.909.244	83,84%
Program Pengendalian Banjir	1.813.375.000	1.776.929.254	97,99%
Rata-Rata Serapan Anggaran	**32.285.114.831**	**29.845.931.700**	**92,44%**

Beberapa kendala/hambatan yang masih ada terjadi dalam pencapaian sasaran strategis yaitu situasi musim yang tidak menentu berdampak pada rendahnya debit air irigasi untuk pengairan teknis dan koordinasi dengan gabungan kelompok tani yang belum berjalan dengan baik dan akibat terdampak realokasi anggaran untuk penanganan covid-19, sehingga target rehabilitasi/pembangunan sumur air tanah dalam dikurangi, sehingga menyebabkan suplai air irigasi untuk Musim Kemarau I dan Musim Kemarau II kurang mencukupi untuk beberapa area sawah.

Sedangkan, upaya yang telah dilakukan adalah melakukan sinergi kebijakan lintas sektor untuk penghijauan sumber mata air dan koordinasi dengan gapoktan untuk sistem pembagian air. Terkait dengan pemenuhan dan penataan irigasi, maka untuk meningkatkan pemenuhan air irigasi ke seluruh area sawah maka dilakukan melaksanakan koordinasi dengan stakeholder pengguna air irigasi dan disepakati ada giliran air irigasi untuk mencukupi kebutuhan tanaman dan mengarahkan/mengatur jenis pola tanam sesuai ketersediaan air irigasi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Magetan serta mensosialisasikan kepada petani dan stakeholder terkait.

Sasaran Strategis-15 : **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Opini BPK	WTP	WTP	100%
Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,2	2,86	130%
Hasil Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	BB	B (68,94)	91,92%
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	80,84	103,64%
Capaian Kinerja Sasaran Strategis			**106,39%**

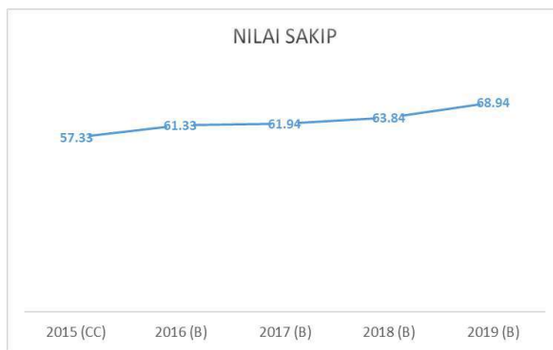

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pelayanan public yang efektif mencapai 100% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 4 (empat) indikator. Capaian kinerja setiap indikator menunjukkan angka yang cenderung meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir, antara lain capaian Nilai SAKIP dan Nilai IKM Kabupaten Magetan selalu menunjukkan tren naik. Capaian kinerja perkembangan nilai SAKIP dan Nilai IKM Kabupaten Magetan dari tahun 2015 hingga tahun 2020 selalu meningkat, terakhir adalah 80,84 poin. Meskipun hasil evaluasi AKIP Pemkab Magetan tetap B, apabila dibandingkan dengan tahun 2018, di tahun 2019 ada kenaikan nilai, di tahun 2018 nilai 63,84 sedangkan di tahun 2019 naik menjadi 68,94 ada kenaikan sebesar 5,10 angka dan hanya kurang 1,07 untuk mencapai BB.

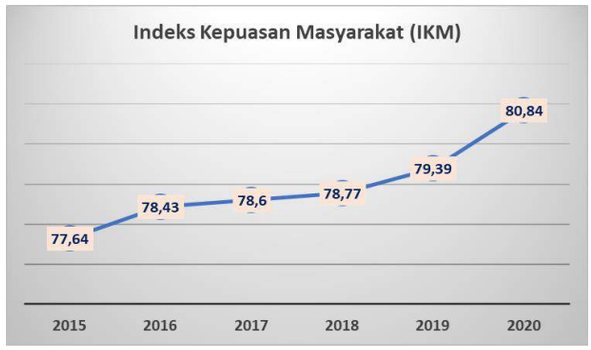

Dalam rangka mengoptimalkan capaian kinerja perolehan Opini BPK dan nilai SAKIP, maka Inspektorat menyusun rencana aksi tata kelola yang meliputi 5 rencana aksi, yaitu *pertama*, mengoptimalkan Tim Pendampingan evaluasi SAKIP tingkat Kabupaten Magetan dan secara aktif memberikan perbaikan kualitas SAKIP. *Kedua*, menyusun, mereviu, dan menyempurnakan Peta Proses Bisnis, IKU dan lKl setiap OPD dan memastikannya sudah lebih spesifik, relevan, terukur, dan unik yang menggambarkan efektivitas. *Ketiga*, alasan keberadaan pemilik IKU dan lKl tersebut dan memastikan dimanfaatkannya IKU pada proses (dalam dokumen) perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi. *Keempat*, menyusun LAKIP yang menyajikan perbandingan antara realisasi capaian target dengan standar nasional, dan *kelima*, memperhatikan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan sampai dengan saat ini.

Terkait dengan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan, Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah dengan didukung seluruh perangkat daerah mampu menyusun laporan keuangan dengan tepat waktu selama 5 tahun berturut, sehingga mampu mempertahankan opini WTP dari BPK selama 5 tahun berturut-turut. Selain itu, berbagai aplikasi juga dikembangkan dalam meningkatkan intensifikasi dan kontrol atas penerimaan pajak daerah misalnya dengan implementasi e-PBB (Softeware aplikasi sistem Pajak Bumi dan Bangunan) dan e-BPHTB (software aplikasi untuk penerimaan dan pengendalian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) di tahun 2020. Sampai dengan tahun 2020, jumlah aplikasi software yang diterapkan dalam rangka e-government adalah 51 aplikasi sistem yang naik dibandingkan tahun 2019 yaitu 20 aplikasi atau naik sebanyak 31 aplikasi sistem. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magetan sangat agresif dalam pengembangan e-government terutama bagi pelayanan. Beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Inspektorat, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta Dinas Komunikasi dan Informatika, realisasi program-program pendukung sasaran strategis:

a. Sekretariat Daerah

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.760.000.000	2.760.000.000	100%
Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pemerintah Daerah	148.000.000	148.000.000	100%
Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur	77.723.000	77.723.000	100%
Survey Kepuasan Masyarakat	836.490.250	836.490.250	100%
Rata-Rata Serapan Anggaran	**3.822.213.250**	**3.822.213.250**	**100%**

b. Inspektorat

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH	109.775.000	92.087.750	83,89
Program Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	49.775,000	42,658,750	85,70
Program Reviu SAKIP	60.000.000	49.429.000	82,38
Rata-Rata Serapan Anggaran	**219.550.000**	**184.175.500**	**83,89%**

c. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Aset Daerah	1.370.462.040	1.153.868.641	84,20%
Program Perencanaan Penyusunan Monitoring Anggaran Daerah	780.739.770	598.635.438	76,68%
Program Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	537.441.650	456.930.185	85,02%
Program Pengelolaan Akuntansi dan Lapaoran Keuangan Daerah	452.500.000	444.276.221	98,18%
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.130.000.000	926.047.200	81,95%
Program Peningkatan Pendapatan Daerah	1.550.000.000	1.511.213.980	97,50%
Rata-Rata Serapan Anggaran	**5.821.143.460**	**5.090.971.665**	**87,46%**

d. Badan Kepegawaian Daerah

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur	217.223.000	100.055.098	46,06%
Program Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	1.196.610.250	857.105.085	71,63%
Program Pengelolaan Purna Tugas ASN	67.390.500	45.242.095	67,13%
Program Perencanaan, Pengadaan dan sistem Informasi kepegawaian	1.817.550.000	119.234.497	6,56%
Program Pedidikan Kedinasan	851.170.000	211.484.312	24,85%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	527.000.000	398.304.357	75,58%
Rata-Rata Serapan Anggaran	**4.676.943.750**	**1.731.425.444**	**37,02%**

e. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.583.170.100	1.338.591.716	84,55%
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	670.000.000	666.137.654	99,42%
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	102.125.000	100.967.522	98,87%

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	547.000.000	541.436.817	98,98%
Program Perencanaan Bidang Pemerintahan	23.000.000	22.400.450	97,39%
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	357.002.550	332.297.700	93,08%
Program Pengembangan Data / Informasi	108.246.500	105.192.800	97,18%
Rata-Rata Serapan Anggaran	**3.390.544.150**	**3.107.024.659**	**91,64%**

f. Dinas Komunikasi dan Informatika

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program pengelolaan aplikasi informatika	2.757.000.000	2.599.094.057	94,27%
Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	85.000.000	22.520.050	26,49%
Program Peningkatan Tatakelola Komunikasi dan Informatika	297.233.050	287.148.700	96,61%
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.287.393.955	1.111.820.658	86,36%
Rata-Rata Serapan Anggaran	**4.426.627.005**	**4.020.583.465**	**90,83%**

Beberapa capaian kinerja telah diraih dalam meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Magetan. Beberapa catatan penting pencapaian kinerja ini adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Magetan telah menunjukkan berbagai upaya untuk peningkatan budaya kinerja. Hal ini terlihat dari penyusunan dokumen terkait kinerja, yaitu RPJMD dan Renstra yang lebih baik;
2. Pimpinan dan para Kepala OPD sudah mulai menunjukkan komitmennya untuk peningkatan penerapan SAKIP Kabupaten Magetan;
3. Pemerintah Kab. Magetan telah menjabarkan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada RPJMD dengan baik ke Renstra OPD, dan akan disusul dengan penyusunan peta proses bisnis organisasi dan *crosscutting* pencapaian kinerja pada RPJMD belum sepenuhnya dituangkan dalam dokumen perencanaan;
4. Pemerintah Kab. Magetan telah menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja sampai level pelaksana dan akan terus dilakukan monitor secara periodik dan belum dimanfaatkan sebagai bentuk rencana aksi untuk menyimpulkan kinerja dan keberhasilan Pemerintah Kab. Magetan dan OPD terkait;
5. Sudah banyak usaha yang dilakukan untuk meningkatkan nilai AKIP ini. Mulai dengan melakukan studi banding dengan PEMDA yang nilai AKIP nya A, konsultasi/aistensi dengan Biro Organisasi Setda Pemprov Jatim, rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan, Verifikasi dan Reviu dokumen-dokumen perencanaan, Evaluasi LAKIP, Reviu SAKIP sampai dengan meluncurkan aplikasi E-SAKIP yang sudah terintegrasi.
6. Dalam bidang pengembangan dan penguatan e-government, maka Dinas Komunikasi dan Informatika sudah menyusun rencana aksi pengembangan TIK daerah, antara lain: peningkatan SDM TIK, penyusunan regulasi terkait pelaksanaan E-Governmen Kabupaten Magetan Khususnya TIK, pembangunan Jaringan FIXED BROADBAND (FO), optimalisasi Data Center Kab. Magetan,

peningkatan infrastruktur dan kualitas pengamanan informasi, dan peningkatan SDM pentingnya keamanan informasi.

Hambatan / strategi dalam mencapai target sasaran:

1. Hambatan dalam meningkatkan pencapaian nilai AKIP OPD, yaitu bahwa secara hasil (target) indikator sudah terpenuhi, namun dalam proses pelaksanaan, khususnya pengumpulan data dari SKPD, kurangnya koordinasi dan kerjasama sehingga memperlambat dalam proses review dan secara hasil nilai rata – rata sudah sesuai target, namun masih terdapat beberapa SKPD yang nilainya masih rendah, hal ini dikarenakan baik dokumen rencana, pelaksanaan, maupun pelaporan kualitasnya masih rendah.
2. Koordinasi terkait dengan distribusi tanggung jawab atas capaian kinerja indikator sasaran antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan daerah dengan perangkat daerah *leading sector* masih kurang bagus, sehingga beberapa indikator kinerja sasaran kesulitan untuk memperoleh data.
3. Kendala dalam meningkatkan Indeks Kematangan Keamanan Informasi antara lain jumlah kuantitas dan kualitas SDM dalam Bidang Persandian belum mencukupi dan belum adanya SOP terkait Keamanan Informasi.

Beberapa straregi kebijakan dan rencana dalam meningkatkan capaian nilai SAKIP dan Opini BPK tersebut, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai bidang tugas dan fungsi yang tergabung dalam Tim SAKIP (Bappeda Litbang, Inspektorat, Bagian Organisasi);
2. Mendorong kepada SKPD untuk meningkatkan kualitas AKIP dan melakukan perbaikan sebagaimana rekomendasi;
3. Meningkatkan kualitas SAKIP Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dengan tetap meminta asistensi/pendampingan dari Kementerian PANRB ataupun Biro Organisasi Setda Provinsi Jatim.
4. Mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran melalui aplikasi SIPD yang dikelola oleh Kemendagri
5. Rencana aksi kedepan kami akan berkoordinasi dengan Bappeda Litbang agar nilai komponen pengukuran kinerja lebih baik lagi.
6. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dalam meningkatkan nilai Capaian SAKIP melalui sinkronisasi dan koordinasi intensif mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses pelaporan kinerja.
7. Inspektorat telah memiliki Klinik “MAMA (Magetan Menuju Zona Aman)” dengan kepanjangan Magetan Menuju Zona Aman, merupakan wadah konsultasi bagi SKPD mengenai permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dalam tata kelola keuangan/aset.
8. Akan dilakukan evaluasi secara kontinyu dan berkelanjutan terhadap AKIP SKPD.
9. Strategi peningkatan capaian nilai AKIP OPD dilakukan dengan mengkoordinasikan baik kepada seluruh SKPD maupun kepada SKPD yang memiliki tanggung jawab dalam membina SKPD lain dalam hal penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan agar penyusunannya sesuai standar

yang berlaku dan dilakukan pendampingan dan memastikan semua rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya sudah di tindak lanjuti oleh SKPD.

10. Intensifikasi berbagai pelatihan sesuai spesifikasi pekerjaan dan aplikasi sistem yang dilaksanakan dan penyusunan SOP sesuai proses bisnis.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- Perpres Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020
- Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor : 76/PMK.07/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 151/PMK.07/2020 tanggal 08 Oktober 2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Periode Ketiga
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 19/Pmk.07/2020 Tanggal 08 Oktober 2020 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Perda Jawa Timur No. 14 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang APBD Prov. Jatim Tahun 2020
- Pergub Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Prov. Jatim Tahun 2020

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Magetan mendapatkan 2 (dua) tugas pembantuan dari pusat. Tugas tersebut berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan total anggaran sebesar Rp. 50.934.547.479,- dialokasikan untuk 10 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan serta tugas dari Kementerian Perdagangan **…….** Dengan total anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- dialokasikan untuk 1 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan. Kemudian tugas dari Pemerintah Provinsi dibidang Urusan Pemerintahan Umum dengan total anggaran Rp. 50.000.000,- untuk 1 (kegiatan) dan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Magetan.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Kementerian Pekerjaan Umum	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor : 76/PMK.07/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 Perpres Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kegiatan : Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Keluaran : 240 Sambungan Rumah (SR) Rincian Kegiatan : Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Air Bersih	Kab. Magetan	Dinas PUPR	800,091,000	592,860,000	74.10	240 SR	100	-
2	Kementerian Pekerjaan Umum	1. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor : 76/PMK.07/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 2. Perpres Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan : Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (DAK) Keluaran : 12 Lokasi Rincian Kegiatan : Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Kab. Magetan	Dinas PUPR	26,371,269,936	19,824,288,600	75.17	12 Lokasi	100	-
3	Kementerian Pekerjaan Umum	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor : 76/PMK.07/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 Perpres Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Kegiatan : Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi I (DAK) Keluaran : 8 Lokasi	Kab. Magetan	Dinas PUPR	3,048,094,943	2,443,613,000	80.17	8 Lokasi	100	-

			Rincian Kegiatan : Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan/Saluran Irigasi Kabupaten								
4	Kementerian Pekerjaan Umum	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor : 151/PMK.07/2020 tanggal 08 Oktober 2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Periode Ketiga	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kegiatan : Penyediaan prasarana dan sarana air minum (DID Tambahan) Keluaran : 3 Lokasi Rincian Kegiatan : Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih	Kab. Magetan	Dinas PUPR	700,000,000	685,252,000	97.89	3 Lokasi	100	-
5	Kementerian Pekerjaan Umum	Peraturan Kementerian Keuangan (Pmk) Nomor : 19/Pmk.07/2020 Tanggal 08 Oktober 2020 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kegiatan : Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DID Tambahan) Keluaran : 4 Lokasi Rincian Kegiatan : Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah (Sanitasi)	Kab. Magetan	Dinas PUPR	800,000,000	782,640,000	97.83	4 Lokasi	100	-
6	Kementerian Pekerjaan Umum	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor : 151/PMK.07/2020 tanggal 08 Oktober 2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Periode Ketiga	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar/ Saluran/ Drainase (DID Tambahan) Keluaran : 11 Lokasi Rincian Kegiatan : Peningkatan dan Rehabilitasi Trotoar	Kab. Magetan	Dinas PUPR	3,621,826,600	3,386,314,000	93.50	11 Lokasi	100	-
7	Kementerian Pekerjaan Umum	Peraturan Kementerian Keuangan (Pmk) Nomor : 19/Pmk.07/2020 Tanggal 08 Oktober 2020 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kab. Magetan	Dinas PUPR	11,660,000,000	9,632,406,900	82.61	35 Lokasi	100	-

		Disease 2019 (Covid-19)	Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Jalan (DID Tambahan) Keluaran : 35 Lokasi Rincian Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten								
8	Kementerian Pekerjaan Umum	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor : 151/PMK.07/2020 tanggal 08 Oktober 2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Periode Ketiga	Program Peningkatan Penerangan Jalan Umum Kegiatan : Pembangunan Jaringan Penerangan Jalan Umum (DID Tambahan) Keluaran : 1 Paket Rincian Kegiatan : Pemasangan Jaringan PJU	Kab. Magetan	Dinas PUPR	1,200,000,000	1,194,442,090	99.54	1 Paket	100	-
9	Kementerian Pekerjaan Umum	Peraturan Kementerian Keuangan (Pmk) Nomor : 19/Pmk.07/2020 Tanggal 08 Oktober 2020 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Kegiatan : Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana Jaringan Irigasi (DID Tambahan) Keluaran : 13 Lokasi Rincian Kegiatan : Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan/Saluran Irigasi Kabupaten	Kab. Magetan	Dinas PUPR	2,533,265,000	2,500,135,545	98.69	13 Lokasi	100	-
10	Kementerian Pekerjaan Umum	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor : 151/PMK.07/2020 tanggal 08 Oktober 2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Periode Ketiga	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Kegiatan : Rehabilitasi Pintu Air (DID Tambahan) Keluaran : 8 Lokasi Rincian Kegiatan : Rehabilitasi / Perbaikan Pintu Air	Kab. Magetan	Dinas PUPR	200,000,000	198,760,000	99.38	8 Lokasi	100	-

11	Kementerian Perdagangan		Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kab. Magetan	Dinas Indag	3.000.000.000					

Sumber data : Dinas PU PR dan Dinas Indag Kab. Magetan

3.2 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1.	Urusan Pemerintahan Umum	Perda Jawa Timur No. 14 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang APBD Prov. Jatim Tahun 2020 Pergub Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD prov. Jatim Tahun 2020	Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara (Bantuan Propinsi) Rincian Kegiatan Pelaksanaan peringatan Hari Jadi Propinsi Keluaran (Output) Jumlah kegiatan provinsi yang difasilitasi (1 kali)	Kab. Magetan	Bagian Adm. Kesra	50,000,000	50,000,000	100.00%	1 kali	100%	

Sumber data : Bagian Kesra Setdakab. Magetan

3.3 Permasalahan dan Kendala

- Kurang jelasnya rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Provinsi di Kabupaten Magetan pada waktu anggaran diberikan
- Waktu penyaluran DAK Bidang Air Minum 2020 (DAK Cadangan) pada Triwulan III Tahun 2020 membuat pelaksanaan pekerjaan berpacu dengan waktu yang tersisa sampai dengan akhir tahun anggaran, meski demikian pekerjaan dapat dilaksanakan tepat waktu (tidak melampaui tahun anggaran berjalan)
- Waktu penyaluran DAK Bidang Jalan 2020 (DAK Cadangan) pada Triwulan III Tahun 2020 membuat pelaksanaan pekerjaan berpacu dengan waktu yang tersisa sampai dengan

akhir tahun anggaran, meski demikian pekerjaan dapat dilaksanakan tepat waktu (tidak melampaui tahun anggaran berjalan)

- Waktu penyaluran DAK Bidang Irigasi 2020 (DAK Cadangan) pada Triwulan III Tahun 2020 membuat pelaksanaan pekerjaan berpacu dengan waktu yang tersisa sampai dengan akhir tahun anggaran, meski demikian pekerjaan dapat dilaksanakan tepat waktu (tidak melampaui tahun anggaran berjalan)
- Dana DID Periode Ketiga disalurkan pada Awal November, sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan sangat terbatas
- Dana DID Periode Kedua disalurkan pada pertengahan Oktober, sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan cukup terbatas

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

- Perlu adanya petunjuk khusus rencana kegiatan dari leading sektor peringatan Hari Jadi Provinsi yang ada di Setdaprov Jatim sebelum RKA dibuat sehingga pada waktu
- Penyaluran DAK sebaiknya dilaksanakan paling lambat pada akhir Semester 1 (Triwulan II), sehingga ada cukup waktu jika dalam pelaksanaan pekerjaan menghadapi kendala/permasalahan yang berisfat teknis maupun non teknis.
- Jenis pekerjaan diarahkan pada pekerjaan - pekerjaan yang sekiranya dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran, sebaiknya dalam penyaluran Dana DID juga mmeperhitungkan waktu pelaksanaan pekerjaan.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahaan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Pendidikan antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan
1	Pendidikan Dasar
2	Pendidikan Kesetaraan
3	Pendidikan Anak Usia Dini

Sumber data : Dinas Dikpora Magetan

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Adapun target pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan adalah sebagaimana berikut:

No	PelayananDasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI,SMP/MTs)	100%	2020
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	0,33%	2020
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	97,75%	2020

Sumber data : Dinas Dikpora Magetan

4.1.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Adapun realisasi pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan adalah sebagaimana berikut:

Tabel 4.1
Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

No	PelayananDasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	76.574	78.589	97,44%	Jumlah Warga Kabupaten/Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, MP/MTs)_____ Jumlah Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	343	105.142	0,33%	Jumlah Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yangbelum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesataraan_____ Jumlah Warga Kabupaten Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah

No	PelayananDasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga KabupatenUsia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	16.190	17.538	92,31 %	Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6Tahun

Sumber data : Dinas Dikpora Magetan

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pendidikan Antara lain :

No	Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Pendidikan Dasar	87.995.094.000,00
2.	Pendidikan Kesetaraan	2.845.712.000,00
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	3.017.520.000,00

Sumber data : Dinas Dikpora Magetan

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pendidikan antara lain :

No	**Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan**	**DukunganPersonil**
1	Pendidikan Dasar	279 PNS 3 NON PNS
2	Pendidikan Kesetaraan	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	

Sumber data : Dinas Dikpora Magetan

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan Langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SPM di Bidang Pendidikan antara lain :

1. Kondisi bangunan ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat bangunan yang rusak, kondisi tersebut secara langsung berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar;
2. Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1;
3. Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pada jenjang Sekolah Dasar akibat masih ada kekurangan tenaga guru;

4. Standar Kompetensi tenaga Pendidik dan Kependidikan masih perlu diupayakan standar Nasional;
5. Pencapaian Indeks Pendidikan dan Rata-Rata Lama Sekolah belum mencapai target Tahun 2020 sebagai indikasi penuntasan wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun.

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM bidang Pendidikan antara lain :

1. Optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah;
2. Memberikan kesempatan pendidikan penyetaraan S1/D4, baik yang dibiayai pemerintah maupun swadaya murni para guru;
3. Melalui pemeratan di tingkat kecamatan dan menekan adanya perpindahan dari SD yang kurang guru ke sekolah yang sudah memenuhi kecukupan guru;
4. Melakukan optimalisasi kegiatan PKG dan PKB;
5. Melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi ke daerah-daerah untuk memantau dan memotivasi program kesetaraan bagi penduduk yang belum menempuh wajib belajar 12 Tahun

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, bahwa SPM Bidang kesehatan terdiri dari 12 jenis pelayanan yaitu:

1) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4) Pelayanan kesehatan balita;
5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8) Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi;
9) Pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus;
10) Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11) Pelayanan Kesehatan orang dengan TB;
12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Indikator dan target capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatan layanan kesehatan	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat terlayani kesehatan	100
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah warga negara terduga *tuberculosis* yang mendapatkan layanan kesehatan	80
12	Pelayanan kesehatan orang	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya	100

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (%)
	dengan risiko terinfeksi HIV	tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficicency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan	

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan

4.2.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Adapun Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Magetan pada tahun 2020 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Magetan Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET/ SASARAN	HASIL/ REALISASI TW IV	CAPAIAN KINERJA Triwulan IV
			(A)	(B)	(A/B)(%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	8.500	8.064	94,9
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	8.113	8.133	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	7.727	8.004	100
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatan layanan kesehatan	30.308	32.219	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	85.381	74.021	87
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	382.226	278.199	72,78

7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	127.768	95.913	75
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	205.528	114.152	56
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	13.260	16.244	100
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat terlayani kesehatan	1.195	1.528	100
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah warga negara terduga *tuberculosis* yang mendapatkan layanan kesehatan	2.084	1.800	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficicency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan	13.193	12.657	96
Rata-Rata Prosentase Pencapaian SPM Kesehatan			88,9%		

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan

Tabel 4.4

Rekapitulasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Kesehatan Kabupaten Magetan triwulan IV Tahun 2020

Tingkat Capaian	Jumlah Indikator	Persentase
A. 1 0 0 %	8	66,7
A. < 90 %	4	33,3
Jumlah Total	12	100%

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 12 indikator SPM bidang kesehatan, ada 6 indikator SPM bidang kesehatan yang telah memenuhi target dengan capaian 100%, dan terdapat 6 indikator SPM bidang kesehatan yang tingkat capaiannya pada tahun 2020 <100%.

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Dukungan personil di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Magetan Tahun 2020

No	Puskesmas	Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2020				
		Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Tenaga Kesehatan Lainnya
1	Poncol	3	20	19	3	3
2	Parang	2	27	19	2	4
3	Lembeyan	3	13	17	2	6
4	Takeran	2	23	20	1	10
5	Gorang Gareng Taji	2	15	13	2	31
6	Kawedanan	3	26	19	1	23
7	Tladan	2	14	15	1	5
8	Candirejo	3	11	18	1	9
9	Ngariboyo	2	18	20	1	18
10	Plaosan	3	9	14	2	10
11	Sumberagung	3	18	11	2	5
12	Sidokerto	2	10	16	2	3
13	Panekan	4	28	27	1	9
14	Sukomoro	3	20	19	2	10
15	Bendo	1	14	19	1	18
16	Maospati	3	25	12	2	11
17	Ngujung	2	14	10	2	4
18	Karangrejo	3	16	19	2	7
19	Taji	3	14	13	1	13
20	Tebon	1	12	17	1	8
21	Rejomulyo	2	17	14	0	7
22	Kartoharjo	3	13	16	0	6

Jumlah	55	377	367	32	220

**) Data per tanggal 16 Juli 2020*

Sumber data; Dinas kesehatan Kab. Magetan

4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

Dukungan personil di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.5

Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Magetan Tahun 2020

No	Puskesmas	Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2020				
		Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Tenaga Kesehatan Lainnya
1	Poncol	3	20	19	3	3
2	Parang	2	27	19	2	4
3	Lembeyan	3	13	17	2	6
4	Takeran	2	23	20	1	10
5	Gorang Gareng Taji	2	15	13	2	31
6	Kawedanan	3	26	19	1	23
7	Tladan	2	14	15	1	5
8	Candirejo	3	11	18	1	9
9	Ngariboyo	2	18	20	1	18
10	Plaosan	3	9	14	2	10
11	Sumberagung	3	18	11	2	5
12	Sidokerto	2	10	16	2	3
13	Panekan	4	28	27	1	9
14	Sukomoro	3	20	19	2	10
15	Bendo	1	14	19	1	18
16	Maospati	3	25	12	2	11
17	Ngujung	2	14	10	2	4
18	Karangrejo	3	16	19	2	7
19	Taji	3	14	13	1	13

20	Tebon	1	12	17	1	8
21	Rejomulyo	2	17	14	0	7
22	Kartoharjo	3	13	16	0	6
Jumlah		55	377	367	32	220

**) Data per tanggal 16 Juli 2020*

Sumber data; Dinas kesehatan Kab. Magetan

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam upaya pencapaian target SPM bidang kesehatan yang dilaksanakan jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan selama triwulan IV tahun 2020, terdapat 6 indikator yang masih <100%. Berikut kami paparkan permasalahan yang dihadapi serta solusi yang telah dilaksanakan selama tahun 2020.

a. Permasalahan

Indikator SPM yang paling rendah capaiannya pada Triwulan IV tahun 2020 adalah Puskesmas Panekan dengan capaian sebesar 55,88%. Beberapa indikator yang capaian <100% yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia usia lanjut, pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi, pelayanan kesehatan orang dengan tuberculosis dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Permasalahan tidak tercapainya indikator SPM di puskesmas se-kabupaten Magetan antara lain :

1. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar masih kurang dari target 75% tercapai 87% dengan kesenjangan 13%. Berdasarkan analisa permasalahan yang dilakukan, masih rendahnya capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar disebabkan oleh :

a. Pandemi covid-19 membuat kegiatan belajar mengajar pembelajarannya secara daring dan luring, sehingga pelaksanaan skrining mengalami kendala yang cukup signifikan.

Solusi yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 adalah :

a. Melakukan pelayanan kesehatan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai protokol kesehatan. Pelaksanaan pelayanan menyesuaikan jadual masuknya kegiatan belajar mengajar.
b. Membuat format lembar skrening kesehatan yang bisa di isi secara online oleh siswa tanpa harus tatap muka dengan petugas kesehatan.

2. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar pada tahun 2020 belum mencapai target (100%) dengan capaian kinerja 72,78% dengan kesenjangan sebesar

27,22%. Berdasarkan analisa permasalahan yang dilakukan, masih rendahnya capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

a. Masih rendah pengetahuan masyarakat terhadap terhadap skrining/penapisan terhadap penyakit yang dicegah dengan perubahan gaya hidup.
b. Pada saat jadwal pelaksanaan skrining di jaringan / desa sebagian besar sasaran tidak hadir karena bekerja.
c. Masih kurangnya sarana pemeriksaan laboratorium (reagen pemeriksaan gula darah) di posbindu
d. Pelaksanaan kegiatan Posbindu PTM belum optimal karena adanya Pandemi Covid-19

Solusi yang telah dilakukan ;

a. Melaksanakan penyuluhan keliling untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama penduduk usia produktif yang dilakukan oleh tim promosi kesehatan puskesmas.
b. Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor (dalam hal ini pemerintah desa/perangkat desa) untuk menganggarkan pengadaan reagen pemeriksaan gula darah.
c. Melaksanakan kunjungan rumah untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada usia produktif dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

3. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Pada bulan tahun 2020 capaian pelayanan kesehatan lansia (berusia 60 tahun ke atas) yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun belum mencapai target 100%. Capaian pelayanan kesehatan lansia sesuai standar pada tahun 2020 sebesar 75% dengan kesenjangan sebesar 25%. Berdasarkan analisa permasalahan yang dilakukan, masih rendahnya capaian program pelayanan lansia (berusia 60 tahun ke atas) yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu setahun, dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

a. Akibat pandemi covid 19, pelaksanaan posyandu lansia terkendala sehingga jumlah kunjungan menurun
b. Banyak lansia (sakit) atau hidup sendiri
c. Banyak lansia sakit yang takut untuk berobat ke Pelayanan kesehatan karena ada himbauan untuk tidak berkunjung ke pelayanan kesehatan jika tidak darurat.

Solusi yang telah dilakukan :

a. PJ pelayanan kesehatan lansia Puskesmas berkoordinasi dengan penanggungjawab desa melakukan kunjungan ke rumah lansia yang sakit atau lansia yang hidup sendiri dengan tetap menjalankan protokol
b. Koordinasi dengan kader lansia tiap pos untuk mendata atau memantau kondisi lansia yang hidup sendiri atau lansia sakit
c. Melaksanakan pelayanan posyandu lansia dengan menerapkan protokol kesehatan

4. **Pelayanan kesehatan penderita hipertensi**;

Pada bulan September tahun 2020 capaian pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sesuai standar belum mencapai target 100% . Capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar sebesar 56% dengan kesenjangan sebesar 44%. Berdasarkan analisa permasalahan yang dilakukan, masih rendahnya capaian program pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

a. Kurangnya kunjungan rutin penderita hipertensi ke Puskesmas karena pandemi covid-19
b. Pengetahuan masyarakat tentang penyakitnya masih kurang yang berakibat kesadaran memeriksakan diri secara rutin masih rendah
c. Penyuluhan tentang penyakit hipertensi belum dilakukan secara optimal karena sarana penyuluhan belum memadai
d. Kerjasama Penanggungjawab rawat jalan dengan Penanggungjawab Jaringan & Jejaring serta Penanggungjawab Keluarga Sehat belum optimal

Solusi yang telah dilakukan :

a. Petugas memberikan penyuluhan keliling tentang penyakit hipertensi
b. Menyebarluaskan leaflet hipertensi sebagai sarana penyuluhan
c. Melaksanakan koordinasi & komunikasi dengan Penanggungjawab Keluarga Sehat dan Penanggungjawab Jaringan & Jejaring dalam memberikan pelayanan pada penderita hipertensi
d. Menyediakan pelayanan hipertensi di Puskesmas Pembantu
e. Melaksanakan kunjungan rumah pada penderita hipertensi untuk melaksanakan pemeriksaan dan motivasi untuk kontrol secara teratur ke fasilitas kesehatan

5. **Pelayanan kesehatan pada penderita Tuberculosis;**

Pada tahun 2020 capaian kesehatan pada penderita Tuberculosis belum mencapai target 100%. Capaian kesehatan pada penderita tuberculosis sebesar 86% dengan kesenjangan sebesar 14%. Berdasarkan analisa permasalahan yang dilakukan, masih rendahnya capaian kesehatan pada penderita tuberculosis, antara lain disebabkan oleh :

Pada saat dilakukan skrening pada orang yang terduga TB sulit untuk dilakukan pemeriksaan dahak, masih ada suspect tidak kembali untuk menyerahkan dahak karena alasan tidak bisa mengeluarkan dahak

Solusi yang telah dilakukan :

a. Meningkatkan kerjasama dengan PJ Desa, lintas program, lintas sektor;
b. Melaksanakan kegiatan skrening pada orang yang kontak erat dengan penderita TB.
c. Penyuluhan TBC
d. Pelacakan kasus kontak TBC

6. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV

Pada tahun 2020 capaian kesehatan orang dengan risiko HIV belum mencapai target 100%. Capaian kesehatan orang dengan risiko HIV sebesar 96% dengan kesenjangan sebesar 4%. Berdasarkan analisa permasalahan yang dilakukan, belum tercapainya cakupan tersebut antara lain disebabkan oleh berkurangnya kunjungan pasien di Puskesmas karena masih ada pandemic covid-19.

Solusi yang telah dilaksanakan dengan melakukan kunjungan rumah terhadap tersangka untuk diambil sampel darahnya

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis - jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM di Bidang Urusan Pekerjaan Umum antara lain :

a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Adapun target pencapaian standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum di Magetan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari – hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	94,50 %	2020
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	94,00 %	2020

Sumber data : Dinas PU PR Kab. Magetan tahun 2020

4.3.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.6

Realisasi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kab. Magetan 2020

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2019			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari – hari	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan Air Bersih	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	216324	235197	91,976	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Jumlah Seluruh Rumah Tangga
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan Sanitasi	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	216971	235197	92,251	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Jumlah Seluruh Rumah Tangga

Sumber data : Dinas PU PR Kab. Magetan tahun 2020

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan antara lain :

Tabel 4.7

Alokasi Dana Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan

No.	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Alokasi Dana	Realisasi
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari - hari	Rp. 4.880.621.000,00	Rp. 4.358.488.375,00
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Rp. 1.883.950.900,00	Rp. 1.776.392.572,00

Sumber data : Dinas PU PR Kab. Magetan tahun 2020

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.8

Personel Pendukung pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No.	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Dukungan Personil
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari – hari	10 PNS
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	10 PNS

Sumber data : Dinas PU PR Kab. Magetan tahun 2020

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020 tidak ditemui permasalahan yang berarti.

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahaan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain :

a. Penyediaan dan rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Adapun Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Magetan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.9

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Magetan

	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	-
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Jumlah Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah	-	-

	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
	kabupaten	kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		

Sumber data : Dinas Perkim Kab. Magetan tahun 2020

4.4.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. Adapun Realisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Magetan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.10

Realisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Magetan Tahun 2020

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persentase (%) Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak h Jumlah keseluruhan Warga Kabupaten korban bencana
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Persentase (%) Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				Jumlah Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Jumlah keseluruhan Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten

Sumber data : Dinas Perkim Kab. Magetan tahun 2020

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Adapun alokasi dana Bidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain :

Tabel 4.11

Alokasi Dana Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Kab. Magetan Tahun 2020

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Alokasi Dana
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	

Sumber data : Dinas Perkim Kab. Magetan tahun 2020

4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat adalah :

Tabel 4.12

Jumlah personil pada Standar Pelayanan Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Kab. Magetan Tahun 2020

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Dukungan Personil
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	6 PNS
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	

Sumber data : Dinas Perkim Kab. Magetan tahun 2020

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain :

1) Data rumah yang layak huni untuk korban bencana tidak dimiliki secara rinci sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana tidak dapat dilakukan secara maksimal

2) Data rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah tidak dimiliki secara lengkap sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi tidak dapat dilakukan secara maksimal

Adapun solusi yang diupayakan guna menningkatkan pelaksanaan SPM bidang Perumahan Rakyat antara lain :

1) Mencukupi/melengkapi data dasar rumah yang layak huni untuk korban bencana dan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah agar tidak adanya tumpang tindih kebijakan antar OPD

Memasukan data dasar rumah yang layak huni untuk korban bencana dan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah yang diperlukan agar lebih lengkap dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

4.5 URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh Pemerintah. Adapun SPM dibidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
2.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Sumber: Satpol PP Kab. Magetan Tahun 2020

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

a. **Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan pelanggaran ketertiban umum :**
   1. Target RKPD 2020 : 100% ;
   2. Target Akhir RPJMD : 100%
b. **Persentase laporan peristiwa kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit :**
   1. Target RKPD 2020 : 100% ;
   2. Target Akhir RPJMD : 100%

4.5.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

a. Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan pelanggaran ketertiban umum tahun 2019 - 2020

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target RKPD 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja RKPD	Capaian Kinerja RPJMD
		2019	2020				
1	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan

b. Persentase laporan peristiwa kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit tahun 2019 – 2020

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Target RKPD 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja RKPD	Capaian Kinerja RPJMD
		2019	2020				
1	Persentase Laporan Peristiwa Kebakaran yang Ditindaklanjuti Dalam Kurun Waktu 15 Menit	68%	77 %	100%	100%	77 %	77 %

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan

4.5.4 Alokasi Anggaran

Merupakan anggaran yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Adapun alokasi dana Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang Perlindungan Masyarakat Antara lain :

Tabel 4.13

Alokasi Dana Bidang

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

No	Pelayanan Dasar	Alokasi Dana
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	2.147.120.727,00
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.451.387.809,00

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kab. Magetan

4.5.5 Dukungan Personil

Jumlah personil Satpol PP dan Damkar adalah 109 Orang

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Permasalahan :

a. Belum adanya sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga PPNS yang ada masih tersebar di berbagai OPD.
b. Belum diaktifkannya unit Satpol PP di wilayah kecamatan sehingga penegakan perda di masing - masing wilayah kecamatan belum optimal.
c. Kurangnya sarana prasarana dan personil untuk menunjang optimalisasi kegiatan operasional pemadam kebakaran.
d. Belum adanya unit pembantu / posko di setiap wilayah manajemen kebakaran sehingga menyebabkan penanganan pemadaman kebakaran di wilayah tertentu kurang optimal sehingga tidak memenuhi respon time 15 menit. Ditahun 2020, telah dibangun 1 unit pembantu / posko Damkar di Kantor Kecamatan Karangrejo.

Solusi :

a. Satpol PP dan Pemadam kebakaran akan membentuk sekretariat PPNS serta penyatuan beberapa personil PPNS yang ada di beberapa OPD, diharapkan bisa mempermudah koordinasi dan dapat berjalan secara optimal dalam melaksanakan tupoksinya.
b. Mengoptimalkan linmas desa dan mengaktifkan unit Satpol PP di wilayah kecamatan.
c. Mengupayakan pengadaan personil dan sarana prasarana pemadam kebakaran serta melakukan perbaikan dan perawatan secara rutin sarana prasarana pemadam kebakaran yang sudah ada.
d. Mulai tahun 2021 secara bertahap melaksanakan rekrutmen tenaga damkar non pns, dan akan membuka unit pembantu/posko di 2 kantor eks distrik.

4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahaan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Sosial antara lain :

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar didalam panti
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnyagelandangan dan pengemis di dalam panti
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Adapun target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial Kab. Magetan adalah :

Tabel 4.14

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial

Kab. Magetan Tahun 2020

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	33,62	2020
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Persentase (%) Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	10,97	2020
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar didalam panti	Persentase (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	28,20	2020
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Persentase (%) tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	100	2020
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi	Persentase (%) cakupan penanganan korban bencana skala kabupaten yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat	100	2020

Sumber data : Dinas Sosial Kab. Magetan Tahun 2020

4.6.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Adapun Realisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kab. Magetan adalah :

Tabel4.15

Realisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kab. Magetan Tahun 2020

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai %	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100%	Dinas Sosial	1.161	3.453	33,62	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi Jumlah penyandang disabilitas terlantar terlantar di seluruh wilayah Kabupaten Magetan
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Persentase (%) Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	100%	Dinas Sosial	147	1.340	10,97	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Jumlah anak terlantardi seluruh wil Kabupaten Magetan
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar didalam panti	Persentase (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	100%	Dinas Sosial	423	1.500	28,20	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Jumlah lanjut usia terlantar di seluruh wilayah Kabupaten Magetan
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Persentase (%) tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	100%	Dinas Sosial	150	150	100	Jumlah tuna sosial khusunya gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di seluruh wilayah Kabupaten Magetan
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi	Persentase (%) cakupan penanganan korban bencana skala kabupaten yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat	100%	Dinas Sosial	7.218	7.218	100	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat Jumlah korban bencana skala Kabupaten yang memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat

Sumber data : Dinas Sosial Kab. Magetan Tahun 2020

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Adapun alokasi anggaran Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kab. Magetan adalah :

Tabel 4.16

Alokasi Anggaran Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kab. Magetan Tahun 2020

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial	Alokasi Dana
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	1.866.030.000
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar didalam panti	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi	

Sumber data : Dinas Sosial Kab. Magetan Tahun 2020

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Adapun dukungan personel Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kab. Magetan adalah :

Tabel 4.17

Dukungan Personel Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kab. Magetan Tahun 2020

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Dukungan Personil
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	13 personil
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar didalam panti	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Dukungan Personil
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi	

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial antara lain :

a. Masih tingginya jumlah PMKS yang belum mendapatkan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya
b. Tingginya jumlah penyandang disabilitas (cacat) yang belum mendapat jangkauan pelayanan sosial sesuai spesifikasi kecacatannya baik pelayanan primer maupun sekunder meliputi pelayanan kebutuhan pokok dan pelayanan peningkatan SDM.
c. Masih banyaknya Lanjut Usia Terlantar yang belum mendapatkan pelayanan sosial.

Adapun solusi yang diupayakan guna menningkatkan pelaksanaan SPM bidang Perumahan Rakyat adalah dengan Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial seperti UCP Roda Kemanusiaan maupun lembaga pemerintah pusat maupun provinsi seperti Balai Rehabilitasi Cacat Mental, Rehabilitasi Cacat Daksa, Panti Wreda dll, serta mengusulkan bantuan sosial Jaminan Sosial Cacat Berat kepada Pemerintah Propinsi dan Kemensos RI.

4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

4.7.1 URUSAN PENDIDIKAN

Adapun program kegiatan tahun 2020 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :

A. Program Pendidikan Anak Usia Dini
   - Pembangunan sarana dan Prasarana bermain
   - Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
   - Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
   - Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
   - Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
B. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
   - Penambahan ruang kelas sekolah
   - Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
   - Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

- Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
- Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
- Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
- Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
- Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
- Pelaksanaan Ujian Akhir SMP
- Pelaksanaan Ujian Akhir SD
- Peningkatan sarana prasarana dan mutu pendidikan (tahun lalu)
- Peningkatan sarana prasarana dan mutu pendidikan
- Pengembangan Pendidikan Inklusif
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler
- Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Pendidikan
- Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DID Tambahan)
- Biaya Pendamping Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah DID-T (DAU)

C. Program Pendidikan Non Formal

- Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
- Pengembangan pendidikan keaksaraan
- Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
- Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
- Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
- Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
- Pemberantasan Buta Aksara
- Penyelenggaraan Ujian Paket B dan Paket C
- Koordinasi bidang PAUD dan PNF
- Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Pendidikan (Non Formal)
- Pengembangan pendidikan keaksaraan
- Penyelenggaraan pendidikan paket B dan C
- Peningkatan peran keluarga dalam pelaksanaan Pendidikan

D. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Pelaksanaan Sertifikasi pendidik
- Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
- Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Pendidik

- Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

4.7.2 URUSAN KESEHATAN

Mengacu pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka Dinas Kesehatan melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM bidang kesehatan pada tahun 2020 dengan Program Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di 22 Puskesmas di Kabupaten Magetan.
2. Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas.
3. Kegiatan Pelayanan kesehatan ibu hamil;
4. Kegiatan Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
5. Kegiatan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
6. Kegiatan Pelayanan kesehatan balita;
7. Kegiatan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
8. Kegiatan Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
9. Kegiatan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
10. Kegiatan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi;
11. Kegiatan Pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus;
12. Kegiatan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
13. Kegiatan Pelayanan Kesehatan orang dengan TB;
14. Kegiatan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

4.7.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

A. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Kegiatan :

- Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum
- Pengembangan sistem distribusi air minum
- Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (APBD/DAU)
- Penyediaan prasarana dan sarana air minum (DID Tambahan)
- Biaya Pendamping Penyediaan prasarana dan sarana air minum DID T (DAU)

B. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Kegiatan :

- Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Air Minum

C. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Kegiatan :

- Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Sanitasi
- Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DID Tambahan)
- Biaya Pendamping Penyediaan prasarana dan sarana air limbah DID T (DAU)

4.7.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Program dan Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tercapainnya SPM Tahun 2020 belum ada, direncanakan setelah perubahan SOTK 2021, untuk kegiatan tercapainya SPM bisa di cantumkan dalam DPA

4.7.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
   a. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
   b. Peningkatan kemampuan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
   c. Pengendalian keamanan pelaksanaan demokrasi
2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
   a. Kegiatan pengamanan hari besar dan perayaan kegiatan ORMAS
   b. Kegiatan pengendalian dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
   c. Kegiatan Pengamanan dan pengawalan event daerah
3. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
   a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
   b. Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
   c. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

4.7.6 URUSAN SOSIAL

A. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Kegiatan:

- Kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
- Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
- Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
- Kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
- Kegiatan Penanganan Lanjut Usia Terlantar
- Kegiatan Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Rumah Singgah
- Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial.

D. Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat

Kegiatan :

- Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarkat
- Pemulihan dan Perlindungan Sosial Eks Korban Bencana

BAB V
P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah Tahun 2020 merupakan tolok ukur capaian kinerja Kepala Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam kurun waktu satu tahun anggaran, dimana LPPD ini juga memuat keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dicapai termasuk permasalahan yang belum mendapatkan penyelesaian selama satu tahun anggaran.

Keberhasilan capaian program dan kegiatan merupakan komitmen dan konsistensi semua pihak baik aparatur Pemerintah Daerah, unsur Forkopimda, para anggota DPRD dan partisipasi masyarakat. Perhargaan yang setinggi tingginya disampaikan kepada semua pihak atas kerjasama yang baik sehingga seberat apapun tantangan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik, yang muaranya dapat tercipta suasana Magetan yang kondusif, tenteram damai dan penuh rasa kekeluargaan. Saran dan masukan sangat diharapkan sehingga akan menjadikan bekal dalam penyempurnaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Selanjutnya kami berharap, laporan ini bisa jadi pertimbangan bagi Pemerintah dalam memberikan penilaian atas kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat selama Tahun 2020.

Magetan, Maret 2021

BUPATI MAGETAN

Dr. Drs. H.SUPRAWOTO,S.H., M.Si

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus		jumlah/capaian kinerja	Bobot
1) Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
a) Pendidikan (Bobot Urusan : 5%)						
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD / Jumlah anak usia 5-6 tahun pada daerah yang bersangkutan X 100%	16190 / 17538 X 100%	92,31383282	25%
		1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)			383	
		2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			16190	
		3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			16190	
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)			866	
		5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)			1317	
		6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini			666	
		7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah			379	
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar X 100%	50468 X 100%	99,36406056	25%

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus		jumlah/capaian kinerja	Bobot
			Jumlah anak usia 7-12 tahun pada daerah yang bersangkutan	50791		
		1. Jumlah SD Negeri Terakreditasi			436	
		2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			53753	
		3. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan			53753	
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)			4176	
		5. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)			4729	
		6. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)			1044	
		7. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)			88	
		8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			2696	
		9. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			501	
		10. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat			12	
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan		Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama X 100%	26106 X 100%	93,91323117	25%

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus		jumlah/capaian kinerja	Bobot
	menengah pertama		Jumlah anak usia 13-15 tahun pada daerah yang bersangkutan	27798		
		1. Jumlah SMP Negeri Terakreditasi			50	
		2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			30762	
		3. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan			30762	
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama			3348	
		5. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama			2425	
		6. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama			558	
		7. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama			479	
		8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			1419	
		9. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			83	
		10. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazahSMA/sederajat			168	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus		jumlah/capaian kinerja	Bobot
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan X 100% / Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada daerah yang bersangkutan	343 / 105142 X 100%	0,3262254855	25%
		1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)			4	
		2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			556	
		3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan			556	
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)			33	
		5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)			117	
		6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)			109	
		7. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			0	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1		15	
b)	**Kesehatan (Bobot Urusan : 6%)**				
1.	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk		Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan / Jumlah Penduduk di kabupaten/kota x 100% (695215) x 100%	0,06048932682	7%
		Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar		2	
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi		Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi / Jumlah RS di kabupaten/kota x 100% (2 / 2) x 100%	100	7%
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		2	
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan / Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota x 100% (8064 / 8500) x 100%	94,87058824	7%
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		217524	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		831	
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan / Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota x 100% (8133 / 8113) x 100%	100,2465179	7%
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		10654	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar		831	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota x 100% (8004 / 7727) x 100%	103,5848324	7%
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		54005	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar		811	
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah balita di kabupaten/kota x 100% = 32219 / 30308 x 100%	106,3052659	7%
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		120135	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		1364	
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota x 100% = 84298 / 88808 x 100%	94,92162868	7%
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		2527	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		3119	
8.	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar / Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota x 100% = 278199 / 382226 x 100%	72,78390272	7%
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		309001	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		88	
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar / Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota x 100% = 97902 / 127768 x 100%	76,62481999	7%
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		389973	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		898	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota x 100% = 114152 / 205528 x 100%	55,54085088	7%
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		308113	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		135	
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita DM di kabupaten/kota x 100% = 16244 / 13260 x 100%	122,5037707	7%
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		888	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		135	
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota x 100% = 1528 / 1195 x 100%	127,8661088	7%
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		44	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		135	
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota x 100% = 602 / 1143 x 100%	52,66841645	7%
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		ada	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		106	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar / Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota x 100% = 12657 / 13193 x 100%	95,93723945	7%
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		51700	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		88	
c)	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bobot Urusan : 6%)**				
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota		Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) / Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) x 100% = 0 / 1 x 100%	0	10%
		1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		-	
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		-	
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)		-	
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)		-	
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	ada/tidak	ada	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	ada/tidak	ada	
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	jumlah	-	
2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) - x 100% x 100% Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) -	#VALUE!	10%
		1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		-	
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		-	
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		-	
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		-	
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	ada/tidak	ada	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	ada/tidak	ada	
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	jumlah	-	
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting / luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota x 100% = 13.436,00 / 14.072,00 x 100%	95,48038658	10%
		1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) / Panjang jaringan irigasi primer (m) x 100% = 57.988,58 / 60.050,00 x 100%	96,5671607	
		2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) / Panjang jaringan irigasi sekunder (m) x 100% = 28.438,00 / 29.666,00 x 100%	95,86058114	
		3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m) / Panjang jaringan irigasi tersier (m) x 100% = - / - x 100%	#VALUE!	
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. / Jumlahtotal proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. x 100% = 216.324,00 / 235.197,00 x 100%	91,97566295	20%
		1. Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	ada/tidak	ada	
		2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	ada/tidak	tidak	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)		tidak	
		4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		-	
		5. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.		-	
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD / Jumlah rumah di Kabupaten Kota x 100% = 216.971,00 / 235.197,00 x 100%	92,2507515	20%
		1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S			
		2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		680 SR	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		680 SR	
		4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		-	
		5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		-	
		6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		-	
		7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik / Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha x 100% = 216.971,00 / 235.197,00 x 100%	92,2507515	
		8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT / Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah x 100% = - / - x 100%	#VALUE!	
		9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	Jumlah rumah yang memiliki sambungan dan air limbahnya diolah di IPALD / Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDT x 100% = 680,00 / 235.197,00 x 100%	0,289119334	
		10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat / Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S x 100% = - / - x 100%	#VALUE!	
		11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia x 100% = 1 / 1 x 100%	1	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus				jumlah/capaian kinerja	Bobot
			Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota		100	x 100%	1	
		12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota	x 100%	- -	x 100%	#VALUE!	
		13. Kinerja penyediaan sambungana rumah yang tersambung ke IPALD	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota	x 100%	680,00 235.197,00	x 100%	0,289119334	
		14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S	x 100%	- -	x 100%	#VALUE!	
6.	Rasio kepatuhan IMB kab/kota		Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya Jumlah IMB yang berlaku	x 100%	79.866 79.866	x 100%	100	10%
		1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)	x 100%	50,00 184.327,00	x 100%	0,02712570595	
		2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalatahun eksisting					363	
		3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung (ada/tidak)	ada/tidak				Ada	
		4. Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/tidak)	ada/tidak				Tidak	
		5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan					Tidak	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah		Tidak	
		7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota		1400	
		8. Jumlah bangunan gedung negara milik peerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat		1400	
7	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap / Jumlah total panjang jalan kebupaten/kota x 100% = 0 / 630,25 x 100%	0	10%
		1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota		630,25 Km	
		2. Panjang jalan yang dibangun		0 Km	
		3. Panjang jembatan yang dibangun		0 Unit	
		4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)		15,32 Km	
		5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		7 Unit	
		6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi		88,21 Km	
		7. Panjang jembatan yang direhabilitasi		1 Unit	
		8. Panjang jalan yang dipelihara		16.56Km	
		9. Panjang jembatan yang dipelihara		179 Unit	
8	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis / Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah kabupaten/kota x 100% = 447 / 520 x 100%	85,96153846	10%
		1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota		1	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota		447	
		3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota		58	
		4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	ada/tidak	ada	
		5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/kota	ada/tidak	Tidak	
		6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD	ada/tidak	Tidak	
		7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	ada/tidak	Tidak	
		8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	ada/tidak	ada	
		9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	ada/tidak	ada	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	ada/tidak	ada	
		11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis	ada/tidak	ada	
		12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota	ada/tidak	ada	
		13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	ada/tidak	Data di DPMPTSP	
		14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	ada/tidak	Data di DPMPTSP	
		15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	ada/tidak	Data di DPMPTSP	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	ada/tidak	Tidak	
		17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	ada/tidak	Data di DPMPTSP	
		18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota		267	
		19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP diwilayah kabupaten/kota		Data di DPMPTSP	
		20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota		189	
		21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota		267	
		22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Data di DPMPTSP	
		23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Data di DPMPTSP	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		0	
		25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Data di DPMPTSP	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi / Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya x 100% = 0 / 260 x 100%	0	
d)	**Perumahan Rakyat (Bobot Urusan : 6%)**				
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n x 100% = x 100%	#DIV/0!	20%
		1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya			
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam			
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam			
		4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi			

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi			
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi			
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana			
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi			
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan			
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota		Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni x 100% / Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan x 100%	#DIV/0!	20%
		1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
		2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM			

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
		4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
		5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
		6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah			
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani		Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) / Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha x 100% = 0,001213 / 0,041869 x 100%	2,897131529	20%
		1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha		418,69	
		2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH			
		3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		0,001213	
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		Jumlah unit rumah tidak layak huni / Jumlah total unit rumah kabupaten/kota x 100% = 6855 / 216140 x 100%	3,171555473	20%
		1. Jumlah rumah di kab/kota		216140	
		2. Jumlah unit PK RTLH			
		3. Jumlah rumah tidak layak huni		6855	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		4. Jumlah rumah yang tidak dihuni			
		5. Rasio rumah dan KK			
		6. Jumlah rumah pembangunan baru		35	
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / Jumlah unit rumah kab/kota x 100% = 1122 / 216140 x 100%	0,5191079856	20%
		1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		19	
		2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		1122	
		3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		1122	
		4. Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)		1122	
		5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH			
		6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU			
		7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi		6	
		8. Jumlah pengembang yang terregistrasi		19	
		9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		6	
e)	**Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Bobot Urusan : 6%)**				
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		Jumlah pengaduan yang ditangani / Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk x 100% = 462 / 477 x 100%	96,85534591	14%
		1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani		462	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan		390	
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		7	
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		5	
		5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	ada/tidak	ada	
		6. Tersedianya sarana prasarana minimal	ada/tidak	ada	
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		Jumlah Perda/ Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan x 100% / Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 7 / 16 x 100%	43,75	14%
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	860	14%
		1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun x 100% / jumlah satuan dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan x 100%	#DIV/0!	
		2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenisancaman bencana	jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi jenis ancaman bencana x 100% / seluruh penduduk di kawasan rawan bencana = 0 / 1 x 100%	0	
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	860	14%
		1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun x 100% / jumlah satu dokumen PRB yang lengkap dan sudah disahkan = 0 / 1 x 100%	0	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus				jumlah/capaian kinerja	Bobot
		2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun jumlah satu dokumen Renkon yang lengkap dan sudah disahkan	x 100%	2 2	x 100%	100	
		3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan Jumlah aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana	x 100%	860 10497	x 100%	8,192816995	
		4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	x 100%	579 10497	x 100%	5,515861675	
		5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	x 100%	255 10497	x 100%	2,429265504	
		6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	x 100%	6089 10497	x 100%	58,00704963	
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				255	14%
		1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB Jumlah seluruh penetapan status KLB	x 100%	1 1	x 100%	100	
		2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	x 100%	2	x 100%	100	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
			Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana		
		3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana / Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana x 100% (55 / 55) x 100%	100	
		4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi / Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana x 100% (255 / 255) x 100%	100	
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah / Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota x 100% (41 / 53) x 100%	77,35849057	14%
		1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota		belum ada	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	ada/tidak	ada	
		3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	ada/tidak	ada	
		4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Dibuat dalam bentuk daftar	belum ada	
		5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Dibuat dalam bentuk daftar	belum ada	
		6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksudPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		8	
		7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakarandan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran		390	
		8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran		2	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
7.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	12 menit	14%
f)	**Sosial (Bobot Urusan : 6%)**				
1.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 1881 x 100% / Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis 6443 x 100%	29,19447462	50%
		1. Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki		1048	
		2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjur usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM		6443	
		3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		-	
		4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau		1881	
		5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		4	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi		1379	
		7. Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		1	
		8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang		264	
		9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu		115	
		10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter		2	
		11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia		-	
		12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		338	
		13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah		1	
		14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan		32	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		1881	
		16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		574	
		17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		7	
		18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		208	
		19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		15	
		20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		15	
		21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		100	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran 7218 x 100% / Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 7218 x 100%	100	50%
		1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan		7218	
		2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		33	
		3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		-	
		4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		7218	
		5. Jumlah korban bencana yang meneriman pelayanan dukungan psikososial		7218	
		6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		46	
2) Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
a) Tenaga Kerja (Bobot Urusan : 3%)					
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD 3 x 100% / Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota 4 x 100%	75	
		1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	sesuai	
		2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	Realisasi indikator - Target indikator 15,91 x 100% / Realisasi 62,58 x 100%	25,42345797	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus				jumlah/capaian kinerja	Bobot
		3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	Jumlah seluruh perusahaan yang yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan				0	
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi Jumlah tenaga kerja keseluruhan	x 100%	196 355762	x 100%	0,05509301162	25%
		1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n	x 100%	4 9	x 100%	44,44444444	
		2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n	x 100%	32 64	x 100%	50	
		3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun n Jumlah peseta pelatihan pada tahun n	x 100%	18 196	x 100%	9,183673469	
		4. Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n Jumlah seluruh LPK pada tahun n	x 100%	5 32	x 100%	15,625	
		5. Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n [redacted]un n	x 100%	32 32	x 100%	100	
		6. Jumlah penganggur yang dilatih					136	
		7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n Jumlah orang yang dilatih pada tahun n	x 100%	196 196	x 100%	100	
		8. Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n Jumlah lulusan pada tahun n	x 100%	59 196	x 100%	30,10204082	
		9. Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n Jumlah lulusan bersertifikat pada tahun n	x 100%	86 196	x 100%	43,87755102	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Jumlah CPMI dilatih / Jumlah CPMI terdaftar x 100% = 305 / 305 x 100%	100	
		11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga KerjaIndonesia (CTKI)		2	
3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan / Jumlah tenaga kerja x 100% = 17.625.123,86 / 355762 x 100%	4954,189559	25%
		1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n / Jumlah perusahaan pada tahun n x 100% = 0 / 905 x 100%	0	
		2. Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja)		
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).		Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / Jumlah Perusahaan x 100% = 793 / 905 x 100%	87,62430939	25%
		1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n / Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 0rang atau lebih x 100% = 6 / 40 x 100%	15	
		2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n x 100% = 4 x 100%	57,14285714	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
			Jumlah perusahaan yang memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh / 7 x 100%	57,14285714	
		3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		21 PUK	
		4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah / Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB) x 100% (6 / 40) x 100%	15	
		5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan / jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor x 100% (772 / 905) x 100%	85,3038674	
		6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih / Jumlah perusahaan pada tahun ini x 100% (5 / 905) x 100%	0,5524861878	
		7. Jumlah mogok kerja		1	
		8. Jumlah penutupan perusahaan		1	
		9. Jumlah perselisihan kepentingan		0	
		10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		0	
		11. Jumlah perselisihan PHK		4	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK		8	
		13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		1	
		14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	ada/tidak	1	
		15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator	$\frac{\text{Jumlah perjanjian bersama}}{\text{Jumlah kasus perselisihan}} \times 100\% = \frac{5}{6} \times 100\%$	83,33333333	
5.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota		$\frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100\% = \frac{1214}{1940} \times 100\%$	62,57731959	25%
		1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota		1315	
		2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		1940	
		3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		35	
		4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota		0	
		5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		4	
		6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota		0	
		7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.		0	
		8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		1214	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Jumlah CPM/CTKI yang mendapatkan sosialisasi / Jumlah CPMI/CTKI x 100% = 305 / 305 x 100%	100	
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)yang terdata		305	
		11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Jumlah fasilitas PMI yang dipulangkan / Jumlah PMI yang pulang x 100% = 22 / 22 x 100%	100	
		12. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Jumlah PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja / Jumlah PMI/TKI x 100% = 305 / 305 x 100%	100	
		13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Jumlah PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan x 100% = 320 x 100%	100	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
			Jumlah PMI/TKI purna dan keluarganya 320		
		14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	Jumlah LTSA yang terbentuk 0 / Jumlah daerah kantong PMI/TKI 0 x 100% x 100%	#DIV/0!	
g)	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Bobot Urusan : 3%)**				
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		Jumlah ARG pada belanja langsung APBD 549550926669 / Jumlah seluruh belanja langsung APBD 791323954818 x 100% x 100%	69,44702272	33%
		1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		24 OPD	
		2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota		24 OPD	
2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten		Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi 62 / Jumlah Anak (Penduduk usia kurang dari 18 tahun) 158344 x 100% x 100%	0,03915525691	33%
		1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		1	
		2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		1	
		3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani 62 / Jumlah korban kekerasan anak di tingkat provinsi 1281 x 100% x 100%	4,839968774	
		4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		1	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)		1	
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)		Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan 76 x 100% x 100% Jumlah penduduk perempuan 350506	0,02168293838	33%
		1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan		5,00	
		2. Jumlah kader perempuantingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih		0,00	
		3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		1,00	
		4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		1,00	
		5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		1,00	
		6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi		0,00	
		7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan x 100% 76	100	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
			Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan / 76 x 100%	100	
h)	**Pangan (Bobot Urusan : 3%)**				
1.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)		Jumlah cadangan pangan / Jumlah kebutuhan pangan x 100% 216140 / 45855 x 100%	471,3553593	100%
		1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	ada/tidak	ada	
		2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	ada/tidak	ada	
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	ada/tidak	tidak	
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	ada/tidak	ada	
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	ada/tidak	ada	
		6. Tertanganinya kerawanan pangan	ada/tidak	ada	
		7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	ada/tidak	tidak	
		8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	ada/tidak	ada	
i)	**Pertanahan (Bobot Urusan : 2%)**				
1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi / seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi x 100% 1 / 1 x 100%	100	
		1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses penolakan(ditolak seluruhnya) x 100% x 100%	#DIV/0!	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus				jumlah/capaian kinerja	Bobot
			jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun	x 100%		x 100%	#DIV/0!	
		2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform	x 100%	0 1	x 100%	0	
		3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee julah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai objek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maximum absentee dan daftar subyek	x 100%		x 100%	#DIV/0!	
		4. Dokumen Izin membuka tanah	jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohondalam 1 tahun	x 100%	0 1	x 100%	0	
		5. Dokumen Perencanaan Penggunaan TanahKabupaten/Kota	jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	x 100%		x 100%	#DIV/0!	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus				jumlah/capaian kinerja	Bobot
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	x 100%	0 1	x 100%	0	
3.	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.		Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi Luas izin lokasi yang diterbitkan	x 100%		x 100%	#DIV/0!	
4.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; Jumlah penerima tanah obyek landreform	x 100%		x 100%	#DIV/0!	
5.	Tersedianya tanah untuk masyarakat.		Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	x 100%		x 100%	#DIV/0!	
6.	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	x 100%		x 100%	#DIV/0!	
j)	**Lingkungan Hidup(Bobot Urusan : 3%)**							
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	1. Hasil perhitungan provinsi terhadap: a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	IKLH Kab/Kota = (IKA 37.6%) + (IKU 40.5%) + (ITH 21.9%)				82.3 55.28 85.10 67.61	33%
2.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota		Total Vol sampah yang dapat ditangani Total vol timbunan sampah kabupaten/kota	x 100%	11752040 152916750	x 100%	7,685253578	33%
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah	Tersedianya informasi terkait rasio angk		ada		7.29	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah ada Tersedianya informasi terkait jumlah TP ada (informasi terkait jumlah TPS)	6,37	
3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izinPPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota		Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yangmelanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota 5 x 100% usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan 17 x 100%	29,41176471	33%
		1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemkab/kota 234 x 100% jumlah urusan permohonan yang teregistrasi 234 x 100%	100	
		2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	jumlah PPLHD yang ada jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemkab/kota x 100% x 100%	#DIV/0!	
		3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	jumlah MHA yang diakui jumlah usulan MHA x 100% x 100%	#DIV/0!	
		4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan pelatihan jumlah MHA yang ada x 100% x 100%	#DIV/0!	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus					jumlah/capaian kinerja	Bobot
		5. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana target lembaga kemasyarakatan yang adan diberikan diklat	x 100%	82 82	x 100%		100	
		6. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	pengaduan masyarakat yang ditangani total jumlah pebgaduan masyarakat yang teregister	x 100%	15 15	x 100%		100	
k)	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Bobot Urusan : 2%)**								
1.	Perekaman KTP elektronik		Jumlah Penduduk berumur 17 tahunke atas yang memiliki KTP Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	x 100%	524988 540201	x 100%		97,18382602	25%
		1. Penerbitan akta perkawinan	jumlah akta perkawinan yang diterbitkan jumlah perkawinan yang dilaporkan	x 100%	353 353	x 100%		100	
		2. Penerbitan akta perceraian	jumlah akta perceraian yang diterbitkan jumlah perceraian yang dkilaporkan	x 100%	78 78	x 100%		100	
		3. Penerbitan akta kematian	jumlah akta kematian yang diterbitkan jumlah kematian yang dilaporkan	x 100%	31291 31291	x 100%		100	
		4. Penyajian data kependudukan	jumlah penyajian data kependudukan skala kab/kota dalam 1 tahun 2 tahun	x 100%	2 2	x 100%		100	
2.	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		jumlah anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA jumlah anak usia 0-17 th	x 100%	100980 158344	x 100%		63,77254585	25%

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
	Kepemilikan akta kelahiran		jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran / jumlah anak usia 0-18 tahun. x 100% 160076 / 167543 x 100%	95,54323368	25%
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama		jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berjanjian perjanjian kerjasama / Jumlah OPD x 100% 1 / 1 x 100%	100	25%
l)	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bobot Urusan : 3%)**				
1	Persentase pengentasan desa tertinggal		Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun / Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) x 100% 0 / 0 x 100%	#DIV/0!	50%
		1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		0	
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		0	
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas		100	
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		0	
2.	Persentase peningkatan status desa mandiri		Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri / jumlah desa berkembang (per awal tahun n) x 100% 0 / 104 x 100%	0	50%
m)	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Bobot Urusan : 2%)**				
1.	TFR (Angka Kelahiran Total)				33%

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
			TFR $= 5 \sum_{i=1} ASFR\ i$	2.10	
		1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan	(ada/tidak)	TIDAK	
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia	24.64	
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFRi = \frac{b_i}{p_i^f} \times k$	17.99	
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK(advokasi dan KIE) / jumlah sasaran masyarakat program KKBPK(advokasi dan KIE) x 100% 220502 / 220502 x 100%	100	
		5. Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja ermasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	9	
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		Jumlah peserta KB Aktif Modern / x 100% 83329 x 100%	72.98166021	33%

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
			x 100% Jumlas Pasangan Usia Subur 114178	72,98166021	
		1. Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP 30 x 100% Jumlah Faskes. 37 x 100%	81,08108108	
		2. Persentase Peserta KBAktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB Aktif 27084 x 100% Jumlah PUS 114178 x 100%	23,72085691	
		3. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	24	
		4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern 3628 x 100% jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan 5295 x 100%	68,51746931	
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani 12463 x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur 114178 x 100%	10,91541278	33%
		1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah	9	
		2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI 20234 x 100% Jumlah keluarga PBI 20234 x 100%	100	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
n)	**Perhubungan (Bobot Urusan : 3%)**				
1.	Rasio konektivitas kabupaten/kota		Rasio konektvitas Kabupaten atau Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobotangkutan sungai, danau dan penyeberangan)	380	50%
		1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia / jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan x 100% (5 / 2) x 100%	250	
		2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	jumlah kendaraan yang diuji pertahun / jumlah kendaraan wajib uji x 100% (4.577 / 6.138) x 100%	74,56826328	
		3. Penetapan tarif fangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	jumlah penetapan tarif lintas penyebrangan / jumlah lintas penyebrangan dalam kab/kota x 100% x 100%	#DIV/0!	
		4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	jumlah pemasangan perlengkapan jalan kab/kota / target kebutuhan perlengkapan jalan kab/kota x 100% (2052 / 1950) x 100%	105,2307692	
2.	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota				50%
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untu jaringan jalan Kabupaten/Kota	jumlah pemasangan perlengkapan jalan kab/kota / target kebutuhan perlengkapan jalan kab/kota x 100% (2052 / 1950) x 100%	105,2307692	
o)	**Komunikasi dan Informatika (Bobot Urusan : 3%)**				
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo x 100% (55) x 100%	100	35%

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
	Dinas Kominfo		jumlah OPD 55		
		1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi diJaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh DinasKominfo	jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses in ternet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 55 x 100% x 100% jumlah OPD 55	100	
		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	jumlah OPD yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo 55 x 100% x 100% jumlah OPD 55	100	
		3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan	(ya/tidak)	ya, berupa email kabupaten	
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi 39 x 100% x 100% jumlah layanan publik 39	100	35%
		1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan (even), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemda yang diselenggarakan secara 39 x 100% x 100% jumlah kegiatan(event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemda No 5/2015 39	100	
		2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar 55 x 100% x 100% jumlah perangkat daerah 55	100	
		3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan	jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang 55 x 100% x 100% Jumlah perangkat daerah 55	100	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus					jumlah/capaian kinerja	Bobot
		4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen	x 100%	39	x 100%		100	
			jumlah layanan		39				
		5. Persentase layananSPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	jumlah layanan SPBE(layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	x 100%	2	x 100%		5,128205128	
			jumlah layanan		39				
		6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan perUUan	x 100%	39	x 100%		69,64285714	
			Jumlah sistem elektronik.		56				
		7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	jumlah layanan publik dab layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	x 100%	39	x 100%		100	
			jumlah layanan publik dan layanan administrasi		39				
		8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat pemerintah	x 100%	55	x 100%		100	
			jumlah perangkat daerah		55				
		9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat	x 100%	55	x 100%		100	
			jumlah perangkat daerah		55				
		10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesui siklus jenis datanya	x 100%	55	x 100%		100	
			jumlah perangkat daerah		55				
		11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	jumlah data yang dapat berbagai pakai	x 100%	4	x 100%		10,25641026	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
			x 100% jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah 39	10,25641026	
		12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	jumlah prangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukunh smart city 55 x 100% x 100% jumlah perangkat daerah 55	100	
		13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo 4 x 100% x 100% jumlah ASN pengelola TIK. 8	50	
		14. Tersedianya peraturandaerah atau peraturan kepala	ada/ tidak 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: □ Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran □ Penganggaran	Ada Master Plan Blue Print e - Government ; Perda no 6 th 2021tentang penyelenggaraan SPBE	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota 377716 x 100% x 100% jumlah penduduk 689210	54,80419611	30%
		1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/ kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/ kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan 3 x 100% x 100% jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota 13	23,07692308	
		2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	jumlah konten informasi terkait program kebijakan pemerintah dan pemkab sesuai dengan strategi komunikasi(STRAKOM) 780 x 100% x 100%	100	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus				jumlah/capaian kinerja	Bobot
			jumlah konten informasi terkait program kebijakan pemerintah dan pemkab sesuai dengan strategi komunikasi(STRAKOM)		780			
		3. Persentase diseminasi dan layananinformasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	jumlah Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP jumlah Diseminasi dan layanan informasi publik	x 100%	9 9	x 100%	100	
p)	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Bobot Urusan : 2%)**							
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas		Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset Jumlah seluruh koperasi	x 100%	293 835	x 100%	35,08982036	50%
		1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untukkoperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	jumlah pnerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan jumlah usaha simpan pinjam yang belum memiliki izin usaha simpan pinjam	x 100%	7 3	x 100%	233,3333333	
		2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang oembantu, dan kantor kas simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang oembantu, dan kantor kas simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	x 100%	12 18	x 100%	66,66666667	
		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalamdaerah kabupaten/kota	jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi jumlah koperasi yang ada	x 100%	65 835	x 100%	7,784431138	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannyauntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatanya / jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada x 100% = 75 / 835 x 100%	8,982035928	
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan / jumlah koperasi yang ada x 100% = 370 / 835 x 100%	44,31137725	
		6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan pengoperasian / jumlah koperasi yang ada x 100% = 428 / 835 x 100%	51,25748503	
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerahkabupaten/kota	jumlah koperasi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan / jumlah koperasi yang ada x 100% = 3 / 835 x 100%	0,3592814371	
		8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	tidak perlu diisi		

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat NIK / jumlah koperasi yang ada. x 100% = 313 / 835 x 100%	37,48502994	
		10. Persentase koperasi yangdiberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasidengan wilayah keanggotaan dalam daerahkabupaten/kota	jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiyaan / jumlah koperasi yang ada. x 100% = 0 / 835 x 100%	0	
		11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembayaran / jumlah koperasi yang ada. x 100% = 0 / 835 x 100%	0	
		12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan usaha / jumlah koperasi yang ada. x 100% = 25 / 835 x 100%	2,994011976	
		13. Persentase koperasi yangdiberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi denganwilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	jumlah koperasi yang diberikan dukungan kemitraan / jumlah koperasi yang ada. x 100% = 0 / 835 x 100%	0	
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha		Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha / Jumlah usaha mikro keseluruhan x 100% = 5 / 16.903 x 100%	0,02958054783	50%

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	jumlah pertumbuhan wirausaha baru	77	
		2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS) / jumlah uasaha mikro yang ada x 100% = 155.371 / 155.371 x 100%	100	
		3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	jumlah usaha mikro yang bermitra / jumlah usaha mikro yang ada x 100% = 85 / 16.903 x 100%	0,5028693131	
		4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi / jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk x 100% = 125 / 16.903 x 100%	0,7395136958	
		5. Persentase jumlah usahamikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran / jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukunghan pemasaran x 100% = 85 / 16.903 x 100%	0,5028693131	
		6. Rasio usaha mikroyang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan / jumlah usaha mikro yang ada x 100% = 130 / 16.903 x 100%	0,7690942436	
		7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha / jumlah usaha mikro yang ada x 100% = 200 / 16.903 x 100%	1,183221913	
q)	**Penanaman Modal (Bobot Urusan : 3%)**				
1	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota		(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota x 100% = -453460 x 100%	-38,9905417	100%

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
			Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota 1163000		
		1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	1	
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	1	
		3. Laporan evaluasi pelaksanaanpemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun	0	
		4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	1	
		5. Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	0	
		6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	2	
		7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	25	
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	8309	
		9. Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	709540654108	
		10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	9	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	19	
		12. Tersedianya data daninformasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	8	
r)	**Kepemudaan dan Olahraga (Bobot Urusan : 2%)**				
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota / Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota x 100% 736 / 125527 x 100%	0,586328041	33%
		1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		35	
		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan Kewirausahaan		0	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		jumlah pemuda 16-30 tahun yang menjadi anggota aktif organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota / jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota x 100% 102461 / 125527 x 100%	81,62467039	
		1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kaderpengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda		35	
		2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi		245	
3.	Peningkatan prestasi olahraga		Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	10	33%

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		42	
		2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		13	
s)	**Statistik (Bobot Urusan : 2%)**				
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	1. Tersedianya buku profil daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah x 100% / jumlah OPD 27 / 55 x 100%	49,09090909	50%
		1. Tersedianya buku profil daerah	ada/tidak	Ada	
		2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		NIHIL	
		3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		1	
		4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS		NIHIL	
		5. Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS		NIHIL	
		6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	jumlah metadata kegiatan statistik sektoral x 100% / jumlah kegiatan statistik sektoral - / - x 100%	#VALUE!	
		7. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	jumlah metadata indikator statitik sektoral x 100% / jumlah kegiatan statistik sektoral - / #REF! x 100%	#REF!	
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah x 100% / jumlah OPD - / - x 100%	#VALUE!	50%
t)	**Persandian (Bobot Urusan : 2%)**				

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus					jumlah/capaian kinerja	Bobot
1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah		Jumlah nilai per area keamanan informasi Jumlah area penilaian	x 100%	0 0	x 100%		#DIV/0!	100%
		1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	jumlah kegiatan strategis teramankan jumlah kegiatan strategis yang ada	x 100%	55 55	x 100%		100	
		2. Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	jumlah SE yang menerapkan SMKI atau aplikasi penyandian dan diamankan sertfikat elektronik jumlah SE yang ada	x 100%	2 56	x 100%		3,571428571	
		3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan risiko kategori rendah jumlah SE yang ada	x 100%	39 56	x 100%		69,64285714	
		4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan PolaHubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	jumlah titik teramankan jumlah titik pada PHKS	x 100%	55 55	x 100%		100	
u) Kebudayaan(Bobot Urusan : 2%)									
1.	Terlestarikannya Cagar Budaya		Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang terdata	x 100%	163 163	x 100%		100	100%

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	20 obyek pemajuan kebudayaan	
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yangdikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	15 obyek pemajuan kebudayaan	
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	6 obyek	
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatankompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	245 SDM, 196 Lembaga	
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan	belum ada Cagar Budaya yang ditetapkan	
		6. Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar	5 Cagar Budaya	
		7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	0	
		8. Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	2 Cagar Budaya	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		9. Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	7 Cagar Budaya	
		10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	0	
		11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	Jumlah pengunjung museum berpartisipasi dalam pengelolaan museum	0	
		12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	Tidak perlu diisi		
		13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	0	
		14. Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	Jumlah pembentukan tim ahli CB	0	
		15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	0	
		16. Pemetaan sdm cagar budayadan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum	0	
		17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	0	
		18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	0	
		19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	
v)	**Perpustakaan (Bobot Urusan : 2%)**				
1.	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		lihat di buku panduan		50%
		1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagaiperpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) x 100% 81401 x 100%	11,84777973	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
			jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) 687057		
		2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun ofline 15858 x 100% / jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) 687057 x 100%	2,308105441	
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	ketersediaan tenaga per[ustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya 854 x 100% / jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) 687057 x 100%	0,1242982751	50%
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	jumlah perpustakaan sesuai standar perpustakaan nasional 105 x 100% / jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya 533 x 100%	19,69981238	
		5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		171.764	
2.	2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		$\sum \frac{UPLM}{ALM}$ x 100		
		1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya			
		2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa			
		3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)			
w)	**Kearsipan (Bobot Urusan : 2%)**				
1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		T = (a + i + s + j)/4 T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip	1,811956393	50%

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
			s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKNmelalui JIKN		
		1. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip / jumlah seluruh arsip aktif x 100% = 113 / 290 x 100%	38,96551724	
		2. persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip / jumlah seluruh arsip inaktif x 100% = 113 / 290 x 100%	38,96551724	
		3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik / jumlah seluruh arsip statis x 100% = 91 / 91 x 100%	100	
		4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKNmelalui JIKN	jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN / jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan kab/kota x 100% = 38 / 291 x 100%	13,05841924	
2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		T = (m + b + g + a + c + i)/6 T= tingkat keberadaan dankeutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung pemekaran Daerah kabupaten/kota dengan NSPK	0,167	50%

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
			a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK		
		1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip		
		2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana		
		3. Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/ kota yang sesuai NSPK di provinsi	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau		
		4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik		
		5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)		
		6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman		

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
3) Urusan Pilihan					
a)	**Kelautan dan Perikanan (Bobot Urusan : 2%)**				
1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)		Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	1701,51	50%
		1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)		-	
		2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	jumlah TPI yang operasional / jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah kab/kota x 100% = 0 / 0 x 100%	#DIV/0!	
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan			
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)		3511	
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi		19085825	
b)	**Pariwisata (Bobot Urusan : 3%)**				
1.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) / Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100% = -170 / 170 x 100%	-100	20%

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		Panjang jalan kabupaten 684,92 km, jalan negara 15,61 km,jalan provinsi 39,06 km, jalan kabupaten 630,25 km, Jumlah kendaraan : Bus 386 unit, mobil 27.090 unit, truk 10.529 unit, motor 268.355 unit, pelanggan lisrik 202.486, listrik yang didistribusikan260 MWh, daya terpasang 207.476.270 KW, pelanggan PDAM lawu Tirta 70.131, produksi air bersih PDAM Magetan 14.184.537 m2	
		3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota		Hotel 75, Restoran 85, Cafe 5, Karaoke 5, Becak Air 12, Perahu 53, Kolam renang 4	
		4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		0	
		5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		2 Event	
		6. Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi			
		7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri		53 Unit	
		8. Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi / jumlah tenaga kerja pariwisata. x 100% = 21 / 1538 x 100%	1,365409623	
		9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	junlah peerta pembekalan sektor kepariwisataan / jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan x 100% = 80 / 80 x 100%	100	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		28 Desa Wisata	
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang dating ke kabupaten/kota		(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) / Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100% = -259687 / 929078 x 100%	-27,95104394	20%
	Tingkat hunian akomodasi		Jumlah kamar yang terjual / Jumlah kamar yang tersedia x 100% = 767 / 2193 x 100%	34,9749202	20%
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	4.79	20%
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rp. 10.874.247.000,-	20%
c)	**Pertanian (Bobot Urusan : 3%)**				
1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun		Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun / luas panen x 100% = 283304,5 / 42493,81 x 100%	666,6959258	50%
		1. Sarana pertanian yang diberikan		131 unit	
		2. Prasarana pertanian yang digunakan		131 unit	
		3. Penerbitan izin usaha pertanian		0	
		4. Persentase prasarana yang digunakan	jumlah prasarana yang aktif digunakan / jumlah prasarana yang dibangun x 100% = 131 / 131 x 100%	100	
		5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian dikab/kota	jumlah usulan yang difasilitasi / jumlah usulan usaha pertanian x 100% = 0 / 0 x 100%	#DIV/0!	
2.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) / Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) x 100% = 4311 / 393 x 100%	1096,946565	50%

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	jumlah area yang dapat ditanggulangi / luas area terkena bencana x 100% = 688,84 / 688,84 x 100%	100	
d)	**Kehutanan (Bobot Urusan : 2%)**				
1.		1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	#ERROR!	
		2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	#ERROR!	
		3. Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	#ERROR!	
		4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	#ERROR!	
e)	**Energi dan Sumber Daya Mineral (Bobot Urusan : 3%)**				
1.	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin / Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi x 100% = #ERROR! / #ERROR! x 100%	#ERROR!	100%
		Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota x 100% = #ERROR! / #ERROR! x 100%	#ERROR!	
f)	**Perdagangan (Bobot Urusan : 3%)**				
1.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan		Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan / Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota x 100% = 3326 / 6992 x 100%	47,56864989	33%
		1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat	jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja		

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus				jumlah/capaian kinerja	Bobot
			jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	x 100%	50		8	
		2. Persentase penerbitan TDG	jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja jumlah permohonan izin pusat	x 100%	3 4	x 100%	75	
		3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	jumlah penerbitan TDG ≤ 5 hari kerja jumlah permohonan penerbitan TDG	x 100%	4 4	x 100%	100	
		4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri :					
		a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	x 100%	3 4	x 100%	75	
		b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	x 100%	3 4	x 100%	75	
		c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	x 100%	0 0	x 100%	#DIV/0!	
		5. Persentase pemeriksaanfasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kab/kota jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer	x 100%		x 100%	#DIV/0!	
		6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	jumlah SKA yang terbit ≤ 1 hari kerja (1x24 jam) jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumenya telah diterima dengan lengkap dan benar	x 100%		x 100%	#DIV/0!	

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus					jumlah/capaian kinerja	Bobot
		7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya 8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	K = (a + b) x 100% Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	K =		x 100%		0	
2.	Persentase Kinerja realisasi Pupuk		Realisasi RDKK	x 100%	59916,18 130154,5	x 100%		46,03465881	33%
		1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = \frac{a}{b \times c} \times 100\%$						
3	Persentase alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	x 100%	7414 57255	x 100%		12,94908742	
		1. Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang di wilayah kab kota	x 100%	7414 57255	x 100%		12,94908742	
		2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan	jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan	x 100%	59540 70620	x 100%		84,31039366	
g) Perindustrian (Bobot Urusan : 3%)									
1.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota		(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	x 100%	20 16035	x 100%		0,1247271593	17%

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di	jumlah realisasi izin yang diterbitkan / jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk x 100% (3 / 4) x 100%	75	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		lihat di buku panduan	50	17%
		1. Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	lihat di buku panduan		
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan x 100% (3 / 4) x 100%	75	17%
		1. Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	jumlah realisasi izin yang diterbitkan / jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk x 100% (3 / 4) x 100%	75	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan x 100% (4 / 4) x 100%	100	17%

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
		1. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	jumlah realisasi izin yang diterbitkan / jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk x 100% = 3 / 4 x 100%	75	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan x 100% = 1 / 1 x 100%	100	17%
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		lihat di buku panduan		17%
		1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/ kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan ecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab kota / total po[ulasi perusahaan industri di kawasan industri kab kota x 100% = 16035 / 50 x 100%	32070	
h) Transmigrasi (Bobot Urusan : 1%)					
1.		1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya		0	
		2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya		0	
		3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina		0	
4) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Bobot : 10%)					
a) Perencanaan dan Keuangan (Bobot Urusan : 30%)					
1.	Rasio Belanja Pegawaidi luar guru dan tenaga kesehatan		Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan / Jumlah APBD x 100% = 461993688850 / .50015071713⁴ x 100%	30,79648488	16,70%

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	jumlah/capaian kinerja	Bobot
2.	Rasio PAD		Jumlah PAD / Jumlah APBD non migas x 100% 203464421559 / .758579238411 x 100%	11,56981824	16.7%
3.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	16.7%
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0) /level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Menuju Level 3	16.7%
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umumexpenditures)		Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer Expenditures / jumlah belanja APBD x 100% 154900477954 / .502278305029 x 100%	10,3110374	16.7%
6	Opini Laporan Keuangan		Opini Laporan Keuangan	Opini Tahun 2019 = WTP	16.7%
b)	**Pengadaan (Bobot Urusan : 10%)**				
1.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama		jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n / jumlah kontrak keseluruhan tahun n x 100% 0 / 1 x 100%	0	33%
2.	Persentase jumlah pengadaan yangdilakukan dengan metode kompetitif		jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif / Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif x 100% 3.153.000.000.0 / 9.590.000.000.0 x 100%	27,90842807	33%
3.	Rasio nilai belanja yangdilakukan melalui pengadaan		Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan / total belanja langsung x 100% 53.000.000.00 / 00.000.000.00 x 100%	94,125	33%
c)	**Kepegawaian (Bobot Urusan : 20%)**				
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi danMenegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas / Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah x 100% 5999 / 1213 x 100%	494,5589448	33%
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) / seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100% 174 / 2190 x 100%	7,945205479	33%

No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus				jumlah/capaian kinerja	Bobot
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	x 100%	124 174	x 100%	71,26436782	33%
d)	**Manajemen Keuangan (Bobot Urusan : 20%)**							
1.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD		$\left(\left(\frac{\text{Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi}}{\text{total belanja APBD}}\right) - 1\right) \times 100\%$		.500150717134 .719981227518	x 100%	-12,78098312	25%
2.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD		$\left(\left(\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD}}\right) - 1\right) \times 100\%$		203464421559 205685936441	x 100%	-1,080051909	25%
3.	Manajemen Aset		1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)				Ya Ya Ya Tidak	25%
4.	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya		Nilai realisasi SiLPA total belanja anggaran tahunsebelumnya	x 100%	328706288863 .580820914414	x 100%	20,79339196	25%
e)	**Transparansi dan Partisipasi Publik (Bobot Urusan : 20%)**							
1.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan		Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	x 100%	1.287.393.955, 1.111.820.658,	x 100%	115,7915124	50%
2.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah		Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda total jumlah dokumen yang telah dirinci	x 100%	15 15	x 100%	100	50%